



**PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN DAERAH**

**MODUL**  
**Akuntansi Keuangan Daerah**

Oleh

**Margono**

Widyaiswara Pusdiklat Kekayaan Negara  
dan Perimbangan Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN  
JAKARTA  
2010

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat rahmatNya kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghasilkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi orang banyak. Begitu pula dengan modul diklat ini yang tanpa restu-Nya niscaya tidak akan terselesaikan dengan baik.

Modul Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun oleh Saudara Margono dengan penilai Saudara Bambang Widjajarso berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Nomor: KEP.01/PP.6/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Daerah.

Kami menyetujui modul ini digunakan sebagai bahan ajar bagi para peserta Pelatihan Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Daerah. Modul ini disusun dengan maksud guna membantu pencapaian tujuan pembelajaran dalam diklat tersebut.

Akhirnya, semoga Modul Akuntansi Keuangan Daerah ini dapat bermanfaat bagi peserta diklat khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Jakarta, 21 September 2010

Kepala Pusat  
Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan  
Negara dan Perimbangan Keuangan

Syamsu Syakbani  
NIP 195902241980031001

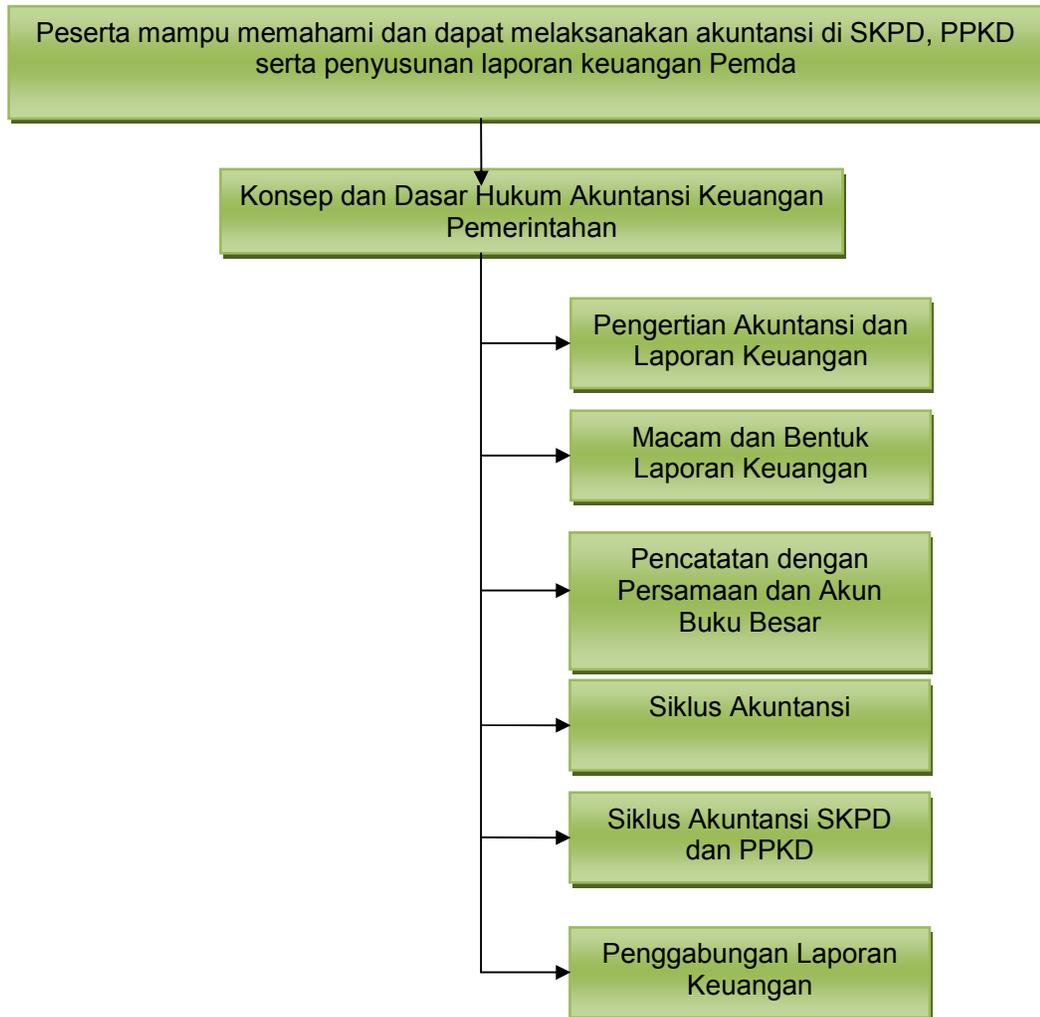
## DAFTAR ISI

Keterangan	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL</b>	v
<b>PETA KONSEP MODUL</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Prasyarat Kompetensi	1
D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar	2
E. Relevansi Modul	2
<b>BAB II AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN</b>	
A. Pengertian Akuntansi dan Pengguna Informasi Akuntansi	4
B. Tujuan Akuntansi Pemerintahan	6
C. Sejarah Akuntansi Pemerintahan	8
D. Landasan Hukum Akuntansi Pemerintahan dan Kewajiban Menyusun Laporan Pertanggungjawaban	9
E. Laporan Keuangan	11
F. Standar Akuntansi Pemerintahan	12
G. Sistem Akuntansi Pemerintahan	12
H. Sentralisasi dan Desentralisasi Akuntansi	14
J. Soal latihan	14
K. Rangkuman	15
L. Tes Formatif	15
M. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	20
<b>BAB III MACAM-MACAM DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
A. Perkembangan Dasar Hukum	21
B. Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Neraca	27
D. Laporan Arus Kas	33
E. Catatan atas Laporan Keuangan	36
F. Soal Latihan	37
G. Rangkuman	37
H. Test Formatif	38
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	42

Keterangan	Hal.
<b>BAB IV PERSAMAAN AKUNTANSI DAN REKENING BUKU BESAR</b>	
A. Persamaan Akuntansi	43
B. Rekening Buku Besar	45
C. Analisis transaksi dan pencatatan di rekening buku besar	50
D. Soal Latihan	57
E. Rangkuman	58
F. Test Formatif	59
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	64
<b>BAB V SIKLUS AKUNTANSI</b>	
A. Tahapan Siklus Akuntansi	65
B. Pencatatan Pada Jurnal	67
C. Posting Ke Buku Besar	69
D. Bukti Transaksi dan Waktu Pencatatannya	70
E. Menyesuaikan Saldo Rekening Buku Besar pada Akhir Tahun	71
F. Menyusun Neraca Saldo	77
G. Menyusun Laporan Keuangan	86
H. Menutup Buku Besar	93
I. Soal Latihan	95
J. Rangkuman	95
K. Test Formatif	96
L. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut	104
<b>BAB VI AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	
A. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemda	105
B. Hubungan antara SKPD dan SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	107
C. Akuntansi Belanja SKPD	108
D. Akuntansi pendapatan SKPD	113
E. Akuntansi Anggaran	116
F. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	116
G. Soal Latihan	121
H. Rangkuman	126
I. Test Formatif	128
J. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	134
<b>BAB VII AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	
A. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada SKPKD	135
B. Akuntansi Pendapatan PPKD	136
C. Akuntansi Belanja PPKD	138

	<b>Keterangan</b>	<b>Hal.</b>
<b>D.</b>	Akuntansi Pembiayaan PPKD	140
<b>E.</b>	Akuntansi Konsolidator	145
<b>F.</b>	Menyusun Laporan Keuangan	148
<b>G.</b>	Soal Latihan	152
<b>H.</b>	Rangkuman	154
<b>I.</b>	Test Formatif	154
<b>J.</b>	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	162
<b>BAB VIII PENYUSUNAN LAPORAN GABUNGAN</b>		
<b>A.</b>	Karakteristik Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan	163
<b>B.</b>	Data yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemda	163
<b>C.</b>	Menggabungkan Laporan Keuangan	169
<b>D.</b>	Soal Latihan	178
<b>E.</b>	Rangkuman	178
<b>F.</b>	Test Formatif	178
<b>G.</b>	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	183
	<b>TES SUMATIF</b>	184
	<b>KUNCI JAWABAN</b>	195
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	197

# PETA KONSEP MODUL AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH



## PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

### A. Petunjuk Cara Belajar

Agar peserta diklat dapat mengikuti mata pelajaran ini dengan baik dan mencapai hasil belajar yang optimal, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelajari modul sesuai dengan urutan pembahasan dan kaitkan dengan kegiatan sehari-hari di tempat anda bekerja.
2. Untuk mempercepat pemahaman atas jurnal yang ada di modul, anda dapat mencoba mengerjakan contoh-contoh soal dalam setiap kegiatan belajar, setelah itu bandingkan jawaban anda dengan contoh di modul.
3. Untuk memahami akuntansi keuangan daerah di SKPD dan PPKD serta proses penyusunan laporan keuangan pemda peserta dianjurkan untuk mengerjakan soal pada latihan di kegiatan belajar kelima secara tuntas
4. Lakukan diskusi dalam kelompok belajar untuk memperoleh pemahaman terhadap isi materi dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam modul ini;
5. Pelajari rangkuman dan selesaikan latihan-latihan yang dimuat pada tiap Kegiatan Belajar dalam modul ini. Jika anda tidak dapat mengerjakan, baca kembali modul dan dicoba kembali soal latihan soal tersebut.
6. Kerjakan tes formatif untuk tiap-tiap kegiatan belajar, kemudian lakukan umpan balik dengan memandangkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah disediakan dalam modul ini.

### B. Perlengkapan/referensi yang Disiapkan

Agar mencapai hasil yang maksimal, perlengkapan yang perlu disiapkan oleh peserta dan pengajar dalam mempelajari modul ini adalah:

No	Peraturan	Tentang
1.	UU No. 17/2003	Keuangan Negara
2.	UU No. 1/2004	Perbendaharaan Negara
3.	UU No. 15/2004	Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4.	UU No. 32/2004	Pemerintahan Daerah
5.	UU No. 33/2004	Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6.	UU No. 15/2006	Badan Pemeriksa Keuangan

No	Peraturan	Tentang
7.	PP No. 24/2005	Standar Akuntansi Pemerintah
8.	PP No. 58/2005	Pengelolaan Keuangan Daerah
9.	PP No. 8/2006	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan
10.	Permendagri 13/2006	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11.	Permendagri 59/2007	Perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sampai dengan tahun anggaran 2008, masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tercinta ini yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Bahkan Badan Pemeriksaan Keuangan sering tidak memberi pendapat atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan alasan di atas, penulis meyakini perlunya pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang di dalamnya termasuk akuntansi keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan intensif konsep dan prakatek akuntansi keuangan daerah.

### **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini berjudul Akuntansi Keuangan Daerah, merupakan bagian dari materi yang akan disampaikan pada **Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Daerah**. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Daerah merupakan diklat yang ditujukan untuk para pejabat pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Umum Daerah agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modul Akuntansi Keuangan Daerah ini akan membahas konsep akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang akan dituangkan dalam pokok bahasan dan selanjutnya dijabarkan dalam subpokok bahasan disertai dengan latihan dan tes formatif.

### **C. Prasyarat Kompetensi**

Modul ini ditujukan untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi di bidang pengurusan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, secara khusus mengenai akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit pengguna/kuasa pengguna

anggaran dan Bendahara Umum Daerah pada pemerintah daerah. Untuk dapat memahami secara baik isi dari modul ini, ada beberapa prasyarat kompetensi yang harus sudah dimiliki peserta karena modul ini merupakan materi lanjutan dari materi-materi yang harus disampaikan sebelumnya, yaitu bahwa peserta telah memiliki pemahaman terhadap materi Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.

#### **D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar**

Modul Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun dan disampaikan kepada peserta diklat dengan tujuan agar para peserta dapat memiliki **standar kompetensi** di bidang akuntansi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun **kompetensi dasar** dari modul ini adalah:

1. mampu menjelaskan konsep akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. mampu menjelaskan macam-macam dan bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.
3. mampu menggunakan persamaan akuntansi dan akun buku besar untuk mencatat transaksi keuangan pemerintah daerah.
4. mampu menjelaskan siklus akuntansi.
5. mampu melaksanakan akuntansi di SKPD.
6. mampu melaksanakan akuntansi di BUD.
7. mampu menyusun laporan keuangan Pemda (laporan keuangan gabungan).

#### **E. Relevansi Modul**

Maksud dari modul Akuntansi Keuangan Daerah ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pedoman kepada para peserta, bahwa untuk melakukan akuntansi harus didasarkan pada bukti dan prosedur yang tepat sesuai dengan kaidah akuntansi sehingga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan dari modul ini adalah agar peserta memiliki acuan yang jelas dalam mempelajari ketentuan akuntansi keuangan daerah melalui kegiatan belajar yang dipandu oleh modul ini. Anda juga dapat menggunakan modul ini

untuk mengukur hasil belajar melalui latihan soal yang dimuat dalam modul yang disertai dengan kunci jawaban serta umpan balik agar Anda dapat menilai diri Anda sendiri dalam penguasaan terhadap akuntansi di SKPD dan PPKD serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Modul ini merupakan bagian dari materi pengelolaan keuangan daerah sehingga merupakan rangkaian materi yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan materi pengelolaan keuangan daerah

**BAB II**  
**Kegiatan Belajar 1**  
**AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN**

**Tujuan Pembelajaran :**

Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu menjelaskan:

- a. Pengertian akuntansi dan fungsinya
- b. Pengguna informasi akuntansi
- c. Hubungan antara kegiatan pemerintah dan kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban
- d. Jenis-jenis Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas)
- e. Arti penting Standar Akuntansi Pemerintahan

**A. Pengertian Akuntansi dan Pengguna Informasi Akuntansi**

**1. Pengertian Akuntansi**

Banyak definisi akuntansi yang dirumuskan oleh para ahli akuntansi atau lembaga yang berwenang. Salah satu definisi akuntansi mengatakan bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa yang fungsinya menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih diantara beberapa alternatif tindakan.<sup>1</sup>

Dari definisi akuntansi di atas dapat diambil beberapa hal penting (1) akuntansi adalah kegiatan jasa yang menghasilkan informasi (2) informasi akuntansi bersifat keuangan mengenai entitas tertentu (3) informasi akuntansi tersebut berguna sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi.

**2. Pengguna Informasi Akuntansi**

Pengguna informasi akuntansi dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu (1) pengguna internal, dan (2) pengguna eksternal. Pengguna internal adalah pihak-pihak di dalam organisasi yang bersangkutan, seperti manajemen

---

<sup>1</sup> APB Statement No. 4 ( dalam Intermediate Accounting halaman 5 edisi 14 E, Skousen, Stice, Stice)

dan karyawan. Sedangkan pengguna eksternal adalah pihak-pihak di luar organisasi yang memiliki kepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan organisasi yang bersangkutan.

Laporan keuangan pemerintahan umumnya diperlukan oleh pihak eksternal, antara lain yaitu:

- Masyarakat
- Lembaga Legislatif
- Lembaga pemeriksa/pengawas
- Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- Pemerintah<sup>2</sup>

### 3. Cabang-cabang Ilmu Akuntansi

Ilmu akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa cara pengelompokan:

a. Pengelompokan akuntansi berdasarkan pengguna:

- **Akuntansi Keuangan**, diselenggarakan untuk menghasilkan informasi keuangan yang difokuskan pada berbagai pengguna eksternal. Karena pengguna eksternal tidak memiliki akses yang leluasa terhadap data keuangan, maka pengolahan data keuangan dan penyajian informasi keuangan untuk mereka perlu memiliki keseragaman. Untuk itu disusunlah standar akuntansi keuangan yang bersifat umum. Selanjutnya, agar laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapat diandalkan oleh pengguna ekstern, maka atas laporan keuangan tersebut perlu diaudit oleh auditor yang kompeten dan independen.
- **Akuntansi Manajemen**, diselenggarakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengguna internal dalam rangka melaksanakan aktivitasnya serta melaksanakan fungsi manajerial (*planning, organising, directing* dan *controlling*). Kebutuhan spesifik setiap organisasi dapat berbeda-beda. Oleh karenanya, akuntansi

---

<sup>2</sup> PSAP no 1 paragraf 2

manajemen tidak harus mengikuti standar tertentu yang bersifat umum. Aturan dan tehnik pencatatan serta pengolahan data pada akuntansi manajemen dapat sangat berbeda dengan akuntansi keuangan, karena sistem akuntansi manajemen dibuat untuk memnuhi kebutuhan spesifik bagi pihak internal organisasi yang bersangkutan. Sekalipun laporan keuangan manajerial tidak harus diaudit oleh auditor independen, namun manajemen perlu membangun sistem pengendalian yang baik agar informasi keuangan tersebut tidak menyesatkan bagi kepentingan pengambilan keputusan manajemen.

b. Pengelompokan akuntansi berdasarkan jenis organisasi:

- **Akuntansi Keuangan (Komersial)**, digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang kegiatannya berorientasi untuk menghasilkan laba.
- **Akuntansi Organisasi Nir Laba**, digunakan oleh organisasi yang kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba, seperti yayasan, rumah sakit, perguruan tinggi dan sebagainya.
- **Akuntansi Sektor Publik**, digunakan oleh organisasi publik, yaitu organisasi yang sebagian besar dana kegiatannya dihimpun dari kontribusi masyarakat dan yang beroperasi untuk kepentingan masyarakat luas, seperti lembaga sosial masyarakat (LSM), partai politik, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Sejauh ini, bahasan akuntansi sektor publik lebih banyak pada akuntansi sektor pemerintahan bahkan pada sejumlah literatur akuntansi sektor publik, makna sektor publik diidentikan dengan sektor pemerintahan.

## **B. Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Menurut *American Accounting Association*, tujuan akuntansi untuk setiap bentuk organisasi adalah untuk menyediakan informasi bagi:

- a. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk pengidentifikasian terhadap berbagai keputusan penting dan penentuan sasaran serta tujuan organisasi.

- b. Pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan baku secara efektif.
- c. Pengurusan dan pelaporan penyimpanan berbagai sumber daya.
- d. Pemberian kontribusi agar dapat tercapai efektivitas organisasi, baik untuk organisasi yang berorientasi laba maupun yang tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan serta permintaan seluruh masyarakat untuk tujuan pengendalian sosial fungsi-fungsi mereka.

Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 4 (SFAC No. 4) dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi-organisasi non-bisnis (*Not For Profit Organization*, disingkat: NFPO) adalah untuk dapat menyediakan informasi yang akan berguna (potensial) kepada para pemakai informasi di dalam:

- a. Pembuatan keputusan secara rasional mengenai alokasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.
- b. Penentuan jumlah jasa yang dapat disediakan oleh NFPO dan kemampuannya untuk melanjutkan penyediaan jasa-jasa tersebut.
- c. Penentuan mengenai bagaimana menilai tanggung jawab para manajer NFPO dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan prestasinya.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan akuntansi pemerintahan antara lain untuk:

- a. Menjaga aset Pemerintah Pusat/Daerah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum;
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;

- d. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat/Daerah secara keseluruhan;
- e. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

### **C. Sejarah Akuntansi Pemerintahan**

Pada saat Indonesia merdeka, Pemerintah hanya mempunyai perangkat sederhana untuk mengatur keuangan melalui pencatatan yang dilakukan pada buku kas yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dan beberapa buku pembantu yang lebih banyak fungsinya untuk pelaporan kepada pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi secara berjenjang. Tata cara seperti ini dikenal sebagai tata buku "kameral".

Sejak penyerahan kedaulatan oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia pada akhir tahun 1949 semua perangkat pemerintahan masih mengadopsi perangkat yang dibentuk oleh Belanda termasuk dalam sistem keuangan negara dan penyusunan anggaran keuangan. Bahkan sampai dengan tahun 2004, Indonesia masih menggunakan undang-undang perbendaharaan warisan jaman belanda yang dikenal dengan nama ICW ini (*Indische Comptabiliteitwet*) *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448.

ICW telah dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Bab XI Pasal 37 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003. Kemudian ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang diundangkan setahun kemudian tepatnya pada tanggal 14 Januari 2004 pada Bab IV Pasal 72 dijelaskan : "ICW dinyatakan tidak berlaku".

Mulai tahun anggaran 2004 Pemerintah (pusat) telah mulai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat akhir tahun (LKPP) dengan berpedoman pada dasar hukum, antara lain, yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. LKPP tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Kuangan (CaLK). Sedangkan pedoman resmi untuk

penyusunan laporan keuangan pemerintahan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), baru ditetapkan dengan PP No. 24 Tahun 2005 pada 13 Juni 2005.

Salah satu perubahan signifikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah adalah adanya komponen laporan keuangan yang disebut Neraca. Sebab, LRA selama ini sudah dapat dibuat dengan cara tata buku yang diselenggarakan oleh para bendahara pemerintahan, tanpa adanya sistem akuntansi yang terintegrasi. Adapun tujuan utama disusunnya Neraca adalah untuk mengetahui besarnya kekayaan negara serta utang. Utang negara tidak terlalu susah untuk mengetahuinya khususnya utang luar negeri karena pihak yang meminjamkan mempunyai informasi yang lengkap.

Neraca memerlukan sistem pencatatan yang lengkap khususnya mengenai transaksi masa lalu yang menyangkut aset dan kewajiban sebagai implikasi dari pelaksanaan anggaran pemerintah. Sedangkan laporan arus kas disusun menurut transaksi kas yang mirip dengan laporan realisasi anggaran ditambah transaksi yang menyangkut kas lainnya yang tidak masuk LRA, sehingga dapat menjelaskan saldo/posisi kas di neraca.

#### **D. Landasan Hukum Akuntansi Pemerintahan dan Kewajiban Menyusun Laporan Pertanggungjawaban**

Pemerintah menyelenggarakan sejumlah urusan pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (PP 38 tahun 2007 Pasal 1 ayat 5).

Agar urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dibutuhkan sumberdaya ekonomi seperti tanah, bangunan, uang dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah diberi mandat untuk menarik dana dari masyarakat antara lain, dalam bentuk pajak dan retribusi. Pemerintah juga dapat menggunakan hasil sumber daya alam yang dihasilkan dari wilayah republik ini.

Karena pemerintah telah diberi mandat oleh rakyat (melalui perwakilannya di DPR/DPD) untuk melakukan urusan pemerintahan, memungut pajak dan retribusi serta mengelola hasil sumber daya lainnya, **maka pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban antara lain dalam bentuk laporan keuangan**. Selanjutnya, sarana ataupun cara yang diyakini keandalannya untuk menghasilkan laporan keuangan itu adalah dengan menyelenggarakan sistem akuntansi. Kemudian, untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah tersebut, laporan keuangan diperiksa oleh lembaga tinggi Negara yang independen.

Berdasarkan Undang Undang No. 15 tahun 2006 pasal 6 ayat 1, Badan Pemeriksaan Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Peraturan perundangan yang mendasari Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, termasuk di dalamnya aspek akuntansi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintahan, antara lain sebagai berikut:

No.	Peraturan	Tentang
1.	UU No. 17/2003	Keuangan Negara
2.	UU No. 1/2004	Perbendaharaan Negara
3.	UU No. 15/2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4.	UU No. 32/2004	Pemerintahan Daerah
5.	UU No. 33/2004	Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6.	UU No. 15/2006	Badan Pemeriksa Keuangan
7.	PP No. 24/2005	Standar Akuntansi Pemerintah
8.	PP No. 58/2005	Pengelolaan Keuangan Daerah
9.	PP No. 8/2006	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan

## **E. Laporan Keuangan**

Di bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah membutuhkan sumberdaya ekonomi seperti uang, tanah, bangunan, peralatan serta aset lainnya. Sumber daya ekonomi tersebut dapat berasal dari pemungutan pajak dan pungutan lainnya. Sumber daya ekonomi tersebut juga dapat berasal dari kegiatan meminjam dari kreditor sehingga timbul hutang pemerintah yang nantinya harus dikembalikan kepada kreditor. Jika aset yang dimiliki pemerintah dikurangi dengan hutang pemerintah, hasilnya merupakan besarnya kekayaan bersih pemerintah. Dalam akuntansi pemerintahan Indonesia besarnya kekayaan bersih pemerintah ini lazim disebut dengan istilah ekuitas dana.

Kegiatan pemerintah mengakibatkan berkurangnya uang kas pemerintah. Berkurangnya uang kas pemerintah untuk kegiatan operasional pemerintah disebut Belanja. Sementara itu untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah antara lain memungut pajak dan retribusi. Bagi pemerintah, penerimaan uang dari berbagai pungutan tersebut merupakan contoh dari Pendapatan. Pemerintah juga dapat meminjam uang dari dan mengembalikan pinjaman tersebut ke kreditor. Kegiatan tersebut disebut kegiatan Pembiayaan.

Besarnya aset, hutang dan ekuitas dana pada saat tertentu dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah yang disebut dengan neraca. Sementara itu besarnya pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama satu periode dilaporkan dalam laporan keuangan yang disebut dengan Laporan Realisasi Anggaran. Disamping kedua laporan tersebut pemerintah juga melaporkan arus uang masuk ke dan arus uang keluar dari kas Negara/Daerah dalam laporan yang disebut Laporan Arus Kas.

### **a. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Informasi keuangan dalam neraca dikelompokkan kedalam (1) aset, (2) hutang dan (3) kekayaan bersih pemerintah (ekuitas dana).

### **b. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai anggaran dibandingkan dengan realisasinya. Informasi keuangan yang terkandung di dalamnya dikelompokkan menurut: (1) Pendapatan, (2) Belanja, (3) Penerimaan Pembiayaan dan (4) Pengeluaran Pembiayaan.

### **c. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi arus kas masuk ke dan arus kas keluar dari Kas Negara/Daerah. Informasi arus kas dikelompokkan kedalam aktivitas yang menjadi penyebabnya, yaitu: (1) Aktivitas Operasi, (2) Aktivitas Investasi Non Keuangan, (3) Aktivitas Pembiayaan, (4) Aktivitas Non Anggaran.

### **d. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

## **F. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan keuangan pemerintahan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, sebagaimana telah dibahas di atas disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini mengatur antara lain kapan aset, kewajiban, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran penjualan dicatat dalam akuntansi dan selanjutnya dilaporkan di dalam laporan keuangan; bagaimana penentuan nilai dari masing masing unsur laporan keuangan tersebut; bagaimana pengungkapannya agar pelaporan unsur-unsur laporan keuangan tersebut dapat diberi penjelasan secara memadai.

## **G. Sistem Akuntansi Pemerintahan**

Untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah harus membangun Sistem Akuntansi Pemerintahan. Di dalam PP No. 24 tahun 2005

Pasal 1 ayat 4 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual atau terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. PP 24 tahun 2005 Pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Akuntansi pemerintahan pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan di tingkat Pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah antara lain PP tentang SAP.

Dalam sistem akuntansi pemerintah antara lain akan diuraikan cara memproses data/bukti transaksi sampai dihasilkan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Untuk menyusun laporan keuangan tersebut, bukti transaksi tersebut diproses melalui proses akuntansi yang umumnya meliputi langkah-langkah berikut ini :

- a. Dokumen bisnis dianalisis. Analisis terhadap dokumen transaksi usaha akan memberikan dasar untuk melakukan pencatatan pertama dari setiap transaksi.
- b. Transaksi-transaksi dicatat. Berdasarkan dokumen bisnis yang telah dianalisis pada tahap pertama, transaksi usaha dicatat dalam jurnal secara khronologis.
- c. Transaksi diposting. Transaksi yang telah diklasifikasikan dalam jurnal diposting ke account yang tepat di buku besar dan buku tambahan.
- d. Suatu Neraca saldo atas rekening (akun) di buku besar disusun.
- e. Dibuat ayat jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar.
- f. Disusun laporan keuangan.
- g. Rekening yang bersifat sementara (*nominal/temporary accounts*) ditutup.
- h. Disusun Neraca saldo setelah penutupan buku besar (Skousen, Stice, Stice dalam bukunya *Intermediate Accounting* Edisi 14).

## **I. Sentralisasi dan Desentralisasi Akuntansi**

Tentu dapat dibayangkan bahwa urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah tidak mungkin dilaksanakan oleh satu unit organisasi. Sebagai contoh, di dalam UU 32 tahun 2004 pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah meliputi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah meliputi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang dapat berbentuk sekretariat (sekretariat daerah dan sekretariat DPRD), dinas, badan dan kantor.

Setiap SKPD merupakan pengguna anggaran yang kemudian melakukan transaksi dan mengelola aset yang cukup besar nilainya. Di lihat dari aspek penanggung jawab akuntansi daerah dan cakupannya terdapat dua kemungkinan sistem yang diterapkan, yaitu sistem yang sentralisasi dan sistem yang desentralisasi. Jika digunakan sistem sentralisasi, penanggungjawab akuntansi untuk seluruh transaksi keuangan diserahkan pada satu SKPD (biasanya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan memperlakukan transaksi yang terjadi sebagai transaksi di tingkat pemda. Namun demikian, kepala SKPD, sebagai pengguna anggaran, tetap bertanggung jawab atas laporan keuangan dari satkernya masing-masing. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, setiap SKPD menyelenggarakan akuntansi untuk mencatat transaksi yang terjadi di satkernya masing-masing hingga menghasilkan laporan keuangan untuk SKPD yang bersangkutan. Dalam hal ini satker selaku pengguna anggaran disebut entitas akuntansi. Selanjutnya, laporan keuangan dari seluruh SKPD disampaikan ke entitas pelaporan untuk digabungkan menjadi laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Satker yang bertindak sebagai entitas pelaporan umumnya adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (mungkin nama satker tersebut dapat berbeda diantara pemda yang satu dengan lainnya).

## **J. Soal Latihan**

1. Jelaskan pengertian akuntansi !
2. Jelaskan tujuan akuntansi pemerintah !
3. Sebutkan siapa saja pengguna laporan keuangan pemerintah !
4. Jelaskan kegunaan standar akuntansi !
5. Jelaskan perbedaan sentralisasi akuntansi dan desentralisasi akuntansi !

## **K. Rangkuman**

Akuntansi dapat dikatakan sebagai kegiatan jasa yang menghasilkan informasi yang bersifat keuangan. Informasi tersebut meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LRA menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban serta ekuitas dana pada saat tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk ke dan keluar dari Kas Negara/Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan tambahan atas ketiga komponen laporan keuangan yang disebutkan terdahulu sehingga ada pengungkapan informasi yang dianggap memadai.

Penyajian laporan keuangan ini diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk dapat menyajikan informasi seperti yang dikehendaki dalam standar akuntansi pemerintahan, pemerintah daerah harus menerapkan sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sedangkan sistem akuntansi pemerintah pusat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## **L. Tes Formatif**

1. Pernyataan berikut ini yang tidak menggambarkan pengertian akuntansi adalah :
  - a. Akuntansi adalah kegiatan jasa
  - b. Akuntansi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan
  - c. Informasi akuntansi digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi
  - d. Informasi akuntansi selalu bersifat kualitatif
  
2. Berikut ini adalah pengguna dari informasi akuntansi pemerintah, kecuali...
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - b. Pemegang saham

- c. Lembaga Pengawas
  - d. Lembaga Internasional
3. Berdasarkan Undang Undang No. 15 Tahun 2006, lembaga tinggi negara yang berkewajiban melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara adalah :
- a. Badan Pemeriksa Keuangan
  - b. Lembaga Pengawas
  - c. Itjen Departemen
  - d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Berikut ini merupakan tujuan akuntansi pemerintah, kecuali :
- a. Menjaga aset Pemerintah Pusat/Daerah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum
  - b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat mengenai aset seluruh perusahaan di suatu negara
  - c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat/Daerah secara keseluruhan
  - d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien
5. Undang-undang perbendaharaan warisan Belanda yang masih digunakan pada masa kemerdekaan adalah :
- a. ICW
  - b. IBW

- c. Undang Undang No. 17 tahun 2004
  - d. Undang Undang No. 1 tahun 2005
6. Neraca pemerintah daerah pada hakekatnya berisi informasi berikut ini, kecuali :
- a. Aset
  - b. Hutang
  - c. Ekuitas Dana
  - d. Penerimaan Pembiayaan
7. Berikut ini yang merupakan informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah :
- a. Aset
  - b. Hutang
  - c. Ekuitas Dana
  - d. Penerimaan Pembiayaan
8. Berikut ini yang merupakan informasi yang terdapat dalam Laporan Arus Kas :
- a. Aset
  - b. Hutang
  - c. Ekuitas Dana
  - d. Penerimaan Kas dari kegiatan Operasional
9. Informasi yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran relatif sama dengan informasi yang ada di Laporan Arus Kas. Sehubungan dengan itu, pernyataan berikut ini yang salah adalah :

	Informasi mengenai	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Arus Kas
a.	Perimaan Pendapatan	Disajikan	Disajikan
b.	Pengeluaran untuk Belanja	Disajikan	Disajikan
c.	Penerimaan pembiayaan	Disajikan	Disajikan
d.	Penerimaan non anggaran	Disajikan	Disajikan

10. Berikut ini yang merupakan kegunaan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah :

- a. Mengatur kapan aset, kewajiban, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran penjualan dicatat
- b. Mengatur cara melaksanakan APBN
- c. Mengatur cara mengelola kas di bendarara
- d. Mengatur cara mengelola barang milik negara

11. Pernyataan berikut ini yang menggambarkan Sistem Akuntansi Pemerintah menurut PP 24 tahun 2005 adalah :

- a. Pedoman yang disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Undang-undang Perbendaharaan
- c. Buku-buku yang membahas akuntansi pemerintahan
- d. Serangkaian prosedur manual atau terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah

12. Berikut ini adalah urutan pekerjaan akuntansi :

- a. Dibuat jurnal, membuat bukti transaksi dan selanjutnya menyusun laporan keuangan
- b. Bukti transaksi dianalisis, dijurnal, posting ke buku besar
- c. Bukti transaksi dianalisis, dibuat laporan keuangan, dibuat jurnal

- d. Membuat jurnal, posting ke buku besar serta menganalisis bukti transaksi

13. Berikut ini yang merupakan penerapan sentralisasi akuntansi adalah :

- a. Setiap SKPD di Kabupaten/Kota secara bersama-sama menyusun laporan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Daerah
- b. Penyelenggaraan akuntansi untuk seluruh SKPD dilakukan oleh satu unit yang ditunjuk dan memperlakukan seluruh transaksi sebagai transaksi pemda
- c. Setiap SKPD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi di SKPD yang bersangkutan dan menyampaikan laporan keuangan ke Kepala Daerah untuk digabungkan dengan laporan keuangan seluruh SKPD
- d. Transaksi masing-masing SKPD dibuat akuntansi masing-masing yang dilakukan oleh satu konsultan

14. Yang disebut kekayaan pemerintah adalah :

- a. Aset yang dikuasai oleh negara
- b. Aset minus hutang pemerintah
- c. Aset ditambah hutang
- d. Ekuitas dana ditambah dengan hutang

15. Berikut ini adalah pemahaman yang benar dari standar akuntansi pemerintahan (SAP)

- a. Standar akuntansi merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan oleh entitas pelaporan
- b. SAP merupakan serangkaian prosedur
- c. SAP pedoman pelaksanaan anggaran
- d. SAP disusun oleh Menteri keuangan atau Kepala Daerah

### M. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang sesuai kunci}}{\text{Jumlah semua soal}} \times 100\%$$

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

- 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

**BAB III**  
**Kegiatan Belajar 2**  
**MACAM-MACAM DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**Tujuan Pembelajaran:**

Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu menjelaskan:

- a. Jenis-jenis Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas)
- b. Kandungan informasi dari laporan keuangan

**A. Perkembangan Dasar Hukum**

Seiring dengan bergulirnya reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan ditetapkannya paket undang-undang di bidang Keuangan Negara (UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004), maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Berdasarkan dasar hukum tersebut, komponen dari Laporan Keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah ditetapkan dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada bab ini akan dibahas laporan keuangan yang harus disusun di tingkat pemerintah daerah. Sementara itu, laporan keuangan di tingkat pengguna anggaran (SKPD dan PPKD) akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Laporan keuangan di tingkat Pemda tersebut merupakan hasil penggabungan dari seluruh laporan keuangan di tingkat pengguna anggaran. Adapun proses atau teknik

penggabungannya tersebut akan dibahas pada kegiatan belajar ketujuh di bagian akhir modul ini.

## B. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-masing selama periode tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) LRA disusun dengan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan dicatat pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat pada saat kas dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD diakui pada saat belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan. Persyaratan lebih lanjut mengenai penyajian LRA berikut syarat pengungkapannya diatur di dalam PSAP No. 2

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran dapat diilustrasikan berikut ini.

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....**  
**LAPORAN REALISASI APBD**  
**Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 200X**

NO.	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	xxxx	xxxx	xx
8				
9	PENDAPATAN TRANSFER			
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx
14	Dana Alokasi khusus	xxx	xxx	xx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14)	xxxx	xxxx	xx
16				

NO.	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx
19	Dana Penyesuaian	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	xx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s.d 19)	xxxx	xxxx	xx
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (15 + 20)			
22				
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	xx
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (24 s.d 25)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>
27	Total Pendapatan Transfer (21 + 26)	xxxx	xxxx	xx
28				
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
30	Pendapatan Hihah	xxx	xxx	xx
31	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx
32	Pendapatan Lainnya	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	xx
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xx</u>
34				
35	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)	xxxxxx	xxxxxx	xx
36	BELANJA			
37	BELANJA OPERASI			
38	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx
39	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx
40	Bunga	xxx	xxx	xx
41	Subsidi	xxx	xxx	xx
42	Hibah	xxx	xxx	xx
43	Bantuan Sosial	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	xx
44	Jumlah Belanja Operasi (38 s.d 43)	xxxx	xxxx	xx
45				
46	BELANJA MODAL			
47	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx
48	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx
49	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx
52	Belanja Aset Lainnya	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	xx
53	Jumlah Belanja Modal (47 s.d 52)	xxxx	xxxx	xx
54				
55	BELANJA TAK TERDUGA			
56	Belanja Tak Tersangka	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	xx
57	Jumlah Belanja Tak Terduga (56 s.d 56)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	.xx,
58	Jumlah Belanja (44 + 53 + 57)	xxxx	xxxx	xx
59				
60	TRANSFER			
61	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA			
62	Bagi Hasil Pajak ke Desa	xxx	xxx	xx
63	Bagi Hasil Retribusi ke Desa	xxx	xxx	xx
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	xx
65	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa (62 s.d 64)	xxx	xxxx	xx

NO.	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
66	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58 + 65)			
67				
68	SURPLUS / DEFISIT (35 - 66)	xxx	xxx	xx
69				
70	PEMBIAYAAN			
71				
72	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
73	Penggunaan SiLP A	xxx	xxx	xx
74	Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	xxx	xxx	xx
75	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx
76	Penjualan Investasi Lainnya	xxx	xxx	xx
77	Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx
78	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx
79	Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya	xxx	xxx	xx
80	Pinjaman dari BUMN / BUMD	xxx	xxx	xx
81	Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan	xxx	xxx	xx
82	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx
83	Jumlah Penerimaan (73- 82)	xxxx	xxxx	xx
84				
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
86	Pemberian PinjamanJangka Panjang	xxx	xxx	xx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pemerintah daerah Otonom Lainnya	xxx	xxx	xx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman kpd BUMN / BUMD	xxx	xxx	xx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri lainnya	xxx	xxx	xx
92	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx	xx
93	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx
94	Jumlah Pengeluaran (86 s.d 93)	xxx	xxx	xx
95	PEMBIAYAAN NETTO (83 - 94)	xxxx	xxxx	xx
96				
97	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (68 - 95)		xxx	

Format LRA di atas telah membedakan antara pendapatan dan penerimaan pembiayaan; dan membedakan antara belanja dan pengeluaran pembiayaan. Pengertian dari unsur-unsur LRA tersebut masing-masing akan dibahas pada bagian berikutnya dengan mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 tentang LRA.

### **a). Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dalam konteks pendapatan daerah, dari format LRA di atas dapat dilihat bahwa pendapatan dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan dan transfer lainnya dari Pemerintah serta dari pendapatan lainnya yang sah.

Bagi Pemda penerimaan kas dari sumber pendapatan tersebut telah memenuhi definisi pendapatan, karena (1) ada penerimaan uang oleh Pemda (di rekening kas umum daerah); (2) penerimaan tersebut merupakan hak Pemda untuk menerimanya; (3) uang yang sudah diterima tersebut tidak akan dibayar kembali oleh Pemda.

Tentu tidak semua penerimaan di rekening kasda merupakan pendapatan Pemda. Sebagai contoh Pemda membayar gaji PNS sebesar Rp.100.000.000,00 dan oleh Pemda gaji tersebut dipotong iuran Askes sebesar Rp.1.000.000,00 yang nantinya uang potongan askes tersebut akan diserahkan ke PT Askes. Penerimaan uang ini bukan pendapatan karena uang ini bukan haknya Pemda. Transaksi pemotongan iuran askes tersebut bukan transaksi pendapatan melainkan transaksi non anggaran. Contoh lain, apabila Pemda menarik pinjaman sebesar Rp 200 milyar, Pemda menerima uang kas, namun penerimaan uang tersebut harus dibayar kembali oleh Pemda pada saat jatuh temponya, oleh karena itu penerimaan ini tidak menambah ekuitas dana, melainkan memunculkan kewajiban Pemda kepada kreditor. Transaksi penarikan pinjaman tersebut bukan transaksi pendapatan melainkan transaksi pembiayaan.

### **b). Belanja**

Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dilihat dari format LRA di atas dapat dilihat bahwa belanja

dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan rincian jenisnya, belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Semua jenis pengeluaran uang dari kasda untuk membayar jenis-jenis belanja sebagaimana diilustrasikan pada LRA di atas adalah pengeluaran yang tidak dapat diharapkan untuk diperoleh kembali pembayarannya dan pengeluaran tersebut mengurangi aset dan ekuitas dana. Akan tetapi, tentu tidak semua pengeluaran uang dari Kasda merupakan belanja. Sebagai contoh bila Pemda mengeluarkan uang dari kasda untuk tujuan investasi di BUMD, transaksi ini bukan belanja tetapi pengeluaran pembiayaan karena pengeluaran uang tersebut suatu saat dapat diperoleh kembali oleh Pemda manakala investasi tersebut dilepas/dijual.

### **c). Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan definisi pembiayaan tersebut, maka jelas bahwa penerimaan pembiayaan bukanlah pendapatan dan pengeluaran pembiayaan bukanlah belanja. Pembiayaan pada dasarnya ditujukan untuk menutup defisit dan/atau

mengalokasikan surplus. Defisit terjadi apabila realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan dan kondisi yang sebaliknya disebut surplus (belanja lebih kecil dari pendapatan).

### C. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban (utang) dan kekayaan bersih (ekuitas dana) pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Berdasarkan SAP, Neraca disusun dengan basis akrual, artinya pengakuan/pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas dana dilakukan pada saat hak/kewajiban muncul, meskipun kas-nya belum diterima/dibayarkan.

Format neraca dibangun dari suatu persamaan dasar akuntansi yaitu aset = kewajiban + ekuitas dana. Dengan demikian, total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana.

Berikut ini diberikan ilustrasi sederhana mengenai contoh format neraca pemerintah daerah.

**PEMDA ABC  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 200X  
(DALAM JUTA RUPIAH )**

Aset Lancar		Kewajiban	
Kas di Kas Daerah	25.000.000	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.000.000
Piutang Retribusi	20.000.000		
Bagian lancar piutang angsuran	10.000.000	<b>Ekuitas Dana</b>	
Bagian lancar piutang ganti rugi	12.000.000	<b>Ekuitas Dana Lancar:</b>	
Persediaan	5.000.000	Cadangan Piutang	42.000.000
Jumlah aset lancar	72.000.000	Cadangan Persediaan	5.000.000
Aset tetap		Silpa	20.000.000
Tanah	9.000.000.000		
Peralatan dan Mesin	3.200.000.000	Jumlah ekuitas dana lancar	67.000.000
Gedung dan Bangunan	4.000.000.000	<b>Ekuitas Dana</b>	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	900.000.000	<b>diinvestasikan :</b>	
Konstruksi dalam Pengerjaan (bangunan kantor)	300.000.000	Diinvestasikan pada AT	17.400.000.000
Jumlah aset tetap	17.400.000.000	Diinvestasikan pada aset lainnya	138.000.000
Aset Lainnya		Total Ekuitas	17.538.000.000
			17.605.000.000

Tagihan Penjualan angsuran	90.000.000		
Tuntutan ganti rugi	48.000.000		
Jumlah aset lainnya	138.000.000		
Total aset	17.610.000.000	Total kewajiban + Ekuitas Dana	17.610.000.000

Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari unsur-unsur neraca mengacu pada PSAP No. 1.

#### a). Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Di neraca, aset dirinci menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap serta asset lainnya. Aset lancar adalah asset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas (PSAP No. 1 paragraf 48). Direalisasikan berarti aset tersebut akan dapat diubah menjadi uang kas. Dengan demikian aset yang dapat dikelompokkan sebagai asset lancar akan meliputi :

- Kas di Kas Daerah
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Investasi Jangka Pendek
- Piutang Pajak
- Piutang Retribusi
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
- Piutang Lainnya
- Persediaan

Kas di Kasda adalah uang kas yang disimpan di Rekening Bendahara Umum Daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan operasional pemerintah. Di Satuan Kerja terdapat Bendahara Pengeluaran yang berwenang mengeluarkan uang kas daerah, mungkin juga terdapat Bendahara Penerimaan yang kewenangannya adalah menerima uang hasil pungutan pajak dan retribusi. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang kas yang berada di Bendahara Pengeluaran di masing-masing Satker. Sementara itu Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang kas milik pemerintah yang berasal dari penerimaan pendapatan yang nantinya akan disetorkan ke Kasda.

Investasi jangka pendek merupakan investasi pada surat berharga seperti deposito berjangka 3 bulan s.d. 12 bulan dan Sertifikat Bank Indonesia.

Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan bagian lancar pinjaman ke BUMN atau BUMD dikelompokkan sebagai aset lancar karena diharapkan akan diterima uangnya dalam waktu satu tahun sejak tanggal laporan.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang terdiri dari: (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi; (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Investasi jangka Panjang merupakan investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang dapat dirinci menjadi permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Contoh inventasi permanen adalah penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah seperti Perusahaan Daerah Air Minum.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP No. 7 paragraf 5). Aset tetap dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya (Paragraf 59 PSAP No. 1) .

Termasuk dalam aset lainnya antara lain adalah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan).

#### **b). Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sebagai contoh, Pemerintah mengkonsumsi arus listrik PLN dan rekening litriknya belum dibayar. Mengkonsumsi arus listrik merupakan peristiwa masa lalu, dan dengan telah menggunakan arus listrik tersebut telah timbul utang. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum (PSAP No. 9 Paragraf 5).

Di neraca, kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Menurut PSAP No. 9 Paragraf 11, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

### c). Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana pada neraca Pemda terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan.

### Hubungan Antara Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana

Jika diperhatikan bagian kiri neraca (aset) dan bagian kanan neraca (ekuitas dana dan kewajiban) akan terlihat ada hubungannya. Hubungan tersebut adalah:

**PEMDA ABC  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 200X  
(DALAM JUTA RUPIAH )**

Aset Lancar		Kewajiban	
Kas di Kas Daerah	25.000.000	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.000.000
Piutang Retribusi	20.000.000		
Bagian lancar piutang angsuran	10.000.000	<b>Ekuitas Dana</b>	
Bagian lancar piutang ganti rugi	12.000.000	<b>Ekuitas Dana Lancar:</b>	
Persediaan	5.000.000	Cadangan Piutang	42.000.000
Jumlah aset lancar	72.000.000	Cadangan Persediaan	5.000.000

Aset tetap		Silpa	20.000.000
Tanah	9.000.000.000		
Peralatan dan Mesin	3.200.000.000	Jumlah ekuitas dana lancar	67.000.000
Gedung dan Bangunan	4.000.000.000	<b>Ekuitas Dana diinvestasikan :</b>	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	900.000.000	Diinvestasikan pada AT	17.400.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan (bangunan kantor)	300.000.000	Diinvestasikan pada aset lainnya	138.000.000
Jumlah aset tetap	17.400.000.000		17.538.000.000
Aset Lainnya		Total Ekuitas	17.605.000.000
Tagihan Penjualan angsuran	90.000.000		
Tuntutan ganti rugi	48.000.000		
Jumlah aset lainnya	138.000.000		
Total aset	17.610.000.000	Total kewajiban + Ekuitas Dana	17.610.000.000

- a) Total aset (Rp.17.610.000.000,00) sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas dana (Rp. 17.610.000.000,00).
- b) Total aset lainnya (Rp.138.000.000,00) sama dengan Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam aset lainnya (Rp.138.000.000,00).
- c) Total aset tetap (Rp.17.400.000,00) sama dengan Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam aset tetap (Rp.17.400.000,00).
- d) Jumlah aset lancar (Rp.72.000.000,00) sama dengan Ekuitas Dana lancar (Rp.67.000.000,00) dikurangi utang jangka pendek (Rp.5.000.000,00).
- e) Rincian aset lancar berhubungan dengan rincian dari ekuitas dana lancar sebagai berikut :
  - 1) Kas di Kasda (Rp.25.000.000,00) dikurangi utang pada pihak ketiga (Rp.5.000.000,00) sama dengan SILPA (Rp.25.000.000,00). Utang pada pihak ketiga adalah potongan askes, taspen dan PPh/PPn yang belum disetor.
  - 2) Piutang lancar (Piutang retribusi + bagian lancar piutang angsuran + bagian lancar piutang ganti rugi) Rp.42.000.000,00 sama dengan cadangan piutang (Rp.42.000.000,00) di Ekuitas dana lancar.

- 3) Persediaan (Rp.5.000.000,00) sama dengan Cadangan persediaan (Rp.5.000.000,00).

#### D. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus hanya disusun oleh BUD untuk seluruh transaksi di tingkat Pemda. Laporan arus kas dapat dipandang sebagai laporan yang menjelaskan perubahan posisi kas di neraca, sehingga saldo akhir kas di neraca tentu harus sama dengan saldo akhir kas menurut laporan arus kas. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas.

Contoh format Laporan Arus Kas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

#### PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

#### LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 200X

No.	Uraian	20XI	20XO
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Investasi	XXX	XXX
6	Lain-lain Pendapatan Ash Daerah	XXX	XXX
7	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
9	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	XXX	XXX
12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi	XXX	XXX
13	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
14	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 15)</b>	XXX	XXX
17	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Belanja Pegawai	XXX	XXX
19	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX
20	Bunga	XXX	XXX
21	Subsidi	XXX	XXX
22	Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Hibah	XXX	XXX

No.	Uraian	20XI	20XO
24	Bagi Hasil Pajak ke Desa	XXX	XXX
25	Bagi Hasil Retribusi ke Desa	XXX	XXX
26	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	XXX	XXX
27	Belanja Tak Tersangka	XXX	XXX
28	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d 27)</b>	XXX	XXX
29	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-28)</b>	XXX	XXX
30	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
31	<b>Arus Masuk Kas</b>	XXX	XXX
32	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
33	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
38	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (32 sid 37)</b>	XXX	XXX
39	<b>Arus Keluar Kas</b>		
40	Belanja Tanah	XXX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
46	Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/ d 45)	XXX	XXX
47	Arus Kas Bersih dari Akt Inv Nonkeuangan (38 - 46)	XXX	XXX
48			
49	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
50	Arus Masuk Kas		
51	Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan	XXX	XXX
52	Penerimaan Penjualan Investasi Lainnya	XXX	XXX
53	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
54	Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	XXX	XXX
56	Penerimaan Pinjaman dari Perusahaan Negara/Daerah	XXX	XXX
57	Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan	XXX	XXX
58	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	XXX	XXX
59	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
60	Jumlah Arus Masuk Kas (51 sid 59)	XXX	XXX
61	Arus Keluar Kas		
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
63	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Lain	XXX	XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Perusahaan Negara/Daerah	XXX	XXX
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	XXX	XXX

No.	Uraian	20XI	20XO
67	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Jangka Panjang	XXX	XXX
69	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
70	Jumlah Arus Keluar Kas (62 s. d 69)	XXX	XXX
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (60 - 70)	XXX	XXX
72			
73	Arus Kas dari Aktivitas non anggaran :		
74	Arus Masuk Kas		
75	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Masuk Kas (75)	XXX	XXX
77	Arus Keluar Kas		
78	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Jumlah Arus Keluar Kas (78)	XXX	XXX
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (76-79)	XXX	XXX
81	Kenaikan/Penurunan Kas (29+47+71+80)	XXX	XXX
82	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
83	Saldo Akhir Kas di BUD	XXX	XXX
84	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
85	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
86	Saldo Akhir Kas (83+84+85)	XXX	XXX

Informasi arus kas masuk dan arus kas keluar tersebut dirinci berdasarkan kegiatan yang mengakibatkan adanya arus kas masuk dan arus kas keluar tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah terdiri dari: (1) Aktivitas Operasi; (2) Aktivitas Investasi Non Keuangan; (3) Aktivitas Pembiayaan; (4) Aktivitas Non Anggaran.

Aktivitas operasi pemerintah mengakibatkan terjadinya arus kas masuk karena pemerintah daerah telah menerima pendapatan seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dsb. Aktivitas Operasi Pemda juga mengakibatkan timbulnya arus kas keluar dari Kasda seperti untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan sebagainya.

Aktivitas investasi non keuangan adalah aktivitas pembelian aktiva tetap seperti tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, jaringan dan sebagainya. Pembelian ini mengakibatkan adanya arus kas keluar dan Kasda. Kadangkala aktiva tetap milik pemerintah dijual yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah.

Salah satu contoh aktivitas pembiayaan adalah aktivitas menarik pinjaman (meminjam) uang dari kreditor yang mengakibatkan terjadinya arus kas masuk ke

Kas Daerah. Contoh yang lain adalah mengembalikan pinjaman yang akan mengakibatkan arus kas keluar dari Kas Daerah.

Pemda ketika membayar gaji pegawai memotong iuran Askes, yang selanjutnya menyetorkan ke PT Askes. Oleh Pemda pada waktu memotong iuran dicatat sebagai penerimaan non anggaran dan pada waktu menyerahkan uang iuran tersebut ke PT Askes terjadi arus kas keluar. Kegiatan ini merupakan contoh kegiatan yang mengakibatkan timbulnya arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran. Penerimaan potongan iuran askes ini bukan pendapatan pemerintah, dan jika iuran tersebut disetorkan ke PT Askes, arus kas keluar tersebut bukan belanja pemerintah, oleh karena itu penerimaan kas dan pengeluaran kas atas iuran tersebut termasuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran. Contoh lain adalah potongan iuran pensiun dan tabungan perumahan.

#### **E. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan/atau pengungkapan yang memadai terhadap komponen laporan keuangan yang disajikan (LRA, Neraca dan LAK) sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh para pengguna laporan secara luas dan agar tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Persyaratan yang mengatur tentang penyusunan CaLK diatur di dalam PSAP No. 4 tentang CaLK.

Berdasarkan PSAP No. 4 tersebut, CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, PSAP tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

#### **F. Soal Latihan**

1. Jelaskan isi dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas !
2. Dalam neraca terdapat cadangan persediaan, cadangan piutang, Diinvestasikan dalam aset tetap, Diinvestasikan dalam dana cadangan. Sehubungan dengan itu jelaskan hubungan hal-hal tersebut dengan jenis-jenis aset tertentu !
3. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara informasi yang ada di Laporan Realisasi Anggaran dengan informasi yang ada di Laporan Arus Kas !
4. Jelaskan tujuan disajikannya Catatan Atas Laporan Keuangan !
5. Jelaskan hubungan antara laporan arus kas dengan neraca !

#### **G. Rangkuman**

Akuntansi Pemerintah menghasilkan laporan keuangan yang meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca serta Laporan Arus Kas. LRA menyajikan

informasi mengenai pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban serta ekuitas dana pada saat tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk ke dan keluar dari Kasda. Penyajian laporan ini diatur oleh standar akuntansi pemerintahan. Untuk dapat menyajikan informasi seperti yang dikehendaki dalam standar akuntansi pemerintahan, pemerintah daerah harus menerapkan sistem akuntansi pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

#### **H. Test Formatif**

1. Laporan yang harus disajikan oleh Pemda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 adalah :
  - a. Neraca
  - b. Perhitungan Anggaran
  - c. Laporan Ekuitas
  - d. Laporan Kas
  
2. Berikut ini merupakan informasi yang tersaji dalam Neraca, kecuali :
  - a. Aset (harta)
  - b. Hutang (kewajiban)
  - c. Pendapatan
  - d. Ekuitas Dana
  
3. Berikut ini adalah informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, kecuali :
  - a. Aset (harta)
  - b. Belanja
  - c. Pendapatan
  - d. Penerimaan pembiayaan
  
4. Laporan Arus Kas antara lain berisi informasi mengenai :
  - a. Aset (harta)
  - b. Belanja
  - c. Pendapatan

d. Penerimaan pembiayaan

Berikut ini diberikan informasi mengenai neraca per 31 Desember 2009 dari Pemda X yang belum lengkap.

Aset Lancar		Kewajiban	
Kas di Kas Daerah	25.000.000	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	<u>5.000.000</u>
Piutang Retribusi	10.000.000		
Bagian lancar piutang angsuran	20.000.000	<b>Ekuitas Dana</b>	
Bagian lancar piutang ganti rugi	12.000.000	<b>Ekuitas Dana Lancar:</b>	
Persediaan	5.000.000	Cadangan Piutang	?
Jumlah aset lancar	<u>72.000.000</u>	Cadangan Persediaan	?
Aset tetap		Silpa	?
Tanah	?		
Peralatan dan Mesin	3.200.000.000	Jumlah ekuitas dana lancar	<u>67.000.000</u>
Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.000.000.000	<b>Ekuitas Dana diinvestasikan:</b>	
Konstruksi dalam Pengerjaan (bangunan kantor)	900.000.000	Diinvestasikan pada AT	17.400.000.000
	300.000.000	Diinvestasikan pada aset lainnya	?
Jumlah aset tetap	<u>?</u>		<u>17.538.000.000</u>
Aset Lainnya		Total Ekuitas	17.605.000.000
Tagihan Penjualan angsuran	90.000.000		
Tuntutan ganti rugi	48.000.000		
Jumlah aset lainnya	<u>138.000.000</u>		
Total aset	<u>17.610.000.000</u>	Total kewajiban + Ekuitas Dana	<u>17.610.000.000</u>

5. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya Cadangan Piutang adalah :

- a. Rp.10.000.000
- b. Rp.20.000.000
- c. Rp.12.000.000
- d. Rp.42.000.000

6. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya Cadangan Persediaan adalah :

- a. Rp.10.000.000
- b. Rp.20.000.000

- c. Rp.12.000.000
  - d. Rp.5.000.000
7. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya SILPA adalah :
- a. Rp.25.000.000
  - b. Rp.20.000.000
  - c. Rp.15.000.000
  - d. Rp.5.000.000
8. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya nilai total aset tetap adalah :
- a. Rp.25.000.000.000
  - b. Rp.20.000.000.000
  - c. Rp.17.400.000.000
  - d. Rp.17.610.000.000
9. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya nilai tanah adalah :
- a. Rp 9.00.000.000
  - b. Rp.10.000.000.000
  - c. Rp.17.400.000.000
  - d. Rp.17.610.000.000
10. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya ekuitas dana diinvestasikan dalam aset lainya adalah :
- a. Rp.138.000.000
  - b. Rp.8.000.000
  - c. Rp.67.000.000
  - d. Rp.17.000.000
11. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target disajikan oleh Pemda di laporan berupa :

- a. Neraca
  - b. Laporan Realisasi Anggaran
  - c. Laporan Arus Kas
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
12. Penerimaan pendapatan retribusi daerah dilaporkan di laporan arus kas sebagai penerimaan kas yang berasal dari kegiatan :
- a. Operasional
  - b. Pembiayaan
  - c. Non Anggaran
  - d. Investasi Non Anggaran
13. Pembayaran hutang mengakibatkan timbulnya arus kas keluar dari kegiatan :
- a. Operasional
  - b. Pembiayaan
  - c. Non Anggaran
  - d. Investasi Non Anggaran
14. Suatu informasi yang ada di laporan arus kas tetapi tidak terdapat di laporan realisasi anggaran adalah :
- a. Penerimaan non anggaran
  - b. Penerimaan Pembiayaan
  - c. Pengeluaran pembiayaan
  - d. Penerimaan Bagi hasil
15. Berikut ini adalah informasi yang ada di laporan Realisasi Anggaran, kecuali :
- a. Penerimaan non anggaran
  - b. Penerimaan pajak daerah
  - c. Belanja Pegawai
  - d. Belanja Barang dan Jasa

## H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang sesuai kunci}}{\text{Jumlah semua soal}} \times 100\%$$

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

- 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

**BAB IV**  
**Kegiatan Belajar 3**  
**PERSAMAAN AKUNTANSI DAN REKENING BUKU BESAR**

**Tujuan Pembelajaran :**

Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu:

- a. menjelaskan persamaan akuntansi
- b. mempraktekkan analisis transaksi dengan menggunakan konsep persamaan akuntansi

**A. Persamaan Akuntansi, Analisis Pengaruh Transaksi ke Persamaan Akuntansi**

Pada awal tahun anggaran, Pemerintah dapat memiliki aset dan kewajiban/utang. Jika harta yang dimiliki pemerintah dikurangi dengan utang pemerintah, hasilnya merupakan besarnya kekayaan bersih pemerintah (ekuitas dana). Terdapat hubungan antara besarnya aset, kewajiban serta ekuitas dana. Jika aset, kewajiban dan ekuitas dana ini dituangkan dalam persamaan akuntansi maka akan diperoleh persamaan akuntansi sebagai berikut :

Aset	=	Kewajiban	+	Ekuitas Dana
------	---	-----------	---	--------------

Untuk memberikan ilustrasi sederhana, misalkan Pemda ABC pada tanggal 1 Januari 2009 memiliki aset Rp.300.000.000,00 dan memiliki kewajiban sebesar Rp.1.000.000.000,00, maka besarnya Ekuitas Dana adalah Rp.299.000.000.000,00. Aset, kewajiban dan ekuitas dana dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam jutaan)

Aset	=	Kewajiban	+	Ekuitas Dana
300.000	=	1.000	+	299.000

Jika pemda melakukan kegiatan, kegiatan pemda tersebut mengakibatkan keluarnya sumber daya (misalnya uang) dari Kas Daerah seperti untuk membayar gaji pegawai negeri, membeli barang dan jasa, dan sebagainya.

Pengeluaran ini tidak akan diterima kembali dan sesuai dengan kegiatan belajar sebelumnya pengeluaran yang tidak dapat diharapkan untuk dapat diterima kembali di masa yang akan datang disebut belanja. Pengeluaran untuk belanja seperti itu, di samping mengakibatkan berkurangnya uang kas milik daerah, juga mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. Misalkan dalam tahun anggaran telah terjadi pengeluaran uang dari kas Daerah untuk belanja barang pakai habis sebesar Rp.200.000.000,00 maka pengaruh dari transaksi ini adalah (1) aset daerah berkurang Rp.200.000.000,00 dan (2) Ekuitas dana berkurang, tapi pengurangan ekuitas dana ini akan dicatat sebagai belanja. Karena belanja bersifat mengurangi Ekuitas Dana, maka belanja ini dicatat di sisi kiri (sisi yang berbeda dengan sisi ekuitas dana). Dengan demikian pengaruh transaksi ini dapat kita catat dalam persamaan akuntansi sebagai berikut :

(dalam jutaan)

Aset	+	Belanja	=	Kewajiban	+	Ekuitas Dana
300.000	+	-	=	1.000	+	299.000
(200)		200		-		-
199.800	+	200	=	1.000	+	299.000

Pemda juga dapat menerima pendapatan, misalkan dalam tahun anggaran 2009 Pemda menerima pendapatan pajak daerah sebesar Rp.400.000.000,00. Pengaruh dari transaksi ini adalah (1) Kas di Kas daerah bertambah Rp.400.000.000,00 dan (2) Ekuitas dana (kekayaan) bertambah Rp.400.000.000,00. Penambahan kekayaan ini adalah pendapatan. Karena pendapatan bersifat menambah ekuitas dana, maka di persamaan akuntansi, Pendapatan diletakkan pada sisi kanan (sisi yang sama dengan letak Ekuitas Dana). Persamaan akuntansi akan tampak sebagai berikut:

(dalam jutaan)

Keterangan	Aset	+	Belanja	=	Kewajiban	+	Ekuitas Dana	Pendapatan
Saldo awal	300.000	+	-	=	1.000	+	299.000	-
Pengeluaran Belanja	(200)		200		-		-	-
	299.800	+	200	=	1.000	+	299.000	-
Pen Pendapatan								400
	300.200	+	200		1.000		299.000	400

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) umumnya tidak memuat kegiatan pembiayaan oleh karena itu persamaan akuntansi untuk SKPD hanya terbatas seperti tampak di atas. Namun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku bendahara umum daerah memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas pembiayaan, sehingga persamaan dasar akuntansinya bertambah dua unsur yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Persamaan akuntansi di SKPKD akan tampak sebagai berikut :

(dalam jutaan)

Keterangan	Aset	Belanja	Peng Pembiayaan	=	Kewajiban	Ekuitas Dana	Pendapatan	Pene Pembiayaan
Saldo awal	300.000	-	-	=	1.000	399.000	-	-
Pengeluaran Belanja Subsidi	(100)	100			-	-	-	
Saldo	299.900	100		=	1.000	299.000	-	
Penerimaan –DAU	500	-		=	-	-	500	
Saldo	300.400	100			1.000	299.000	500	
Menerima pinjaman Daerah	200							200
Saldo	300.600	100			1.000	299.000	500	200

Dalam tabel di atas, Pemda melakukan aktivitas pembiayaan dengan meminjam Rp200.000.000,00 Pengaruh transaksi ini adalah (1) Aset daerah bertambah Rp.200.000.000,00 dan (2) Timbul Penerimaan Pembiayaan Rp.200.000.000,00. Untuk menyusun laporan realisasi anggaran catatan di atas memang sudah cukup. Tapi catatan di atas belum cukup untuk menyusun neraca sebab dengan meminjam uang, kewajiban pemerintah bertambah dan pengaruh ini belum tercatat dalam persamaan akuntansi di atas. Sehingga Pemda perlu catatan ikutan (jurnal korolari). Pencatatan ikutan akan dibahas pada bagian berikutnya secara bertahap. Disamping itu pemda menerima DAU Rp.500.000.000 dan membayar subsidi sebesar Rp.100.000.000,00

## B. Rekening Buku Besar

Mencatat dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi seperti yang telah dijelaskan di atas tentu tidak praktis. Sebagai ganti dari persamaan akuntansi di atas unit akuntansi dapat membuat catatan yang disebut rekening (istilah lainnya: akun atau perkiraan). Unit akuntansi akan membuat banyak rekening yang disediakan untuk masing-masing jenis aset, kewajiban, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan dan ekuitas dana. Berikut ini akan dijelaskan secara berturut-turut kegunaan dan

bentuk rekening, cara menggunakannya serta saldo normal untuk masing-masing rekening.

1. Kegunaan dan bentuk rekening/akun

Akun besar besar adalah catatan tempat dikumpulkannya informasi mengenai setiap akun neraca yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana; dan setiap akun LRA yaitu pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dengan catatan berupa akun ini setiap saat dapat diketahui saldo dari setiap akun neraca maupun LRA.

Dilihat dari bentuknya terdapat beberapa bentuk (format) akun buku besar yaitu : (1) Bentuk skontro; (2) Bentuk huruf T; dan (3) Bentuk Saldo.

a. Bentuk Skontro

Jika kita lihat akun di bawah ini, empat kolom pertama dari kiri sama dengan empat kolom kedua. Empat kolom di sisi kiri disebut sisi debit dan empat kolom sisi kanan disebut sisi kredit. Sisi debit dan sisi kredit masing-masing terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi dan jumlah.

Nama Rekening :  
Debit

No Rekening :  
Kredit

Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah	Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah

b. Bentuk Huruf T

Bentuk huruf T merupakan penyederhanaan dari bentuk skontro di atas. Empat kolom debit diganti dengan satu kolom disisi kiri, sementara itu empat kolom kredit diganti dengan satu kolom di kanan.



c. Bentuk Saldo

Akun bentuk saldo terdiri dari kolom tanggal, keterangan, mutasi debit dan kredit, saldo debit dan kredit. Dengan akun bentuk ini setiap mencatat satu

transaksi langsung dihitung saldo akun yang bersangkutan. Misalkan saldo kas di Kasda awal tahun 2009 adalah Rp.40.000.000,00 dan pada tanggal 3 Januari menerima uang kas Rp. 5.000.000,00 dari pendapatan pajak daerah maka akun Kas di Kasda akan tampak sebagai berikut :

Kas di Kasda

Tgl.	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo	
			Debit	Kredit	Debit	Kredit
2009						
Jan 1	Saldo				40.000.000	
3	Pendapatan Pajak		5.000.000	-	45.000.000	-

Ketiga bentuk akun ini digunakan secara bergantian dalam modul ini.

## 2. Cara menggunakan akun buku besar

Jumlah akun yang harus digunakan tidak sama antara satu pemda dengan pemda lain. Jika kita ingat pada persamaan akuntansi, aset dicatat di sisi kiri, oleh karena itu **saldo kas di Kasda** dicatat pada perkiraan (akun) Kas di Kasda di **sisi kiri (debit)**. Selanjutnya, jika **aset bertambah** maka penambahan tersebut akan dicatat di **sisi kiri (debit)** dan sebaliknya jika **aset berkurang** maka pengurangan tersebut akan dicatat di **sisi kanan (kredit)**.

Kas di Kas daerah

Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah	Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah
			30,000				

Sementara itu, kewajiban (utang) di persamaan dasar akuntansi dicatat di sisi **kanan**, oleh **karena** itu **saldo Kewajiban/utang** dicatat di akun utang di sisi kanan (**kredit**). Selanjutnya jika **utang bertambah**, maka penambahan tersebut akan dicatat di **sisi kanan (kredit)** dan sebaliknya jika **utang berkurang**, maka pengurangan tersebut akan dicatat di **sisi debit (kiri)**.

### Hutang

Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah	Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah
							2,000

Seperti halnya hutang, kelompok akun Ekuitas Dana di persamaan akuntansi terletak di sisi kanan, oleh karena itu saldo akun Ekuitas Dana dicatat di sisi kiri (kredit). Penambahan dan pengurangan ekuitas dana akan dicatat di sisi yang sama seperti pada utang, yaitu **di sisi kiri (kredit) bila bertambah dan di sisi kanan (debit) bila berkurang**.

### Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah	Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah
							28,000

Pendapatan dicatat di sisi kanan (kredit) di akun "Pendapatan ..." di sisi kredit yaitu sama dengan letaknya saldo akun Ekuitas Dana. Dapat dikatakan pula bahwa pendapatan merupakan sumber dari aset, maka diletakkan disisi kanan. Sementara itu Belanja merupakan penggunaan dari aset, oleh karena itu Belanja dicatat di sisi debit. Penggunaan aset berikutnya adalah pengeluaran pembiayaan oleh karena itu Pengeluaran pembiayaan dicatat di akun yang bersangkutan sisi debit. Sementara itu Penerimaan Pembiayaan adalah sumber aset oleh karena itu dicatat di akun Penerimaan pembiayaan yang bersangkutan di sisi kredit atau sisi kanan.

Cara mengisi atau menggunakan akun buku besar tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No	Jenis Akun	Saldo normal	Penambahan	Pengurangan
1	Aset	Debit	Debit	Kredit
2	Kewajiban	Kredit	Kredit	Debit
3	Ekuitas Dana	Kredit	Kredit	Debit
4	Pendapatan	Kredit	Kredit	Debit
5	Penerimaan Pembiayaan	Kredit	Kredit	Debit
6	Belanja	Debit	Debit	Kredit
7	Pengeluaran Pembiayaan	Debit	Debit	Kredit

### 3. Kode rekening buku besar

Untuk mempermudah mengenali masing-masing akun yang disediakan, akun-akun harus disusun dengan sistematis. Untuk tujuan itu, akun buku besar disamping diberi nama juga diberi kode yang unik. Unik artinya kode antara satu rekening yang satu dengan yang lain berbeda. Hal ini penting baik dalam sistem akuntansi yang manual maupun yang terkomputerisasi. Banyak cara memberi nomor, salah satunya adalah sebagai berikut :

- 1) Aktiva diberi nomor yang diawali dengan angka 1
- 2) Kewajiban / Utang diberi nomor yang diawali dengan angka 2
- 3) Ekuitas Dana diberi nomor yang diawali dengan angka 3
- 4) Pendapatan diberi nomor yang diawali dengan angka 4
- 5) Belanja diberi nomor yang diawali dengan angka 5
- 6) Penerimaan Pembiayaan diberi nomor yang diawali angka 6
- 7) Pengeluaran Pembiayaan diberi nomor yang diawali angka 7

Karena jenis aktiva/harta, utang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan cukup banyak dan masing-masing jenis (kelompok) akun disediakan satu akun maka nomor akun umumnya terdiri dari beberapa digit. Misalkan daerah memiliki aset berupa kas di Kasda, memiliki piutang pajak kendaraan, perlengkapan kantor atau lainnya, gedung, dan peralatan, dst. maka masing-masing akun diberi nama dan nomor yang unik.

#### d. Jenis rekening menurut informasi yang ada di dalamnya

Jika dilihat dari sifat informasi yang ada di dalamnya, akun buku besar dapat dikelompokkan menjadi (1) akun riil/permanen; (2) akun nominal/sementara.

- 1). Akun riil (*real accounts*) merupakan akun yang saldo akhirnya pada suatu periode akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Dengan demikian saldo akun ini akan dibawa dari tahun ke tahun. Karena akun ini relatif permanen maka akun tersebut dikatakan akun riil (akun permanen) Yang termasuk kelompok akun ini adalah akun-akun yang masuk di dalam neraca, yaitu aset, kewajiban (hutang) dan ekuitas

dana (di neraca perusahaan adalah akun modal). Karena akun-akun tersebut disajikan di neraca, akun-akun tersebut biasa juga disebut sebagai akun neraca. Sebagai contoh akun Kas di Kasda, piutang angsuran, Persediaan per 31 Desember 2009 merupakan saldo awal tahun 2010.

- 2). Akun nominal (*nominal accounts*) merupakan akun yang menampung informasi/transaksi untuk satu periode tertentu yang akan dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Saldo akhir periode akun nominal tidak akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Akun nominal meliputi akun-akun pendapatan, beban, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi akun-akun tersebut hanya berlaku untuk satu periode yang bersangkutan saja. Oleh karena itu, akun-akun ini disebut akun sementara/nominal.

### **C. Analisis Transaksi dan Pencatatan di Rekening/Akun Buku Besar**

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa bukti transaksi dianalisis sebelum dicatat pada buku jurnal. Jika kita perhatikan transaksi yang ada dalam pemerintahan daerah, transaksi dapat dikelompokkan menjadi :

- a. penerimaan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan dan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan (restitusi).
- b. pembayaran belanja dan penerimaan kembali kelebihan pembayaran belanja.
- c. penerimaan atau pengeluaran uang dari aktivitas pembiayaan.
- d. penerimaan atau pengeluaran/penyetoran uang dari aktivitas non anggaran (aktivitas yang tidak dianggarkan di APBD), seperti penerimaan/penyetoran potongan askes, dan iuran pensiun dan tabungan perumahan.

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai analisis transaksi dan cara pencatatannya ke dalam akun buku besar. Pembahasan berikut ini hanya menekankan pada aspek pengaruh transaksi pada unsur dari laporan keuangan. Dalam hal realisasi belanja di bagian ini **belum membicarakan cara pembayaran dengan mekanisme LS dan UP/GU/TU.**

a. Pencatatan atas saldo awal aset, utang, dan ekuitas dana.

Untuk memahami cara pencatatan aset, utang dan ekuitas dana pada awal tahun atau awal diterapkannya akuntansi pemda ini, misalkan pada awal tahun 2009 Pemda ABC telah melakukan inventarisasi fisik atas aset daerah dengan hasil sebagai berikut :

- (1) Uang daerah semua telah disetorkan ke rekening Kas Daerah di Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp.100.000.000.000,00.
- (2) Dari uang di Kasda tersebut terdapat potongan askes yang harus disetorkan ke PT. Askes sebesar Rp.5.000.000,00
- (3) Pemda mempunyai tagihan atas penjualan angsuran Rp.100.000.000,00 dan tagihan tuntutan ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,00
- (4) Terdapat persediaan alat tulis kantor sebesar Rp.5.000.000,00
- (5) Tanah milik Pemda telah ditetapkan nilainya sebesar Rp.25.000.000.000,00
- (6) Bangunan milik Pemda telah ditetapkan sebesar Rp.12.000.000.000,00

Analisis pengaruh dari saldo awal akun-akun Neraca

Transaksi/kondisi	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Saldo awal uang, silpa dan utang PFK	Saldo Kas di kasda muncul sebesar Rp.100 milyar, maka akun kas di kasda didebit. Kas ini berasal dari Silpa tahun-tahun lalu dan dari potongan PFK.	Akun Kas di kasda didebit Rp.100 M Akun Silpa dikredit Rp.95 M Akun Utang PFK dikredit Rp.5 M
Saldo tagihan	Timbul piutang angsuran dan piutang ganti rugi serta timbul ekuitas dana lancar	Piutang angsuran didebit Rp.100 juta Piutang ganti rugi didebit Rp.50 juta Cadangan piutang dikredit Rp.150 juta
Saldo persediaan alat tulis kantor	Timbul aset berupa persediaan ATK Rp.5 juta dan ekuitas dana lancar (Cadangan Persediaan) Rp 5 juta.	Akun Persediaan didebit Rp.5.000.000 dan akun Ekuitas dana lancar (Cadangan Persediaan) Rp.5.000.000,00

Transaksi/kondisi	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Tanah pemda Rp.25 milyar	Timbul aset – tanah Rp.25 m dan timbul Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp.25 M	Akun “Tanah” didebit Rp.25 M dan Akun Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam aset tetap dikredit Rp.25 M
Bangunan milik pemda Rp.12 M	Timbul aset berupa bangunan seharga Rp12 M dan timbul Ekuitas Dana diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp.12 M	Akun Bangunan didebit Rp.12 M dan Akun ED Diinvestasikan dalam aset tetap dikredit Rp.12 M

- b. Pemda menerima pendapatan dari berbagai sumber. Pemda dapat menerima uang dari Pendapatan asli daerah seperti Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pemda juga dapat menerima uang dari pemerintahan pemerintah provinsi seperti dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Dari pemerintah pusat daerah kabupaten/kota antara lain dapat menerima uang dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil pajak atau dari sumber daya alam (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK), atau yang lazim disebut dana perimbangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dimasukkan dalam APBD.
- c. Disamping menerima dana desentralisasi di atas pemda juga dapat menerima dana dari pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga Negara teknis berupa dana dekonsentrasi dan/atau dana Tugas Pembantuan. Kedua jenis dana ini tidak dimasukkan ke APBD
- 1). Menerima pendapatan asli daerah
- Pemda Kabupaten ABC menerima a) setoran Pajak hotel sebesar Rp.100.000.000,00 dan b) pajak reklame sebesar Rp.150.000.000,00

Analisis pengaruh transaksi:

Transaksi a)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Menerima setoran Pajak Hotel Rp.100.000.000,00	1. Uang kas daerah bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 2. Pendapatan Pajak Hotel bertambah sebesar Rp.100.000.000,00	1. Akun Kas di Kasda didebit sebesar Rp.100.000.000,00 2. Akun Pendapatan Pajak Hotel dikredit sebesar Rp.100.000.000,00

Transaksi b)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Menerima setoran Pajak Reklame Rp.150.000.000,00	1. Uang kas daerah bertambah Rp.150.000.000,00 2. Pendapatan Pajak Reklame bertambah Rp.150.000.000,00	1. Akun Kas di Kasda didebit sebesar Rp.150.000.000,00 2. Akun Pendapatan Pajak Reklame dikredit Rp.150.000.000,00

2). Menerima dana perimbangan (Dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil SDA, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus)

Pemda Kabupaten ABC menerima a) dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp.900.000.000,00; b) dana bagi hasil sumber daya alam migas sebesar Rp.300.000.000,00, c) dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari propinsi; d) Rp.100.000.000,00; dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar Rp.3.000.000.000,00.

Analisis pengaruh transaksi:

Transaksi a)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Menerima transfer Bagi hasil Pajak Rp.900.000.000,00	1. Uang kas daerah bertambah Rp.900.000.000,00 2. Pendapatan Bagi Hasil PBB bertambah Rp.900.000.000,00	1. Akun Kas di Kasda didebit sebesar Rp.900.000.000,00 2. Akun Pendapatan Bagi Hasil PBB dikredit Rp.900.000.000,00
Transaksi b)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Menerima transfer Bagi hasil SDA Migas Rp.300.000.000,00	1. Uang kas daerah bertambah Rp.300.000.000,00 2. Pendapatan Bagi Hasil SDA Migas bertambah Rp.300.000.000,00	1. Akun Kas di Kasda didebit sebesar Rp.300.000.000,00 2. Akun Pendapatan Bagi Hasil SDA Migas dikredit Rp.300.000.000,00
Transaksi c)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Menerima transfer Bagi hasil Pajak Kendaraan bermotor	1. Uang kas daerah bertambah Rp.100.000.000,00 2. Pendapatan Bagi Hasil	1. Akun Kas di Kasda didebit sebesar Rp100.000.000,00 2. Akun Pendapatan

Rp.100.000.000,00	Pajak Kendaraan bermotor bertambah Rp.100.000.000,00	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dikredit Rp100.000.000,00
Transaksi d)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Menerima transfer Dana Alokasi Umum Rp.3.000.000.000,00	1. Uang kas daerah bertambah Rp.3.000.000.000,00 2. Pendapatan Dana Alokasi Umum bertambah Rp3.000.000.000,00	1. Akun Kas di Kasda didebit sebesar Rp.3.000.000.000,00 2. Akun Pendapatan Dana Alokasi Umum dikredit Rp.3.000.000.000,00

d. Membayar belanja-belanja.

1). Membayar belanja gaji PNS daerah dengan rincian sebagai berikut : (Dalam Ribuan)

- ✓ 5.1.1.01.01 Gaji Pokok : Rp 20.453.000,00
- ✓ 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga : Rp 4.246.000,00

2). Dari jumlah tersebut terdapat potongan untuk: (Dalam Ribuan)

- ✓ 7.1.1.01.02 Potongan PPh : Rp 200.000,00
- ✓ 7.1.1.01.03 Potongan Taperum : Rp 88.000,00
- ✓ 7.1.1.01.04 Potongan Askes : Rp 481.000,00

Analisis pengaruh transaksi:

Transaksi 1)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Membayar gaji Rp24.699.000	1. Terjadi belanja pegawai Rp24.699.000 yang terdiri dari : - Gaji pokok Rp. 20.453.000,00 - Tunjangan keluarga Rp. 4.246.000,00 2. Kas di kasda berkurang Rp. 24.699.000	1. Berbagai Akun kelompok belanja pegawai didebit sbb.: - Gaji Pokok didebit Rp 20.453.000,00 - Tunjangan Keluarga didebit Rp4.246.000,00 2. Akun Kas di Kasda dikredit sebesar bruto Rp. 24.699.000

Analisis pengaruh transaksi:

Transaksi 2)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
<i>Memotong uang PFK sebesar Rp669.000</i>	1. Kas di Kasda bertambah Rp669.000 2. Utang ke Pihak ketiga bertambah Rp 669.000	1. Akun Kas di Kasda di debit Rp669.000 2. Akun Utang PFK di kredit Rp669.000

2). Membayar belanja barang dan jasa sebagai berikut (asumsi: belum memperhitungkan faktor potongan pajak)

- a) Pemda membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp31.500.000.000 dan dibayar langsung dari Kasda
- b) Pemda membeli obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp12.000.000.000 dan dibayar langsung dari Kasda
- c) Daerah membeli bahan kimia untuk keperluan melaksanakan kegiatan fogging sebesar Rp45.000.000.000

Analisis pengaruh transaksi:

Transaksi a)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Membeli alat tulis kantor senilai Rp31.500.000.000.	1. Belanja alat tulis kantor tahun ini bertambah Rp31.500.000.000 2. Kas di Kasda Rp31.500.000.000	3. Akun Belanja alat tulis Kantor didebit sebesar Rp31.500.000.000 4. Akun Kas di Kasda dikredit Rp31.500.000.000
Transaksi b)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Membeli obat-obatan senilai Rp12.00.000.000.	1. Belanja obat-obatan tahun ini bertambah Rp12.00.000.000 2. Kas di Kasda berkurang Rp12,00.000.000	1. Akun Belanja obat-obatan didebit sebesar Rp12.00.000.000 2. Akun Kas di Kasda dikredit Rp12.00.000.000
Transaksi c)	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Membayar pembelian bahan	1. Belanja barang dan jasa tahun ini	1. Akun Belanja Barang dan jasa didebit

kimia Rp150.000.000.	bertambah Rp45.000.000.000 2. Kas di Kasda berkurang Rp45.000.000.000	sebesar Rp45.000.000.000 2. Akun Kas di Kasda dikredit Rp45.000.000.000
-------------------------	---	---

3). Membayar belanja modal (asumsi: belum memperhitungkan faktor potongan pajak)

Pemda membeli mobil ambulan (5.2.3.03.10) yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp300.000.000 dan dibayar dari Kasda.

Analisis pengaruh transaksi:

Transaksi	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Membayar pembelian mobil ambulan Rp300.000.000.	1. Belanja modal tahun ini bertambah Rp300.000.000 2. Kas di Kasda berkurang Rp300.000.000 3. Aset tetap bertambah Rp300.000.000 4. Ekuitas Dana Investasi bertambah Rp300.000.000	1. Akun Belanja Modal didebit sebesar Rp300.000.000 2. Akun Kas di Kasda dikredit Rp300.000.000 3. Akun Aset Tetap didebit Rp.300.000.000 4. Akun Ekuitas Dana diinvestasikan dlm aset tetap dikredit Rp300.000.000

e. Menerima uang dari aktivitas pembiayaan

1). Pemda menerima pinjaman dari pemerintah pusat

Pemda menerima pinjaman dana dari Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,00. Dana tsb langsung masuk rekening Kas daerah di Bank Pembangunan Daerah.

Analisis pengaruh transaksi:

Transaksi	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Menerima pinjaman dari BPD Rp1.000.000.000.	1. Kas di Kasda bertambah Rp.1.000.000.000 2. Terjadi penerimaan	1. Akun Kas di Kasda didebit sebesar Rp1.000.000.000 2. Akun Penerimaan

	pembiayaan Rp1.000.000.000 3. Timbul utang ke Sektor Perbankan bertambah Rp1.000.000.000 4. Ekuitas Dana Investasi berkurang Rp1.000.000.000	Pembiayaan dikredit Rp1.000.000.000 3. Akun Utang dikredit Rp.1.000.000.000 4. Dana yhd untuk bayar utang didebit Rp1.000.000.000
--	--	---

2). Pemda membayar utang ke Pemerintah Pusat

Pemda membayar pinjaman ke pemerintah pusat sebesar Rp.200.000.000,00 dengan mentransfer dana dari Rekening Kasda di Bank Pembangunan Daerah.

Analisis pengaruh transaksi:

Transaksi	Pengaruhnya thd unsur Lap keuangan	Akun yang didebit/dikredit
Mengembalikan pinjaman ke pemerintah pusat Rp200.000.000.	1. Terjadi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar Rp200.000.000 2. Kas di Kasda berkurang Rp200.000.000 3. Utang ke pemerintah pusat berkurang Rp200.000.000 4. Ekuitas Dana Investasi bertambah Rp200.000.000	1. Akun Pengeluaran Pembiayaan di debet sebesar Rp200.000.000 2. Kas di Kasda dikredit sebesar Rp200.000.000 3. Akun Utang didebit Rp200.000.000 4. Dana yhd untuk bayar utang dikredit Rp200.000.000

**D. Soal Latihan**

**Soal 1**

1. Jelaskan persamaan akuntansi !
2. Jelaskan saldo normal dari aset, kewajiban (hutang), ekuitas dana, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan !

3. Jelaskan perlakuan atas bertambah dan berkurangnya aset, kewajiban (hutang), ekuitas dana, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan !

### Soal 2

Berikut ini transaksi yang terjadi di Kabupaten XYZ

a. Pemda Kabupaten ABC menerima setoran pajak reklame sebesar Rp.100.000.000,00
b. Pemda Kabupaten ABC menerima dana bagi hasil PBB dari pemerintah pusat sebesar Rp.500.000.000,00
c. Pemda Kabupaten ABC menerima dana bagi hasil sumber daya alam migas dari pemerintah pusat Rp2.000.000.000,00
d. Pemda Kabupaten ABC menerima bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari propinsi Rp.100.000.000,00
e. Pemda membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp30.000.000,00 dan dibayar langsung dari Kasda
f. Pemda membeli obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp15.000.000,00 dan dibayar langsung dari Kasda
g. Pemda membayar biaya jasa servis mobil kantor (5.2.2.05.01) dengan mengeluarkan uang langsung dari Kasda sebesar Rp6.000.000,00
h. Daerah membeli bahan-bahan untuk keperluan melaksanakan kegiatan fogging sebesar Rp25.000.000
i. Pemda membeli mobil dinas (5.2.3.03.10) senilai Rp250.000.000.
j. Pemda menerima pinjaman dana dari pemerintah pusat sebesar Rp.3.000.000.000,00. Dana langsung masuk rekening Kas daerah di Bank Pembangunan Daerah.
k. Pemda membayar pinjaman ke pemerintah pusat sebesar Rp.500.000.000,00 dengan mentransfer dana dari Rekening Kasda di Bank Pembangunan Daerah.

Berdasarkan transaksi di atas Anda diminta untuk :

- Menganalisis transaksi di atas bagaimana pengaruh transaksi terhadap aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan
- Mencatat pengaruh transaksi tersebut pada akun yang sesuai

### E. Rangkuman

Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah dapat dituangkan dalam persamaan akuntansi yang berbunyi **Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana**. Dalam tahun berjalan jika sudah terjadi transaksi keuangan, persamaan akuntansi tersebut menjadi **Aset + Belanja = Kewajiban + Pendapatan + Ekuitas Dana**. Bagi SKPKD karena menganggarkan kegiatan

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran anggaran maka persamaan akuntansinya akan menjadi **Aset + Belanja + Pengeluaran Pembiayaan = Kewajiban + Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan + Ekuitas Dana.**

Transaksi keuangan yang terjadi akan berpengaruh pada persamaan akuntansi. Untuk membuat catatan yang sistematis, maka entitas akuntansi akan membuat catatan untuk setiap jenis aset, kewajiban, belanja, pendapatan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan serta ekuitas dana. Catatan dengan bentuk tertentu tersebut disebut rekening buku besar.

Transaksi keuangan mungkin berpengaruh pada aset, kewajiban, belanja, pendapatan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan serta ekuitas dana. Pengaruh dari transaksi tersebut dicatat dalam rekening buku besar yang sesuai.

#### **F. Test Formatif**

**Pilihlah jawaban yang paling tepat !**

1. Pemda X pada tanggal 1 Januari 2009 memiliki aset Rp.200.000.000.000,00 dan kewajiban Rp.1.000.000.000,00. Jika tidak ada data lain maka besarnya ekuitas dana adalah :
  - a. Rp.200.000.000.000,00
  - b. Rp.1.000.000.000,00
  - c. Rp.201.000.000.000,00
  - d. Rp.199.000.000.000,00
  
2. Akun buku besar berikut ini akan bersaldo normal kredit, kecuali
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Pendapatan Pajak Hotel
  - c. Pendapatan Pajak Reklame
  - d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya
  
3. Akun buku besar berikut ini akan bersaldo normal debit, kecuali
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Kas di Kasda
  - c. Pendapatan Pajak Reklame
  - d. Kas di Bendahara Pengeluaran

4. Berikut ini adalah pernyataan benar, kecuali :
- a. Akun “Kas di Kasda akan” bersaldo debit, jika uang kas di Kasda bertambah penambahan tersebut dicatat di sisi debit akun tersebut, jika ada pengurangan uang di kasda pengurangan tersebut dicatat di sisi kredit akun Kas di Kasda.
  - b. Akun “Kas Bendahara Penerimaan” bersaldo debit, jika uang kas di Bendahara Penerimaan bertambah penambahan tersebut dicatat di sisi debit akun tersebut, jika ada pengurangan uang di Bendahara Penerimaan pengurangan tersebut dicatat di sisi kredit akun Kas Bendahara Penerimaan.
  - c. Akun Tanah bersaldo normal debit, jika ada penambahan tanah yang dimiliki Pemda bertambah maka penambahan tersebut dicatat di sisi debit akun “Tanah” sebaliknya jika terjadi pengurangan atas tanah yang dimiliki oleh Pemda, pengurangan tersebut dicatat di sisi kredit akun “Tanah”.
  - d. Jika Satu SKPD membayar belanja Pegawai, maka pengeluaran tersebut akan dicatat di akun Belanja Pegawai di sisi kredit.
5. Berikut ini adalah pernyataan benar adalah :
- a. Akun Ekuitas Dana bersaldo normal kredit, jika ekuitas dana bertambah maka penambahan tersebut dicatat di sisi kredit, sebaliknya jika terjadi pengurangan ekuitas dana, pengurangan tersebut dicatat di sisi debit
  - b. Akun Ekuitas Dana bersaldo normal kredit, jika ekuitas dana bertambah maka penambahan tersebut dicatat di sisi debit, sebaliknya jika terjadi pengurangan ekuitas dana, pengurangan tersebut dicatat di sisi kredit
  - c. Akun Ekuitas Dana bersaldo normal kredit, jika ekuitas dana bertambah maka penambahan tersebut dicatat di sisi debit, sebaliknya jika terjadi pengurangan ekuitas dana, pengurangan tersebut dicatat di sisi kredit
  - d. Akun “Pendapatan Pajak Hotel “ bersaldo normal debit.

6. Berikut ini yang termasuk akun riil adalah:
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Kas di Kasda
  - c. Pendapatan Pajak reklame
  - d. Pendapatan Pajak Hotel
  
7. Berikut ini yang termasuk akun nominal adalah
  - a. Mesin dan Peralatan
  - b. Kas di Kasda
  - c. Pendapatan Pajak reklame
  - d. Piutang Angsuran
  
8. Pemda Kabupaten X ( Kasda) menerima setoran pajak reklame sebesar Rp.150.000.000,00. Pengaruh dari transaksi ini adalah :
  - a. Uang Kas di Kasda bertambah Rp.150.000.000,00 dan timbul pendapatan pajak reklame Rp.150.000.000,00.
  - b. Uang Kas di Kasda bertambah Rp.150.000.000,00 dan pendapatan pajak reklame berkurang Rp.150.000.000,00
  - c. Uang Kas di Kasda berkurang Rp.150.000.000,00 dan pendapatan pajak reklame berkurang Rp.150.000.000,00.
  - d. Uang Kas di Kasda berkurang Rp.150.000.000,00 dan pendapatan pajak reklame bertambah Rp.150.000.000,00
  
9. Pemda Kabupaten X menerima setoran Pajak hotel sebesar Rp.50.000.000,00 Pengaruh dari transaksi ini adalah :
  - a. Uang Kas di Kasda bertambah Rp.150.000.000,00 dan timbul pendapatan pajak hotel Rp.50.000.000,00.
  - b. Uang Kas di Kasda bertambah Rp.150.000.000,00 dan pendapatan pajak hotel berkurang Rp.50.000.000,00
  - c. Uang Kas di Kasda berkurang Rp.150.000.000,00 dan pendapatan pajak hotel berkurang Rp.50.000.000,00.
  - d. Uang Kas di Kasda berkurang Rp.150.000.000,00 dan pendapatan pajak hotel bertambah Rp.50.000.000,00

10. Pemda Kabupaten X menerima dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp.2.000.000.000,00;
  - a. Uang di Kasda bertambah Rp.2.000.000.000,00 dan timbul hutang ke pemerintah pusat Rp.2.000.000.000,00
  - b. Uang di Kasda bertambah Rp.2.000.000.000,00 dan timbul pendapatan Rp.2.000.000.000,00
  - c. Uang di Kasda bertambah Rp.2.000.000.000,00 dan hutang ke pemerintah pusat berkurang Rp.2.000.000.000,00
  - d. Uang di Kasda berkurang Rp.2.000.000.000,00 dan pendapatan bertambah Rp.2.000.000.000,00.
  
11. Pemda Kabupaten X menerima dana bagi hasil sumber daya alam migas sebesar Rp.4.000.000.000,00,
  - a. Uang di Kasda bertambah Rp.4.000.000.000,00 dan timbul hutang ke pemerintah pusat Rp.4.000.000.000,00
  - b. Uang di Kasda bertambah Rp.4.000.000.000,00 dan timbul pendapatan Rp.4.000.000.000,00
  - c. Uang di Kasda bertambah Rp.4.000.000.000,00 dan hutang ke pemerintah pusat berkurang Rp.4.000.000.000,00
  - d. Uang di Kasda berkurang Rp.4.000.000.000,00 dan pendapatan bertambah Rp.4.000.000.000,00.
  
12. Pemda Kabupaten X menerima dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari propinsi Rp.300.000.000,00
  - a. Uang di Kasda bertambah Rp.300.000.000,00 dan timbul hutang ke pemerintah propinsi Rp.300.000.000,00
  - b. Uang di Kasda bertambah Rp.300.000.000,00 dan timbul pendapatan Rp.300.000.000,00
  - c. Uang di Kasda bertambah Rp.300.000.000,00 dan hutang ke pemerintahpropinsi berkurang Rp.300.000.000,00
  - d. Uang di Kasda berkurang Rp.300.000.000,00 dan pendapatan bertambah Rp.300.000.000,00.

13. Pemda Kabupaten X menerima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar Rp.3.000.000.000,00.
- a. Uang di Kasda bertambah Rp.3.000.000.000,00 dan timbul hutang ke pemerintah pusat Rp.3.000.000.000,00
  - b. Uang di Kasda bertambah Rp.3.000.000.000,00 dan hutang ke pemerintah pusat berkurang Rp.3.000.000.000,00
  - c. Uang di Kasda berkurang Rp.3.000.000.000,00 dan pendapatan bertambah Rp.3.000.000.000,00.
  - d. Uang di Kasda bertambah Rp.3.000.000.000,00 dan timbul pendapatan Rp.3.000.000.000,00
14. Pemda X membayar gaji PNS Rp17.328.540.000 langsung dari Kas daerah
- a. Jumlah belanja gaji bertambah Rp.17.328.540.000,00 dan kas di Kasda bertambah Rp.17.328.540.000,00
  - b. Jumlah belanja gaji bertambah Rp.17.328.540.000,00 dan kas di Kasda berkurang Rp.17.328.540.000,00
  - c. Jumlah belanja gaji berkurang Rp.17.328.540.000,00 dan kas di Kasda berkurang Rp.17.328.540.000,00
  - d. Jumlah belanja gaji berkurang Rp.17.328.540.000,00 dan kas di Kasda bertambah Rp.17.328.540.000,00
15. Pemda (Kasda) memotong iuran Askes sebesar Rp1.500.755.000 dan uangnya dimasukkan ke Kasda yang nantinya akan disetorkan ke PT Askes
- a. Kas di Kasda bertambah Rp.1.500.755.000 dan timbul hutang ke PT Askes sebesar Rp.1.500.755.000.
  - b. Kas di Kasda berkurang Rp.1.500.755.000 dan timbul hutang ke PT Askes sebesar Rp.1.500.755.000.
  - c. Kas di Kasda bertambah Rp.1.500.755.000 dan timbul hutang ke Kas Negara sebesar Rp.1.500.755.000
  - d. Kas di Kasda berkurang Rp.1.500.755.000 dan hutang ke PT Askes berkurang sebesar Rp.1.500.755.000.

### G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang sesuai kunci}}{\text{Jumlah semua soal}} \times 100\%$$

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

- 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

**BAB V**  
**Kegiatan Belajar 4**  
**SIKLUS AKUNTANSI**

**Tujuan Pembelajaran :**

Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan Siklus Akuntansi
- b. Mempraktekkan tahap-tahap pembukuan yang ada dalam siklus akuntansi.

**A. Tahapan Siklus Akuntansi**

Laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses akuntansi seringkali disebut juga sebagai siklus akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung dari proses akuntansi adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Sedangkan Laporan Arus Kas (LAK) dihasilkan dari analisis hubungan kedua laporan tersebut yang dihasilkan lebih dulu (LRA dan Neraca). Demikian juga dengan Catatan atas Laporan Keuangan, tidak dihasilkan langsung dari proses akuntansi melainkan dengan pengumpulan data-data yang menjelaskan lebih detil dari ketiga komponen laporan keuangan yang disajikan (LRA, Neraca dan LAK).

Tahap-tahap dalam siklus akuntansi pada garis besarnya dapat dijelaskan sbb. :

- a. Menganalisis transaksi keuangan (setelah transaksi dikumpulkan) yang telah dicatat dalam bukti transaksi seperti SP2D, SPJ Belanja dan bukti-bukti pembayarannya, bukti Setoran Kas, bukti transfer dan sebagainya. Dari analisis ini dapat diketahui pengaruhnya terhadap unsur laporan keuangan (aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, serta pengeluaran pembiayaan), sehingga dapat diketahui akun-akun mana yang harus di debit dan di kredit;
- b. Bukti transaksi tersebut dicatat dalam buku jurnal ;

- c. Transaksi yang telah dicatat di jurnal kemudian diposting (dimasukkan) ke Buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun - akun seperti yang telah dijelaskan pada kegiatan belajar ketiga;
- d. Membuat ayat jurnal penyesuaian untuk akun-akun tertentu yang memerlukan penyesuaian, misalnya untuk menyesuaikan saldo akhir persediaan, mengakui utang-piutang yang belum dicatat selama periode berjalan, mengakui penyusutan aset tetap, dan sebagainya. Ayat jurnal penyesuaian ini kemudian diposting ke buku besar;
- e. Pada setiap akhir periode, yaitu pada waktu akan disusun laporan keuangan (biasanya akhir tahun anggaran), dibuat rekapitulasi saldo akhir dari akun-akun buku besar ke dalam suatu daftar yang disebut Neraca Saldo. Penyusunan neraca saldo ini di samping untuk pengikhtisaran akun-akun juga berguna untuk mengecek keseimbangan antara total saldo di sebelah debit dengan saldo di sebelah kredit. Apabila seimbang maka tahap berikutnya dapat dilanjutkan;
- f. Biasanya dibuat suatu kertas kerja untuk memadukan antara neraca saldo sebelum penyesuaian, ayat penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan kemudian di sebelah kanannya dibuat kolom-kolom tambahan untuk LRA dan Neraca. Kertas kerja tersebut biasa disebut Neraca Lajur (worksheet). Pembuatan neraca lajur ini memang sifatnya opsional (boleh dibuat boleh juga tidak), namun dalam sistem akuntansi yang manual neraca lajur ini sangat membantu untuk pengikhtisaran dan penyesuaian akun-akun buku besar sehingga memudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan;
- g. Berdasarkan neraca lajur yang sudah dibuat (butir f) kemudian disusunlah laporan keuangan dengan format seperti yang dicontohkan di dalam SAP;
- h. Membuat ayat jurnal penutup untuk menutup saldo akun-akun buku besar yang sifatnya sementara (*temporary accounts*), yaitu akun-akun yang akan dilaporkan di dalam LRA, meliputi akun anggaran (bila ada), akun pendapatan, akun belanja, dan akun pembiayaan. Ayat jurnal penutup ini kemudian diposting ke buku besar untuk menutup buku.

- i. Membuat Neraca saldo setelah tutup buku. Karena akun pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan telah ditutup maka neraca saldo ini hanya akan berisi akun-akun neraca yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca inilah yang akan dibawa menjadi Neraca Awal tahun berikutnya.

Pada bagian berikut ini akan diberikan penjelasan dan ilustrasi lebih lanjut dari sebagian siklus akuntansi.

**B. Pencatatan pada Jurnal**

Untuk mencatat transaksi yang terjadi, Pemda dapat menggunakan satu jurnal yang lazim disebut Jurnal Umum seperti berikut ini :

**JURNAL UMUM**

Halaman :

Tanggal	Rekening (Akun)	Ref	Debet	Kredit

Cara mencatat transaksi ke buku jurnal:

- a. Pertama kali setiap halaman jurnal diberi nomor halaman
- b. Kolom tanggal (paling kiri) disediakan untuk mencatat tanggal transaksi. Di kolom ini pada baris paling atas ditulis tahun, kemudian diikuti dengan bulan serta tanggal transaksi. Jika ada transaksi berikutnya dalam bulan yang sama, yang ditulis hanya tanggalnya saja.
- c. Kolom berikutnya adalah nama Rekening (akun). Pada kolom ini ditulis **nama akun** yang akan didebit.
- d. Kolom debit diisi jumlah yang akan didebitkan pada akun tersebut. Ayat ini disebut ayat debit.
- e. Pada baris berikutnya di kolom Rekening (akun) ditulis **nama akun** yang akan dikredit dan pada baris yang sama namun pada kolom kredit diisi jumlah yang akan dicatat pada Rekening tersebut.

### Contoh 1

Sebagai contoh misalkan Kabupaten ABC pada tanggal 29 Januari 2009 menerima transfer dari pemerintah pusat yaitu transfer dana alokasi umum sebesar Rp19.000.000.000. Pengaruh dari transaksi ini ada dua yaitu :

- (1) Aset Kabupaten ABC berupa **uang kas** bertambah dan penambahan harta ini akan dicatat di Rekening "**Kas di Kasda**", nama akun ini dan jumlah debet dicatat terlebih dahulu di buku jurnal
- (2) Pendapatan transfer bertambah dan bertambahnya pendapatan ini akan dicatat pada akun Pendapatan Transfer- Dana Alokasi Umum, nama akun yang akan dikredit dan jumlah pengkreditan dicatat terlebih dahulu di buku jurnal Pencatatan dalam buku jurnal adalah sebagai berikut :

#### JURNAL UMUM

Halaman : 1

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
2000				
Jan 2	Kas di Kasda		19.000.000.000	-
	Pendapatan Transfer- DAU		-	19.000.000.000

Dari contoh di atas terlihat bahwa untuk dapat mencatat di buku jurnal harus diketahui terlebih dahulu nama Rekening/akun yang akan didebit dan nama Rekening/akun yang akan dikredit sebagai akibat dari adanya transaksi tersebut. Untuk mengetahui akun yang akan didebit dan dikredit, setiap transaksi harus dianalisis pengaruhnya terhadap aset, utang, ekuitas dana, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan serta penerimaan atau pengeluaran non anggaran.

### Contoh 2

SKPKD melakukan pembayaran belanja bantuan ke parpol. Transaksi ini terekam dalam SP2D sebesar Rp.30.000.000,00. Berdasarkan transaksi tersebut dilakukan pencatatan sebagai berikut :

#### JURNAL

Halaman : 1

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debet	Kredit
2000				
Jan 2	Kas di Kasda		19.000.000.000	-
	Pendapatan Transfer		-	19.000.000.000

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debet	Kredit
30	Belanja Bantuan ke Papol Kas di Kasda		30.000.000 -	- 30.000.000

Pembayaran bantuan ke parpol ini merupakan bagian dari belanja, oleh karena itu dicatat dengan mendebet akun Belanja Bantuan ke Papol. Pembayaran ini juga berakibat pada berkurangnya uang pemerintahan Kabupaten ABC, oleh karena itu akun "Kas di Kasda" dikredit sebesar nilai di SP2D tersebut.

### C. Posting ke Buku Besar

Informasi yang telah direkam dalam jurnal selanjutnya dicatat di Rekening/akun/rekening buku besar. Tindakan ini disebut posting ke Buku Besar. Untuk melakukan posting, harus disediakan akun/rekening/Rekening buku besar yang diperlukan dan Rekening tersebut diberi kode sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui peraturan kepala daerah. Untuk memahami cara posting berikut ini diberikan contoh sederhana :

#### Jurnal

Halaman : 1

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debet	Kredit
2008 Jan 2	Kas di Kasda Pendapatan Transfer-DAU		19.000.000.000 -	- 19.000.000.000
20				

#### BUKU BESAR

Nama Rekening : Kas di Kasda  
Debit

No : 1.1.1.01.01  
Kredit

Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah	Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah
2009 Jan 1	Saldo		300.000.000				
2			19.000.000.000				

Nama Rekening : Pendapatan Transfer-DAU  
Debit

No : 4.1.1.01.01  
Kredit

Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah	Tgl.	Keterangan	Ref	Jumlah
				2009 Jan 2		J.1	19.000.000.000

#### D. Bukti transaksi dan waktu pencatatannya

Berikut ini akan dibahas dokumen yang telah dibuat oleh Pemda untuk merekam adanya transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas untuk membayar gaji tersebut, serta waktu pencatatan transaksi di jurnal dan buku besar.

Jika Pemda menerima uang kas dari pembayar pajak atau retribusi maka pemda akan menerbitkan bukti setoran. Jika pemda menerima transfer dari Pemerintah Pusat (Pemerintah), di samping uangnya masuk ke rekening Kasda di bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, Pemda juga menerima bukti transfer atau nota kredit dari Bank. Bukti yang disebut tersebut merupakan dokumen penerimaan

Jika Pemda akan mengeluarkan uang dari Kasda, ada prosedur yang harus dilalui. Kuasa Bendahara Umum Daerah akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh SKPD (Pengguna Anggaran). SP2D hakekatnya adalah perintah BUD/Kuasa BUD untuk mentransfer uang dari rekening BUD di Bank ke rekening Bendahara Pengeluaran atau kepada rekanan. Untuk pencatatan akuntansi, SP2D tersebut merupakan bukti pengeluaran kas. SP2D terdiri dari SP2D LS, SP2D UP, SP2D GU dst. Bukti pengeluaran tersebut merupakan media untuk mencatat di jurnal. Untuk SP2D LS waktu pencatannya adalah pada waktu SKPD menerima SP2D LS dari BUD. Untuk pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP, waktu pencatannya adalah pada waktu SPJ.

## **E. Menyesuaikan saldo rekening buku besar pada akhir tahun**

### **a. Dasar pengakuan pendapatan dan belanja**

Untuk membahas materi menyesuaikan rekening buku besar dibahas terlebih dahulu dasar akuntansi yaitu dasar kas dan dasar akrual. Untuk membahas dasar akuntansi maka dimisalkan pada tanggal 31 Desember 2009 rekening listrik bulan Desember sebesar Rp.30.000.000,00 dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Januari 2010. Jasa PLN berupa aliran listrik sudah dimanfaatkan oleh pemda pada tahun 2009 yaitu di bulan Desember tetapi pembayaran dilakukan pada tahun 2009. Masalah akuntansinya adalah rekening listrik tersebut akan dilaporkan sebagai belanja tahun 2009 atau tahun 2010. Ada diantara kita yang akan memasukkan rekening listrik bulan Desember 2009 tersebut sebagai **Belanja barang dan jasa bulan Desember 2009**, sementara yang lain memasukkan sebagai Belanja Barang dan Jasa tahun 2010. Sehubungan dengan itu timbullah dasar pengakuan pendapatan dan belanja, kewajiban serta ekuitas dana yaitu dasar **Kas dan dasar akrual**.

**Menurut dasar Kas**, pendapatan dan belanja diakui (dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran) pada tahun dibayar dari Kasda dan pendapatan diakui pada tahun uangnya diterima oleh Kasda. Dengan demikian rekening listrik bulan Desember 2009 yang dibayar pada tahun 2010 tersebut di atas akan diakui (dicatat sebagai belanja barang dan jasa) pada tahun 2010.

**Menurut dasar akrual**, belanja diakui pada tahun terjadinya tanpa melihat kapan dibayar, dan pendapatan diakui pada tahun diperolehnya tanpa memperhatikan tahun kapan uang diterima oleh Kasda. Dengan demikian karena aliran listrik digunakan pada tahun 2009 berarti pada tahun itu telah terjadi "belanja" listrik oleh karena itu akan diakui pada tahun 2009.

Paragraf 5 PSAP no 1 mengatakan ***Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana***

*Konseptual Framework* paragraf 40 mengatakan Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan.

Selanjutnya paragraf 41 mengatakan bahwa Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dengan memperhatikan *konseptual framework* paragraf 40 dan penjelasan pada akhir angka 3 di atas dapat disimpulkan bahwa semua akun pendapatan sudah menunjukkan kas yang diterima dari pendapatan masing-masing jenis pendapatan. Demikian juga semua akun belanja sudah menunjukkan kas keluar dari Kas di Kasda untuk masing-masing belanja. Hal ini juga berlaku untuk akun penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Setelah masalah pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan sudah kita bicarakan, masalah kedua adalah pada akhir tahun 2008 sebenarnya telah terjadi utang/kewajiban ke PLN. Apakah utang tersebut harus dicatat?. Paragraf 5 PSAP No. 1 mengatakan ***Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Berdasarkan pada pasal 5 PSAP No. 1 di atas, maka utang ke PLN tersebut mestinya sudah dicatat tetapi hanya mempengaruhi Neraca saja. Untuk itu pada akhir tahun 2008 perlu dibuat jurnal untuk mengakui/mencatat utang tersebut di dalam jurnal penyesuaian.***

#### **b. Menyesuaikan akun**

Setelah jurnal diposting ke Rekening buku besar, kadangkala saldo Rekening buku besar belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya karena adanya informasi

yang belum dicatat. Agar akun (Rekening buku besar) dan saldonya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan maka perlu diadakan penyesuaian terhadap akun melalui pembuatan ayat jurnal penyesuaian dan selanjutnya diposting ke akun yang bersangkutan.

Berikut ini diberikan beberapa contoh ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

### 1). Hutang biaya

Pada tanggal 31 Desember 2009, terdapat bunga Rp.2.000.000,00 belum dibayar dan belum dicatat. Utang bunga harus dibayar pada bulan Januari 2010, oleh karena itu (1) pemda harus mengkredit akun Utang Jangka Pendek sebesar Rp.2.000.000,00. (2) Pemda harus menyediakan dana untuk membayar hutang jangka pendek untuk itu Perlu diciptakan akun yang bersifat mengurangi ekuitas dana dalam rangka menyajikan ekuitas dana lancar yaitu "Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek". Saldo akun ini mengurangi ekuitas dana lancar. Jurnal yang dibuat adalah :

Halaman :

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debet	Kredit
<b>2009</b>				
Des. 31	Dana yhd untuk pembayaran utang jk pendek Utang bunga		2.000.000	- 2.000.000

Setelah ayat jurnal penyesuaian diposting ke buku besar, maka Rekening itu akan tampak sebagai berikut :

Nama Rekening : Dana yhd untuk pembayaran utang jk pendek

No akun :

Tgl.	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo	
			Debit	Kredit	Debit	Kredit
<b>2009</b>						
Des 31	AJP		2.000.000	-	2.000.000	-

Nama Rekening : Utang jangka pendek

No akun :

Tgl.	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo	
			Debit	Kredit	Debit	Kredit
2009 Des 31 31	AJP			2.000.000		2.000.000

Setelah dilakukan posting, maka akun utang dan akun Dana yhd untuk membayar hutang jangka pendek.

## 2). Persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun

Persediaan merupakan aset yang harus disajikan di neraca, oleh karena itu jika pada akhir tahun terdapat persediaan alat tulis kantor yang nilainya Rp.3.000.000,00 maka pemda akan mencatat persediaan dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debet	Kredit
2009 Des. 31	Persediaan ATK		3.000.000,00	-
	Cadangan Persediaan			3.000.000,00

Jika sebelum dibuat jurnal, akun persediaan bersaldo debit Rp.2.500.000,00 dan akun Cadangan Persediaan bersaldo kredit sebesar Rp.2.500.000,00, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debet	Kredit
2009 Des. 31	Persediaan		500.000,00	-
	Cadangan Persediaan			500.000,00

Dengan adanya ayat jurnal dan posting jurnal tersebut maka akun persediaan dan cadangan persediaan akan bersaldo Rp.3.000.000,00 sesuai kondisi 31 Desember 2009. Untuk menentukan nilai persediaan akhir tahun pertama kali kuantitas barang ditentukan kemudian dinilai dengan harga beli terakhir jika persediaan diperoleh dari pembelian. Secara lengkap PSAP No. 5 paragraf 18 mengatakan "**Persediaan disajikan sebesar :**

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; “**

**3). Piutang pendapatan**

Misalkan pada akhir tahun 2009 SKPD memiliki tagihan atas penjualan angsuran rumah kepada pegawai negeri sebesar Rp.100.000.000,00. Dari jumlah ini sebesar Rp.24.000.000,00 akan diterima dalam tahun 2010, sisanya akan diterima setelah tahun 2010.

**a). Pencatatan piutang lancar**

Agar neraca disusun dengan dasar akrual, maka pemda harus mencatat timbulnya Piutang lancar sebesar Rp.24.000.000,00 dan sekaligus mencatat “Cadangan Piutang” dengan jumlah yang sama, sehingga dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Halaman :

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debit	Kredit
<b>2009</b> Des. 31	Piutang angsuran rumah Cadangan Piutang		24.000.000	- 24.000.000

Ayat jurnal ini harus diposting ke akun Piutang angsuran rumah – Lancar sisi debit dan Cadangan Piutang sisi kredit.

**b). Pencatatan piutang yang akan diterima setelah tahun 2009**

Piutang yang akan jatuh tempo setelah 31 Desember 2010 diklasifikasikan sebagai aset lain-lain sebesar Rp.76.000.000,00 oleh karena itu jurnal yang dibuat adalah :

Halaman :

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debit	Kredit
<b>2008</b> Des. 31	Aktiva lain-lain-Piutang Penjualan Angsuran E.D. Diinvestasikan dalam Aset lain-lain		76.000.000	- 76.000.000

Ayat jurnal ini harus diposting ke akun Aset Lain-lain sisi debit dan Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset lain-lain sisi kredit.

Pada tahun 2010, penerimaan uang dari piutang angsuran akan dicatat dengan mendebit akun Kas di Kasda dan mengkredit akun "Pendapatan" sebesar Rp.24.000.000,00. Pada akhir tahun 2010 besarnya piutang yang akan jatuh tempo di tahun 2011 ditentukan sebagai dasar untuk membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2010.

Misalkan pada akhir tahun 2010 nanti piutang angsuran yang akan diterima di tahun 2011 adalah Rp.30.000.000,00, maka terjadi perubahan dari piutang jangka panjang menjadi piutang lancar. Piutang lancar akhir tahun 2009 Rp.24.000.000,00 dan akhir tahun 2010 Rp.30.000.000,00 oleh karena itu perlu jurnal penyesuaian sebesar Rp.6.000.000,00. Jurnal tersebut adalah :

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debit	Kredit
<b>2009</b>				
<b>Des. 31</b>	Piutang angsuran rumah Cadangan Piutang		3.000.000	- 3.000.000

Selanjutnya piutang jangka panjang tentunya berkurang sebesar Rp.30.000.000,00 oleh karena itu pada tanggal 31 Desember 2010 perlu ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debit	Kredit
<b>2009</b>				
<b>Des 31</b>	ED Diinvestasikan dalam aktiva lain-lain Aktiva Lain-lain-Piutang Penj Angsuran		30.000.000	30.000.000

#### 4). Penggunaan aktiva tetap

Aktiva tetap seperti gedung atau peralatan dibeli untuk operasi dan dapat digunakan lebih dari satu tahun. Dengan berlalunya waktu, maka aset tetap akan mengalami keusangan. Aset tetap dengan digunakan juga akan menurun kemampuannya. Untuk mengakui adanya keusangan dan penurunan kemampuannya, aset tetap yang umurnya terbatas dilakukan depresiasi/penyusutan. Permendagri 13 tahun 2005 pasal 253 ayat (5) menyatakan bahwa penyusutan merupakan

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Jurnal yang dibuat adalah baku yaitu mendebit akun Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam aset tetap dan mengkredit akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Jika pada tahun 2009 telah menetapkan besarnya depresiasi tahun 2009 adalah Rp.200.000.000,00 maka jurnal yang dibuat adalah :

**BUKU JURNAL**

Halaman :

Tanggal	Rekening Buku Besar	Ref	Debit	Kredit
2009 Des. 31	ED Diinvestasikan dalam AT Akumulasi Penyusutan		200.000.000	- 200.000.000

Ayat jurnal ini selanjutnya diposting ke akun Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Tetap sisi debit dan akun Akumulasi Penyusutan sisi kredit.

Masih terdapat banyak item yang perlu dilakukan penyesuaian. Item-item yang belum dibahas pada bagian ini akan dibahas secara bertahap pada bagian berikutnya.

**F. Menyusun Neraca Saldo**

Neraca saldo merupakan rekapitulasi dari saldo seluruh akun buku besar. Kegunaan neraca saldo antara lain adalah untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam posting ke buku besar. Neraca Saldo adalah sebuah daftar yang memuat nama Rekening buku besar (akun) dan saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Neraca saldo yang sudah benar juga dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan.

Neraca saldo dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan, namun setidaknya dibuat pada setiap akhir tahun baik sebelum atau setelah ayat jurnal penyesuaian diposting ke Buku besar. Neraca saldo juga dibuat pada akhir tahun setelah akun buku besar "Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Penerimaan Non Anggaran, Pengeluaran non Anggaran ditutup. Dengan demikian neraca saldo yang

dibuat setelah penutupan buku besar hanya memuat akun-akun harta, Utang dan Ekuitas Dana.

Neraca saldo disusun pada sebuah formulir dengan format dan cara sebagai berikut :

a. Pertama kali dibuat formulir neraca saldo sebagai berikut :

Nomor Akun						Nama akun	Debit	Kredit

b. Masing-masing nama dan nomor akun serta saldonya disalin di formulir neraca saldo tersebut. Untuk menentukan saldo setiap akun, maka perhatikan bentuk akunnnya. Jika akunnnya bentuk kiri dan kanan, maka jumlah-jumlah debit ditotal. Demikian juga dengan sisi kredit. Jika suatu akun jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, akun tersebut bersaldo debit sebesar selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit. Kemudian selisih tersebut disalin di neraca saldo sisi debit.

### Buku Besar

Kas di Kasda		Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
70.056.550.000	300.000.000	6.000.000	
200.000.000	15.000.000		
300.000.000	100.000.000		
400.000.000	200.000.000		
450.000.000	1.500.000		
120.000.000	50.000		
300.000.000	175.000.000		
2.500.000	150.000.000		
60.000.000	110.000.000		
90.000.000	75.000.000		
680.000	200.000.000		
Jml 71.979.730.000	50.000.000		
Sld 68.922.180.000	120.000.000		
	11.500.000		
	950.000.000		
	4.500.000		
	500.000.000		
	95.000.000		
	Jml 3.057.550.000		
		Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	
		8.000.000	



Persediaan Obat-Obatan	
2.000.000	

Alat-alat angkut darat Sedan	
100.000.000	

Alat-alat angkut darat Station Wagon	
150.000.000	

Alat-alat angkut darat ambulance	
100.000.000	

Tanah Kantor	
200.000.000	

Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	
120.000.000	

Tanah Sarana Sekolah Dasar	
150.000.000	

Tanah Sarana Sekolah Menengah Umum & Kejuruan	
100.000.000	

Gedung Kantor	
300.000.000	

Gedung Sekolah	
400.000.000	

Gedung Sarana Kesehatan	
300.000.000	

Jalan	
400.000.000	

Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
54.000.000	

Tagihan Ganti Rugi Kekayaan Daerah	
72.000.000	

Utang Taspen	
	200.000

Utang Askes	
	300.000

Utang PPh Pusat	
	60.000

Utang PPN Pusat	
	45.000

Utang Taperum	
	75.000

Utang Pemerintah Pusat	
	500.000.000

SILPA	
	70.056.550.000

Cadangan Piutang	
	14.000.000

Cadangan Persediaan	
	2.000.000

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
	2.520.000.000

Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
	500.000.000

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	
	126.000.000

PAD- Pajak Hotel	
	200.000.000

PAD - Pajak Reklame	
	300.000.000

Retribusi Pelayanan Kesehatan Nomor Rekening : 4.1.2.1.3	
	43.000.000

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan 4.1.2.7.1	
	7.000.000

Retribusi Pelayanan Pasar No. Rekening 4.1.2.8.1	
	10.000.000

Pendapatan Jasa Giro Kasda 4.1.4.3.1	
	2.500.000

Pendapatan Tranfer BH. PBB	
	400.000.000

Pendapatan transfer-BH Pertambangan Minyak	
	450.000.000

Pendapatan Transfer-BH PKB	
	120.000.000

Dana alokasi umum (4.2.2.1)	
	300.000.000

Dana Alokasi Khusus (4.2.3.1.1)	
	90.000.000

Belanja Pegawai-Gaji Pokok	
300.000.000	

Belanja Pegawai-Tunjangan Keluarga	
15.000.000	

Tunjangan Jabatan	
100.000.000	

Tunjangan Fungsional	
200.000.000	

Tunjangan Beras	
1.500.000	

Tunjangan PPh.	
50.000	

Belanja Bunga hutang pemerintah pusat ( 5.1.2.3.1 )	
50.000.000	

Belanja Subsidi Pada Lembaga ( 5.1.3.1.2 )	
120.000.000	

Belanja Bantuan social ( 5.1.5.1.1 )	11.500.000	Belanja Tak terduga 5.1.8.1.1	4.500.000
Belanja Transfer ke Desa ( 5.1.7.3.1 )	95.000.000	Belanja Bahan Obat-obatan	150.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor	175.000.000	Belanja Bahan Kimia	75.000.000
Belanja Jasa Pemeliharaan	110.000.000	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian gedung ( 5.2.3.26.1 )	950.000.000
Belanja Modal-alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance	200.000.000	Pembayaran utang pemerintah pusat	500.000.000

Berdasarkan buku besar tersebut di atas dapat disusun Neraca saldo sebagai berikut :

**KABUPATEN ABC  
NERACA SALDO  
PER 31 DESEMBER 2008**

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas di Kas Daerah	68.922.180.000	
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	6.000.000	
Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah .....	8.000.000	
Persediaan Obat-obatan	2.000.000	
Alat-alat angkutan darat sedan	100.000.000	
Alat-alat angkutan darat station wagon	150.000.000	
Alat-alat angkutan darat ambulans	300.000.000	
Tanah Kantor	200.000.000	
Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	120.000.000	
Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar .....	150.000.000	
Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	100.000.000	
Gedung Kantor .....	300.000.000	
Gedung Sekolah	400.000.000	
Gedung Sarana Kesehatan	300.000.000	
Jalan	400.000.000	
Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah .....	54.000.000	
Tagihan Ganti Rugi Kekayaan Daerah	72.000.000	
Utang Taspen		200.000
Utang Askes		300.000
Utang PPh Pusat		60.000
Utang PPN Pusat		45.000
Utang Taperum		75.000
Utang Pemerintah Pusat		
Utang Pemerintah Pusat		500.000.000
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>		<b>70.056.550.000</b>
Cadangan Piutang		14.000.000
Cadangan Persediaan		2.000.000
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0	
Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	500.000.000	

<b>Nama Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		2.520.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)		126.000.000
<b>Pajak Hotel</b>		200.000.000
<b>Pajak Reklame</b>		300.000.000
<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>		43.000.000
<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>		7.000.000
<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>		10.000.000
<b>Pendapatan Jasa Giro Kasda</b>		2.500.000
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan		400.000.000
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi		450.000.000
Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor		120.000.000
<b>Dana Alokasi Umum</b>		300.000.000
<b>Dana Alokasi Khusus</b>		90.000.000
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	300.000.000	
Tunjangan Keluarga	15.000.000	
Tunjangan Jabatan <sup>2)</sup>	100.000.000	
Tunjangan Fungsional	200.000.000	
Tunjangan Beras <sup>2)</sup>	1.500.000	
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.000	
Bunga Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah	50.000.000	
Belanja Subsidi kepada Lembaga ....	120.000.000	
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ....	11.500.000	
Belanja transfer ke desa	95.000.000	
Belanja Tak terduga	4.500.000	
Belanja alat tulis kantor	175.000.000	
Belanja bahan obat-obatan	150.000.000	
Belanja Jasa Service	110.000.000	
Belanja bahan kimia	75.000.000	
Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	200.000.000	
Belanja modal konstruksi/pembelian gedung kantor	950.000.000	
Pembayaran utang ke pemerintah pusat	500.000.000	
	75.141.730.000	75.141.730.000

## G. Menyusun Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dari neraca saldo. Laporan keuangan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Dengan adanya data tambahan, dari neraca saldo tersebut juga dapat dihasilkan laporan arus kas.

Disamping neraca saldo di atas, untuk menyusun laporan realisasi anggaran perlu data anggaran dapat diperoleh dari APBD tahun 2009 dan rinciannya.

### 1). Menyusun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan. Informasi anggaran tersebut disandingkan dengan Realisasi Pendapatan, Belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran. Jika realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja, selisihnya disebut Surplus. Sebaliknya jika Realisasi Pendapatan lebih kecil daripada realisasi Belanja selisihnya disebut deficit. Surplus atau defisit tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan neraca saldo di atas dapat disusun LRA sebagai berikut :

**KABUPATEN ABC  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009**

Uarian	Anggaran	Realisasi	Prosentase*)
Pendapatan Pajak Daerah	275.000.000	500.000.000	1,82
Pendapatan Rtribusi Daerah	55.000.000	60.000.000	1,09
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya	0	0	
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	<u>2.000.000</u>	<u>2.500.000</u>	1,25
Jumlah PAD	332.000.000	562.500.000	1,69
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			

Uarian	Anggaran	Realisasi	Prosentase*)
Dana Bagi Hasil Pajak	500.000.000	400.000.000	0,8
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	400.000.000	450.000.000	1,13
Dana Alokasi Umum	250.000.000	300.000.000	1,2
Dana Alokasi khusus	<u>100.000.000</u>	<u>90.000.000</u>	0,9
	1.250.000.000	1.240.000.000	0,99
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	0	0	
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	220.000.000	120.000.000	0,55
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	220.000.000	<u>120.000.000</u>	0,55
Total Pendapatan Transfer	1.470.000.000	1.360.000.000	0,93
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	0	0	
Pendapatan Dana Darurat	0	0	
Pendapatan Lainnya	0	0	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	1.802.000.000	1.922.500.000	1,07
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	700.000.000	616.550.000	0,88
Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	510.000.000	0,73
Bunga	50.000.000	50.000.000	1
Subsidi	120.000.000	120.000.000	1
Hibah	0	0	
Bantuan Sosial	<u>12.000.000</u>	<u>11.500.000</u>	0,96
	1.582.000.000	1.308.050.000	0,83
BELANJA MODAL			
Belanja Peralatan dan Mesin	300.000.000	200.000.000	0,67
Belanja Bangunan dan gedung	1.000.000.000	950.000.000	0,95
	1.300.000.000	1.150.000.000	0,88
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja tak terduga	5.000.000	4.500.000	0,9
Jumlah belanja tak terduga	5.000.000	4.500.000	0,9
Jumlah belanja	2.887.000.000	2.462.550.000	0,85
TRANSFER			
Transfer ke desa	100.000.000	95.000.000	0,95
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.987.000.000	2.557.550.000	0,86
DEFISIT	(1.185.000.000)	(635.050.000)	0,54

Uarian	Anggaran	Realisasi	Prosentase*)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SILPA	1.685.000.000	1.685.000.000	1
Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	500.000.000	1
Pembiayaan Neto	1.185.000.000	1.185.000.000	1
SILPA	0	549.950.000	

\*)kolom ini biasa juga diisi dengan saldo lebih (kurang) yaitu selisih antara anggaran dengan realisasinya.

1). Menyusun neraca

Neraca berisi informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dana. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu neraca berisi informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dana. Disamping itu perlu diperhatikan bahwa ada hubungan antara rincian aset dengan rincian ekuitas dana.

Dari neraca saldo diatas dapat disusun neraca sebagai berikut :

**KABUPATEN X  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2008  
( Dalam Rupiah )**

Kas di Kas Daerah	68.922.180.000	
Piutang Bagian Lancar Penj. Ang. Cicilan Rumah	6.000.000	
Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah .....	8.000.000	
Persediaan Obat-obatan	2.000.000	
<b>Total Aktiva Lancar</b>		68.938.180.000
<b>Aktiva Tetap :</b>		
Alat-alat angkutan darat sedan	100.000.000	
Alat-alat angkutan darat station wagon	150.000.000	
Alat-alat angkutan darat ambulans	300.000.000	
Jumlah mesin dan peralatan		550.000.000
Tanah Kantor	200.000.000	
Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	120.000.000	
Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar .....	150.000.000	
Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	100.000.000	
Jumlah		570.000.000

Gedung Kantor .....	300.000.000	
Gedung Sekolah	400.000.000	
Gedung Sarana Kesehatan	300.000.000	
		1.000.000.000
Jalan		400.000.000
<b>Aset Tetap</b>		<b>2.520.000.000</b>
Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah .....	54.000.000	
Tagihan Ganti Rugi Kekayaan Daerah	72.000.000	
Jumlah aset lain-lain		126.000.000
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>71.584.180.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>Kewajiban Jagka pendek :</b>		
<b>Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga</b>		
Utang Taspen	200.000	
Utang Askes	300.000	
Utang PPh Pusat	60.000	
Utang PPN Pusat	45.000	
Utang Taperum	75.000	
Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga		680.000
<b>Kewajiban Jangka Panjang :</b>		
Utang Pemerintah Pusat		500.000.000
Jumlah kewajiban		500.680.000
<b>EKUITAS DANA LANCAR :</b>		
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	68.371.550.000	
<b>Silpa tahun berjalan</b>	549.950.000	
Cadangan Piutang	14.000.000	
Cadangan Persediaan	2.000.000	
		68.937.500.000
Dana YHD Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-500.000.000
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>		<b>68.437.500.000</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI :</b>		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		2.520.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		126.000.000
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		2.646.000.000
Jumlah Ekuitas Dana		71.083.500.000
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>		<b>71.584.180.000</b>

### 3). Menyusun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memuat informasi mengenai arus kas masuk ke dan arus kas keluar dari Kas Daerah. Arus Kas masuk dan keluar tersebut dirinci berdasarkan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya arus masuk dan arus kas keluar tersebut. Kegiatan tersebut meliputi (1) Kegiatan operasional (2) Kegiatan investasi (3) Kegiatan pembiayaan (4) Kegiatan non anggaran misalnya kegiatan menerima potongan atas PPh dan PPN serta penyetorannya ke kas Negara.

Ada beberapa cara untuk menyusun laporan arus kas antara lain adalah :

- a. Mendasarkan diri pada akun Kas di Kasda. Dari rekening ini dapat diikhtisarkan penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode

Arus kas masuk dapat dilihat disisi kiri akun Kas di Kasda sementara itu pengeluaran uang dari kas daerah telah dicatat di akun Kas di Kasda. Kelemahan dari cara ini adalah informasi yang dicatat di akun ini belum terklasifikasi dengan baik. Misalnya selama tahun 2009 pemda ini telah menerima Dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum selama 12 kali (mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2008), penerimaan uang ini telah dicatat tidak berurutan sehingga untuk mengetahui besarnya penerimaan kas dari DAU berdasarkan akun Kas di Kasda, terlebih dahulu harus dibuat rekapitulasinya. Tindakan seperti ini dilakukan terhadap semua jenis pendapatan dan belanja.

- b. Arus kas disusun dari saldo buku besar dan data tambahan

Karena dasar pengakuan pendapatan, beban, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah dasar kas maka akun Pendapatan merupakan cermin dari adanya penerimaan kas dari pendapatan tertentu. Sehingga untuk mengetahui arus kas dari berbagai sumber dapat dilihat akun pendapatan. Sementara itu untuk mengetahui pengeluaran kas untuk berbagai belanja dan pembiayaan kita dapat

memperhatikan catatan yang sudah terklasifikasi yaitu semua akun belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Namun ada informasi yang disajikan di laporan kas yang belum tersedia dalam akun/rekening buku besar yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan non anggaran. Untuk mendapatkan informasi arus kas dari kegiatan ini, perlu diteliti akun "Utang PFK". Mutasi kredit pada akun ini menunjukkan penerimaan kas, sementara itu mutasi debit merupakan pengeluaran non anggaran.

Untuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang terjadi di SKPD maka SPJ yang disampaikan oleh berbagai SKPD seharusnya memuat informasi mengenai potongan PFK dan penyetoran PFK yang terkait dengan pengeluaran uang melalui UP/GU/TUP.

Jika berdasarkan neraca saldo dan data tambahan disusun laporan arus kas, laporan arus kas tersebut akan tampak sebagai berikut :

**KABUPATEN ABC**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009**  
**( Dalam Rupiah )**

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>Arus Masuk Kas</b>	
Pendapatan Pajak Daerah	500.000.000
Pendapatan Retribusi Daerah	60.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	2.500.000
Dana Alokasi Umum	300.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak	400.000.000
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	450.000.000
Dana Alokasi Khusus	90.000.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	120.000.000
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.922.500.000</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	
Belanja Pegawai	616.550.000
Belanja Barang dan Jasa	510.000.000
Bunga	50.000.000

Subsidi	120.000.000
Bantuan Sosial	11.500.000
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	95.000.000
Belanja Tak Tersangka	4.500.000
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1.407.550.000</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>514.950.000</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN</b>	
<b>Arus Masuk Kas</b>	0
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	0
<b>Arus Keluar Kas</b>	
Belanja Peralatan dan Mesin	200.000.000
Belanja Gedung dan Bangunan	950.000.000
Jumlah Arus Keluar Kas	1.150.000.000
Arus Kas Bersih dari Akt Inv Nonkeuangan	-1.150.000.000
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN :</b>	
Arus Masuk Kas	0
Jumlah Arus Masuk Kas	0
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	500.000.000
Jumlah Arus Keluar Kas	500.000.000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-500.000.000
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN NON ANGGARAN</b>	
<b>Arus Masuk Kas</b>	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	680.000
Jumlah Arus Masuk Kas	680.000
<b>Arus Keluar Kas</b>	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0
Jumlah Arus Keluar Kas	0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	680.000
Penurunan Kas	-1.134.370.000
Saldo Awal Kas di BUD	70.056.550.000
Saldo Akhir Kas di BUD	68.922.180.000
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0
Saldo Akhir Kas	68.922.180.000

## H. Menutup Buku Besar

Pada bagian sebelum ini telah dijelaskan bahwa dilihat dari informasi yang terkandung di dalamnya terdapat dua kelompok akun buku besar : (1) Akun riil (akun permanen); (2) Akun nominal (akun sementara). Akun riil merupakan akun neraca seperti Kas, Piutang, Persediaan, Peralatan dan Akumulasi Penyusutan. Akun-akun hutang meliputi hutang gaji, hutang telepon, hutang obligasi dan lain-lain. Yang termasuk akun Ekuitas Dana adalah akun "Silpa", Akun Cadangan Persediaan, Cadangan Piutang, Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam aset Tetap, Diinvestasikan Dalam aset lain-lain, serta Diinvestasikan dalam Dana Cadangan. Saldo akun-akun tersebut pada akhir tahun merupakan saldo awal tahun berikutnya.

Disamping akun riil ada akun nominal. Akun-akun nominal digunakan untuk menampung informasi untuk satu periode saja dan saldo akun nominal pada akhir periode tidak akan menjadi saldo awal tahun berikutnya. Informasi yang terekam dalam akun nominal dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran. Akun-akun tersebut adalah akun-akun "Pendapatan", akun-akun Belanja, akun penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta akun penerimaan dan pengeluaran non anggaran. Akun pendapatan PAD-Pajak Hotel dibuat oleh Pemda berfungsi untuk mengumpulkan jumlah pendapatan jenis PAD-Pajak Hotel yang diterima selama satu periode. Pada akhir tahun 2009 misalnya saldo rekening ini Rp.300.000.00,00, jumlah ini merupakan jumlah PAD-Pajak hotel tahun 2009 saja, yang selanjutnya akan disajikan di Laporan realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Jumlah Rp.300.000.000,00 ini tidak akan menjadi saldo awal tahun 2010, karena akun PAD-Pajak Hotel di tahun 2010 berfungsi untuk mengumpulkan jumlah pendapatan PAD-Pajak Hotel tahun 2010.

Di dalam kegiatan belajar kesatu dijelaskan bahwa pendapatan bersifat meningkatkan kekayaan pemerintah dan belanja menurunkan kekayaan pemerintah. Oleh karena itu pada akhir tahun jumlah pendapatan dan belanja serta pembiayaan dipindahkan ke kelompok akun Ekuitas Dana. Akun yang digunakan adalah SiLPA.

Jurnal untuk memindahkan akun-akun nominal di atas disebut jurnal penutup. Jurnal ini bertujuan memindahkan saldo akun nominal (akun pendapatan, belanja dan pembiayaan) ke SiLPA dan sekaligus akan membuat akun nominal menjadi bersaldo nol. Jurnal penutup untuk semua akun pendapatan, belanja dan pembiayaan dari Kabupaten ABC di atas akan tampak sebagai berikut :

a. Jurnal untuk menutup akun-akun pendapatan

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2008			
Des 31	Pajak Hotel	200.000.000	
	Pajak Reklame	300.000.000	
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	43.000.000	
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000	
	Retribusi Pelayanan Pasar	10.000.000	
	Pendapatan Jasa Giro Kasda	2.500.000	
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	400.000.000	
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	450.000.000	
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor	120.000.000	
	Dana Alokasi Umum	300.000.000	
	Dana Alokasi Khusus	90.000.000	
	Surplus / Defisit		1.922.500.000

b. Jurnal untuk menutup akun-akun Belanja

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2008			
Des 31	<b>Surplus / Defisit</b>	2.557.550.000	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		300.000.000
	Tunjangan Keluarga		15.000.000
	Tunjangan Jabatan <sup>2)</sup>		100.000.000
	Tunjangan Fungsional		200.000.000
	Tunjangan Beras <sup>2)</sup>		1.500.000
	Tunjangan PPh		50.000
	Bunga Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah		50.000.000
	Belanja Subsidi		120.000.000
	Belanja Bantuan Sosial		11.500.000
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		95.000.000

	Belanja Tak terduga		4.500.000
	Belanja alat tulis kantor		175.000.000
	Belanja bahan obat-obatan		150.000.000
	Belanja Jasa Pemeliharaan		110.000.000
	Belanja bahan kimia		75.000.000
	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor ambulans		200.000.000
	Belanja modal konstruksi/pembelian gedung kantor		950.000.000

c. Jurnal untuk menutup akun pembiayaan

Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit
2008			
Des 31	Silpa	500.000.000	
	Pembayaran utang ke pemerintah Pusat		500.000.000

d. Jurnal untuk menutup akun surplus ke akun SiLPA

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2008			
Des 31	SILPA	635.050.000	
	Surplus/Defisit		635.050.000

Jika jurnal penutup di atas diposting ke Buku besar, semua akun nominal bersaldo nol.

### I. Soal Latihan

1. Jelaskan siklus akuntansi secara lengkap !
2. Jelaskan apa yang disebut dengan jurnal penutup !
3. Sebutkan akun apa saja yang dibuat ayat jurnal penutup !

### J. Rangkuman

Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemda diproses melalui siklus akuntansi. Transaksi yang terjadi dicatat di Bukti Transaksi dan selanjutnya

dicatat di jurnal umum yang memuat nama akun apa saja yang didebit dan nama akun yang dikredit serta jumlahnya.

Jurnal tersebut selanjutnya diposting ke akun buku besar. Pada akhir tahun dibuat jurnal penyesuaian dan selanjutnya jurnal tersebut diposting ke Buku Besar. Dari buku besar disusun neraca saldo setelah penyesuaian dan dari neraca saldo tersebut dijadikan dasar untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan Arus Kas disusun dapat disusun dari Laporan Realisasi Anggaran ditambah dengan catatan atas penerimaan dan pengeluaran non anggaran.

Setelah laporan keuangan disusun, akun-akun nominal (pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan) ditutup dengan membuat jurnal penutup agar akun-akun tersebut dapat menampung informasi tahun berikutnya.

#### K. Test Formatif

##### PILIH LAH JAWABAN YANG PALING TEPAT

1. Kabupaten X pada tanggal 29 Januari 2008 menerima transfer dari pemerintah pusat yaitu transfer Dana alokasi umum sebesar Rp.9.000.000.000,00.

a. Kas di Kasda	9.000.000.000	-
Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA Migas	-	9.000.000.000
b. Kas di Kasda	9.000.000.000	-
Pendapatan Dana Perimbangan- DAU	-	9.000.000.000
c. Kas di Kasda	9.000.000.000	-
Dana Perimbangan-DAK	-	9.000.000.000
d. Pendapatan Dana Perimbangan-DAU	9.000.000.000	-
Kas di Kasda	-	9.000.000.000

2. SKPKD melakukan pembayaran belanja subsidi ke lembaga swadaya masyarakat. Transaksi ini terekam dalam SP2D sebesar Rp.5.000.000,00,00

a. Belanja Tak terduga	5.000.000	-
Kas di Kasda	-	5.000.000

b. Belanja Subsidi	5.000.000	-
Kas di Kasda	-	5.000.000
c. Investasi	5.000.000	-
Kas di Kasda	-	5.000.000
d. Pengeluaran Pembiayaan-ATK	5.000.000	-
Kas di Kasda	-	5.000.000

3. Misalkan pada tanggal 31 Desember 2008 rekening listrik bulan Desember sebesar Rp.10.000.000,00 belum dibayar, pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Januari 2009. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah :

a. Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
Kas di Kasda	-	10.000.000
b. Dana YHD Untuk Membayar Hutang JK Pendek	10.000.000	-
Hutang Jangka Pendek	-	10.000.000
c. Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
Hutang Jangka Pendek	-	10.000.000
d. Kas di Kasda	10.000.000	-
Hutang Pada Pihak Ketiga	-	10.000.000

4. Basis Akuntansi. Pada tanggal 31 Desember 2008, terdapat bunga Rp.10.000.000,00 belum dibayar dan belum dicatat. Jika ini bunga terutang tidak dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran tetapi dilaporkan di neraca maka basis akuntansi yang digunakan adalah :

- Cash Basis*
- Accrual Basis*
- Modified Cash Basis*
- Cash Toward Accrual*

5. Basis Akuntansi. Pada tanggal 31 Desember 2008, terdapat bunga Rp.10.000.000,00 belum dibayar dan belum dicatat. Bunga tersebut dibayar di tahun 2009. Jika digunakan *cash basis* maka bunga tersebut dilaporkan di laporan Realisasi Anggaran tahun :

- 2009
- 2008

- c. 2010
- d. 2008 atau 2009

6. Pada tanggal 31 Desember 2008, terdapat bunga Rp.10.000.000,00 belum dibayar dan belum dicatat. Jurnal Penyesuaian yang dibuat adalah :

a. Dana YHD Untuk Membayar Hutang Jk Pendek	10.000.000	-
Kas di Kasda	-	10.000.000
b. Dana YHD Untuk Membayar Hutang Jk Pendek	10.000.000	-
Cadangan Bunga pinjaman	-	10.000.000
c. Belanja Bunga	10.000.000	-
Hutang Bunga pinjaman	-	10.000.000
d. Dana YHD Untuk Membayar Hutang Jk Pendek	10.000.000	-
Hutang Bunga pinjaman	-	10.000.000

7. Misalkan pada tanggal 31 Desember 2008, persediaan alat tulis kantor yang ada ditetapkan nilainya Rp.2.000.000,00 dan pada awal tahun pemda tersebut tidak memiliki persediaan alat tulis kantor, maka pemda akan mencatat persediaan sebesar Rp.2.000.000,00 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut :

a. Persediaan Alat Tulis Kantor	2.000.000	-
Kas di Kasda	-	2.000.000
b. Persediaan Alat Tulis Kantor	2.000.000	-
Cadangan Persediaan	-	2.000.000
c. Persediaan Alat Tulis Kantor	2.000.000	-
Belanja Barang dan Jasa-ATK	-	2.000.000
d. Persediaan Alat Tulis Kantor	2.000.000	-
Belanja Modal-ATK	-	2.000.000

8. Misalkan sebelum dibuat jurnal penyesuaian, akun persediaan bersaldo debit Rp.1.500.000,00 dan akun Cadangan Persediaan bersaldo kredit sebesar Rp.1.500.000,00. Pada akhir tahun persediaan ATK yang ada sebesar Rp.2.000.000,00, maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah :

a. Cadangan Persediaan	500.000	-
Persediaan Alat Tulis Kantor	-	500.000

b. Persediaan Alat Tulis Kantor	2.000.000	-
Cadangan Persediaan	-	2.000.000
c. Persediaan Alat Tulis Kantor	2.000.000	-
Belanja Barang dan Jasa-ATK	-	2.000.000
d. Persediaan Alat Tulis Kantor	500.000	-
Cadangan Persediaan	-	500.000

9. Misalkan pada akhir tahun 2008 SKPD memiliki tagihan atas penjualan angsuran rumah kepada pegawai negeri sebesar Rp.60.000.000,00. Dari jumlah ini sebesar Rp.12.000.000,00 akan diterima dalam tahun 2009, sisanya akan diterima setelah tahun 2009. Ayat jurnal penyesuaian atas piutang yang akan diterima tahun 2009 adalah :

a. Aktiva Lain-lain	12.000.000	-
Diinvestasikan dalam Aset Lain	-	12.000.000
b. Piutang Penjualan Angsuran Penjualan Rumah	12.000.000	-
Cadangan Piutang	-	12.000.000
c. Piutang Penjualan Angsuran Penjualan Rumah	12.000.000	-
SILPA	-	12.000.000
d. Piutang Penjualan Angsuran Penjualan Rumah	12.000.000	-
Cadangan Persediaan	-	12.000.000

10. Berikut ini yang merupakan urutan pekerjaan akuntansi adalah :

- Mencatat transaksi di bukti transaksi, menjurnal, posting buku besar, menyesuaikan buku besar
- Mencatat transaksi di bukti transaksi, posting buku besar, menjurnal ,menyesuaikan buku besar
- Membuat Neraca saldo, menjurnal, posting buku besar, menyesuaikan buku besar
- Membuat Neraca saldo, menyusun laporan keuangan, menjurnal, menyesuaikan buku besar

11. Dalam alam tahun anggaran 2008 Pemda ABC menerima pendapatan pajak Hotel sebesar Rp.500.000.000,00. Pajak tersebut langsung disetorkan ke Bank di rekening Kas Umum Daerah. Jurnal yang dibuat adalah :

a. Kas di Kasda	500.000.000	-
PAD-Pajak Hotel	-	500.000.000
b. Kas di Kasda	500.000.000	-
PAD-Pajak Reklame	-	500.000.000
c. Kas di Kasda	500.000.000	-
Hutang Pajak Reklame	-	500.000.000
d. Kas di Kasda	500.000.000	-
Hutang Pada Pihak Ketiga	-	500.000.000
12. Pemda melakukan aktivitas pembiayaan dengan menjual obligasi dengan harga Rp.100.000.000. Jurnal yang dibuat adalah :		
a. Kas di Kasda	100.000.000	-
Hutang PFK	-	100.000.000
b. Kas di Kasda	100.000.000	-
Penerimaan Pembiayaan	-	100.000.000
c. Kas di Kasda	100.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	100.000.000
d. Penerimaan Pembiayaan	100.000.000	-
Kas di Kasda	-	100.000.000
13. Pemda Kabupaten X menerima setoran pajak reklame sebesar Rp.150.000.000,00 langsung ke Kasda.		
a. Kas di Kasda	150.000.000	-
Pedapatan Asli Daerah Pajak Reklame	-	150.000.000
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	150.000.000	-
Pedapatan Asli Daerah Pajak Reklame	-	150.000.000
c. Kas di Kasda	150.000.000	-
Pedapatan Asli Daerah Pajak Hotel	-	150.000.000
d. Pendapatan Asli Daerah Pajak Reklame	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000
14. Pemda Kabupaten X menerima dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp.1.000.000.000,00;		
a. Kas di Kasda	1.000.000.000	-
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	-	1.000.000.000

b. Kas di Kasda	1.000.000.000	-
Dana Perimbangan- DAU	-	1.000.000.000
c. Kas di Kasda	1.000.000.000	-
Dana Perimbangan-DAK	-	1.000.000.000
d. Pendapatan DBH Pajak	1.000.000.000	-
Kas di Kasda	-	1.000.000.000
15. Pemda Kabupaten X menerima dana bagi hasil sumber daya alam migas sebesar Rp.3.000.000.000,00,		
a. Kas di Kasda	3.000.000.000	-
Pendapatan DBH Sumber Daya Alam Migas	-	3.000.000.000
b. Kas di Kasda	3.000.000.000	-
Dana Perimbangan- DAU	-	3.000.000.000
c. Kas di Kasda	3.000.000.000	-
Dana Perimbangan-DAK	-	3.000.000.000
d. Pendapatan DBH Migas	3.000.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.000.000.000
16. Pemda Kabupaten X menerima dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari propinsi Rp.200.000.000,00		
a. Kas di Kasda	200.000.000	-
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat	-	200.000.000
b. Kas di Kasda	200.000.000	-
Belanja Migas	-	200.000.000
c. Kas di Kasda	200.000.000	-
Pendapatan DBH Pajak Kendaraan Bermotor	-	200.000.000
d. Pendapatan DBH Pajak Kendaraan Bermotor	200.000.000	-
Kas di Kasda	-	200.000.000
17. Pemda Kabupaten X menerima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar Rp.4.000.000.000,00.		
a. Kas di Kasda	3.000.000.000	-
Pendapatan DBH Sumber Daya Alam Migas	-	3.000.000.000
b. Kas di Kasda	3.000.000.000	-
Dana Perimbangan- DAU	-	3.000.000.000

c. Kas di Kasda	3.000.000.000	-
Dana Perimbangan-DAK	-	3.000.000.000
d. Pendapatan Dana Perimbangan-DAU	3.000.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.000.000.000
18. Pemda membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp.3.150.000.000 dan dibayar langsung dari Kasda		
a. Belanja Barang Dan Jasa-ATK	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
b. Belanja Modal-ATK	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
c. Persediaan ATK	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
d. Pengeluaran Pembiayaan-ATK	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
19. Pemda membeli obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp1.300.000.000 dan dibayar langsung dari Kasda.		
a. Belanja Barang Dan Jasa- Obat-Obatan	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
b. Belanja Modal-Obat-obatan	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
c. Persediaan Obat-Obatan	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
d. Pengeluaran Pembiayaan-ATK	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
20. Pemda membayar biaya jasa servis mobil ambulance (5.2.2.05.01) dengan mengeluarkan uang langsung dari Kasda sebesar Rp.3.105.000		
a. Pengeluaran Pembiayaan-Jasa service	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
b. Belanja Modal- Ambulance	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
c. Persediaan Service	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000

d. Belanja Barang Dan Jasa- Jasa Service	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
21. Daerah membeli bahan kimia untuk keperluan melaksanakan kegiatan fogging sebesar Rp150.000.000		
a. Pengeluaran Pembiayaan-ATK	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000
b. Belanja Modal-Bahan Kimia	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000
c. Persediaan Bahan kimia	150.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	150.000.000
d. Belanja Barang Dan Jasa-Bahan kimia	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000
22. Pemda membeli mobil ambulance (5.2.3.03.10) yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp.275.000.000		
a. Belanja Modal-Kendaraan Bermotor Ambulance	275.000.000	-
Kas di Kasda	-	275.000.000
b. Kendaraan Bermotor Ambulance	275.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	275.000.000
c. Belanja Barang Dan Jasa-Ambulance	275.000.000	-
Kas di Kasda	-	275.000.000
d. Pengeluaran Pembiayaan-ATK	275.000.000	-
Kas di Kasda	-	275.000.000
23. Pemda menerima pinjaman dana dari pemerintah pusat sebesar Rp.2.000.000.000,00. Dana tsb langsung masuk rekening Kas daerah di Bank Pembangunan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	2.000.000.000	-
Kas di Kasda	-	2.000.000.000
b. Kas di Kasda	2.000.000.000	-
Penerimaan Pembiayaan	-	2.000.000.000
c. Kas di Kasda	2.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	2.000.000.000

d. Kas di Kasda	2.000.000.000	-
Hutang ke Pemerintah Pusat	-	2.000.000.000
24. Pemda membayar pinjaman ke pemerintah pusat sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan mentransfer dana dari Rekening Kasda di Bank Pembangunan Daerah		
a. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	-
Kas di Kasda	-	1.000.000.000
b. Kas di Kasda	1.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	1.000.000.000
c. Hutang Ke Pemerintah Pusat	1.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	1.000.000.000
d. Kas di Kasda	1.000.000.000	-

#### L. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang sesuai kunci}}{\text{Jumlah semua soal}} \times 100\%$$

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

- 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

**BAB VI**  
**Kegiatan Belajar 5**  
**AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari modul ini peserta dapat :

- a. menjelaskan siklus akuntansi di SKPD
- b. melakukan akuntansi atas pendapatan, belanja
- c. menyusun laporan keuangan SKPD

**A. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemda**

Pada kegiatan belajar keempat telah dijelaskan siklus akuntansi jika seluruh transaksi di semua satuan kerja di Pemda dicatat dalam satu jurnal umum oleh satu unit organisasi penanggung jawab akuntansi tersebut secara sentralisasi. Pelaksanaan anggaran di pemda dilakukan oleh berbagai SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan untuk kemudian disampaikan ke entitas pelaporan. Disamping sebagai entitas akuntansi SKPKD juga berfungsi sebagai entitas pelaporan. Sebagai entitas pelaporan SKPKD harus menyusun laporan untuk level pemerintah daerah. Entitas pelaporan melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh SKPD menjadi laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Pelaksanaan akuntansi pemda terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. APBD ditetapkan dengan peraturan Daerah (Perda) dan dijabarkan ke dalam peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Selanjutnya berdasarkan penjabaran APBD tersebut disusun DPA SKPD dan DPA PPKD. Berdasarkan Permendagri 59 tahun 2007, DPA untuk SKPKD harus dibedakan menjadi dua yaitu DPA SKPKD selaku SKPD dan DPA-PPKD selaku BUD.

Adapun DPA-PPKD tersebut digunakan untuk menampung:

- a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

- b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
- c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- d. Dengan demikian baik SKPD maupun SKPKD merupakan entitas akuntansi.

Sruktur/sistem akuntansi di Pemda (Provinsi/Kabupaten/kota) terdiri dari :

- a. Akuntansi SKPD (termasuk SKPKD selaku SKPD) yaitu unit entitas akuntansi di seluruh pengguna anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan (Dinas daerah, Sekretariat Daerah, Sekreariat DPRD, lembaga teknis daerah, dan SKPD lainnya)
- b. Akuntansi PPKD yaitu unit entitas akuntansi di SKPKD selaku PPKD atas pelaksanaan anggaran sebagaimana tertuang di dalam DPA PPKD.
- c. Akuntansi Konsolidator akuntansi yang dilakukan PPKD untuk memungkinkan dibuatnya laporan tingkat Pemda.

Pada kegiatan belajar kelima ini akan dibahas akuntansi untuk pelaksanaan DPA di SKPD dan DPA SKPKD selaku SKPD. Sementara itu akuntansi atas pelaksanaan DPA-PPKD dan akuntansi BUD selaku konsolidator seperti yang dimaksud pada alinea di atas akan dibahas pada kegiatan belajar keenam. Penyusunan laporan keuangan gabungan yang akan dilakukan oleh entitas pelaporan akan dibahas di kegiatan belajar ketujuh.

Sebagai entitas akuntansi, SKPD harus menyusun laporan keuangan. Menurut pasal 5 ayat 2 PP 8 tahun 2006 Laporan keuangan SKPD setidaknya terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

## **B. Hubungan antara SKPD dan SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah**

Praktek realisasi APBD telah dilandasi azas bruto. Penerimaan SKPD tidak dapat digunakan langsung oleh SKPD untuk belanja. Azas ini mengharuskan seluruh penerimaan uang disetorkan ke Kas Negara atau Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari Kas Negara/Kas Daerah baik dengan mekanisme pembayaran langsung dari kasda (mekanisme LS) atau dengan melalui mekanisme uang persediaan /UP.

Mekanisme di atas akan menimbulkan masalah akuntansi yang dilakukan oleh SKPKD pada waktu menerima kas atas penerimaan SKPD dan pengeluar uang dari kasda untuk belanja yang dianggarkan oleh SKPD Untuk tujuan akuntansi, hubungan antara berbagai SKPD dan SKPKD selaku BUD dapat dipandang sebagai :

- a. Hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. BUD diperlakukan sebagai kantor pusat, sementara itu SKPD-SKPD diperlakukan sebagai Cabang.
- b. Hubungan antara dua entitas yang terpisah, sehingga SKPD/Satker pengguna anggaran dianggap entitas yang terpisah dengan BUD. Wujud hubungan ini terlihat dari dimunculkannya hubungan hutang piutang antara SKPD dengan BUD.

Hubungan kantor pusat dan cabang yang diaplikasikan pada akuntansi di SKPD dan SKPKD-BUD ini dapat dilihat dengan disediakannya akun RK PPKD di seluruh SKPD. Sementara itu di **SKPKD-BUD** disediakan akun RK SKPD. Untuk satu SKPD di kabupaten/kota disediakan satu akun RK SKPD. Misalnya dalam Kabupaten ABC terdapat SKPD Dinas Pendidikan dan SKPD Dinas Kesehatan dan seterusnya, maka di pembukuan SKPKD-BUD akan terdapat akun RK-SKPD Dinas Pendidikan dan RK SKPD Dinas Kesehatan, dan seterusnya.

Pembahasan akuntansi dalam buku ini akan menggunakan pendekatan hubungan kantor pusat-cabang dalam menjelaskan akuntansi di SKPD dan SKPKD selaku PPKD/BUD.

### C. Akuntansi Belanja SKPD

Belanja dapat dianggarkan oleh SKPD dan SKPKD selaku PPKD/BUD. Misalkan pasal 49 ayat 1 Permendagri 13 tahun 2006 mengatakan bahwa belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pasal 49 ayat 2 mengatakan bahwa belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung tertentu (belanja pegawai) dianggarkan oleh SKPD sementara belanja tidak langsung lainnya (pasal 37 huruf b s.d. h) dianggarkan oleh SKPKD selaku PPKD (BUD).

Akuntansi **pusat-cabang** sebagaimana telah disinggung di atas berlaku untuk transaksi aliran kas sebagai berikut :

- a. Aliran kas keluar dari Kasda ke SKPD (pengeluaran UP/GU/TU)
- b. Aliran kas keluar dari Kasda ke rekanan untuk membayar kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD
- c. Aliran kas masuk dari SKPD ke Kasda
- d. Aliran kas masuk ke Kasda untuk pendapatan yang dianggarkan oleh SKPD

Berikut ini diberikan ilustrasi akuntansi oleh SKPD dan BUD terkait dengan penerapan hubungan antara SKPD dan BUD sebagai berikut :

- a. Akuntansi Uang Persediaan

Akuntansi atas uang persediaan meliputi akuntansi saat diterimanya SP2D UP (BUD mentransfer uang ke SKPD), pembayaran oleh Bendahara SKPD dengan menggunakan UP, penggantian dan pertanggungjawaban penggunaan UP, dan penyetoran sisa UP (pada akhir tahun anggaran).

- 1) Pembentukan UP

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Uang persediaan ditransfer langsung dari Kasda ke rekening Bendahara pengeluaran. Transaksi ini akan berpengaruh pada bertambahnya kas di Bendahara Pengeluaran oleh karena itu akun "Kas di Bendahara Pengeluaran" di debit. Sementara itu, akun yang di kredit adalah RK-PPKD. Misalkan SKPD Dinas Pendidikan menerima transfer uang untuk membentuk UP (uang persediaan/uang muka kerja) dari Kasda sebesar Rp.10.000.000,00 bulan awal Januari 2009. Jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Pendidikan adalah :

	Akun	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.000.000	
	RK-PPKD		10.000.000

BUD akan membuat jurnal yang mendebit akun RK-SKPD Dinas Pendidikan dan mengkredit akun Kas di Kasda sebesar Rp.10.000.000,00. Jurnal BUD akan dibahas pada kegiatan belajar keenam

## 2) SKPD membayar dengan UP

Jika UP digunakan untuk membayar belanja maka pengaruh transaksi ini adalah akun Belanja di debit, sementara itu uang kas yang ada di Bendahara Pengeluaran berkurang sehingga akun Kas di Bendahara Pengeluaran di kredit. Misalkan SKPD Dinas Pendidikan membayar pembelian ATK sebesar Rp.8.000.000,00 maka jurnal yang dibuat oleh SKPD dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

	Akun	Debit	Kredit
	Belanja ATK	8.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		8.000.000

Jurnal ini dilakukan oleh petugas akuntansi setelah Surat Pertanggungjawaban Bendahara disetujui.

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut/potong pajak (wapu) harus memotong/memungut PPN dan PPh untuk belanja dengan jumlah tertentu yang menurut peraturan harus dikenai pajak. Misalkan dari contoh belanja ATK tersebut, bendahara memungut PPN sebesar Rp 800.000,00 dan memotong PPh sebesar Rp120.000,00, maka jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Pendidikan adalah:

	Akun	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Pengeluaran	820.000	
	Utang PPN dan PPh		800.000
	Utang PPh		120.000

Jika potongan/pungutan pajak pusat tersebut disetorkan ke Kas Negara, maka jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Kesehatan adalah dengan mendebit Utang PPN dan PPh sebesar Rp.820.000,00 dan mengkredit akun Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.820.000,00.

### 3) SKPD menerima penggantian UP

Misalkan pengeluaran UP yang dipertanggungjawabkan dan dimintakan pengantiannya sebesar Rp.8.000.000,00. Selanjutnya, setelah melalui proses pengajuan SPP GU (disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD) dan ditindaklanjuti dengan SPM GU (disampaikan oleh SKPD ke BUD), Dinas Pendidikan menerima SP2D GU (dari kuasa BUD) sebesar Rp.8.000.000,00, maka jurnal yang dibuat adalah:

	Akun	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.000.000	
	RK-PPKD		8.000.000

Jika diperhatikan jurnal pada angka 1) s.d. 3) di atas, akun Kas di Bendahara Pengeluaran saldonya akan naik pada waktu menerima UP dan akan turun pada waktu UP digunakan. Cara ini lazim disebut metode fluktuatif. Ada cara alternative yaitu pencatatan hanya dilakukan pada waktu pembentukan dan pada waktu menerima SP2D GU. Pada waktu menerima SP2D GU, petugas akuntansi akan mencatat dengan mendebit belanja dan mengkredit RK-PPKD sebesar Rp.8.000.000,00.

4) Bendahara Pengeluaran SKPD menyetor sisa Uang Persediaan

Jika pada akhir tahun masih ada sisa uang persediaan (UP), sisa UP tersebut harus disetorkan kembali ke Kasda setelah tahun anggaran berjalan berakhir, biasanya paling telambat pada akhir tahun anggaran.

Menurut sudut pandang SKPD, jika terjadi penyetoran uang sisa UP, berarti uang yang ada di Bendahara Pengeluaran berkurang sehingga akun Kas di Bendahara Pengeluaran dikredit sebesar setoran. Semnetara kepentingan BUD di SKPD Dinas Kesehatan berkurang sehingga akun RK-PPKD didebit. Misalkan pada 30 Desember 2009, bendahara pengeluaran SKPD menyetorkan setoran sisa UP sebesar Rp.1.500.000,00, maka berdasarkan STS (surat tanda setor) penyetoran sisa UP tersebut, dibuat jurnal SKPD Dinas Pendidikan sebagai berikut :

	Akun	Debit	Kredit
	RK-PPKD	1.500.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.500.000

BUD akan mendebit akun Kas di Kasda dan mengkredit akun RK-SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp.1.500.000,00.

b. Akuntansi untuk pembayaran dari dana TU (Tambah Uang)

Apabila di dalam suatu bulan terdapat kegiatan yang membutuhkan pembayaran jumlah belanja cukup besar dan jumlah UP dianggap

tidak memadai, maka SKPD dapat mengajukan tambahan uang persediaan (TU). Untuk itu, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP TU kepada PA/KPA melalui PPK SKPD untuk diverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila persyaratan pengajuan TU telah dipenuhi, PPK SKPD menyiapkan SPM TU untuk ditandatangani oleh PA/KPA. SPM TU kemudian diajukan ke BUD, dan apabila persyaratan telah terpenuhi, kuasa BUD menerbitkan SP2D TU. Perbedaan utama antara UP dengan TU terletak pada ada tidaknya penggantian dana. Pada UP, jika UP telah hampir habis, SKPD dapat meminta penggantian uang, tetapi pada Tambahan Uang (TU), penggantian ini tidak ada oleh karena itu akuntansi untuk TU hanya terdiri dari akuntansi waktu menerima TU dan akuntansi untuk menyetorkan sisa TU. Sementara itu akuntansi untuk penggantian dana tidak ada dalam TU.

c. Akuntansi untuk pembayaran langsung

Dalam pelaksanaan APBD diatur mekanisme pembayaran. Lazimnya diatur mengenai jenis belanja apa dan/atau pada jumlah berapa pembayaran belanja itu harus dilakukan secara langsung oleh BUD kepada rekanan/penyedia barang dan jasa (mekanisme pembayaran langsung/LS) dan yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran. Belanja yang biasanya dibayar secara LS adalah belanja tidak langsung seperti belanja gaji dan tunjangan, belanja subsidi, belanja bunga utang dan belanja tidak langsung lainnya. Di samping itu, belanja langsung tertentu seperti belanja modal dan/atau belanja langsung lainnya yang jumlahnya relatif besar (diatur dengan peraturan kepala daerah) harus dibayar secara LS. Setiap pembayaran tentu diawali dengan pengajuan SPP–SPM dan akhirnya diterbitkan SP2D.

Misalkan, Dinas Pendidikan menerima SP2D LS untuk belanja modal komputer sebesar Rp 55.000.000,00, jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Pendidikan adalah:

1). Jurnal Dinas Kesehatan

	Akun	Debit	Kredit
	Belanja Modal Komputer	55.000.000	
	RK-PPKD		55.000.000

Jika jurnal yang dibuat hanya realisasi anggaran di atas, maka computer yang dibeli belum tercatat dalam akuntansi. Bertambahnya aset tetap dan bertambahnya ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap, maka perlu ada jurnal koralari sebagai berikut :

	Akun	Debit	Kredit
	Aset tetap	55.000.000	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		55.000.000

BUD mencatat mengalirnya uang kas dari Kas di kasda dengan mendebit akun RK-SKPD Dinas Pendidikan didebit dan akun Kas di Kasda dikredit sebesar Rp.55.000.000,00.

**D. Akuntansi pendapatan SKPD.**

Terdapat jenis pendapatan yang pemungutannya menjadi kewenangan suatu SKPD dan terdapat pula jenis pendapatan yang menjadi kewenangan SKPKD untuk memungutnya.

Pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD terdiri dari kelompok pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD selaku SKPD dan kelompok pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD selaku PPKD. Pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD selaku PPKD terdiri dari Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah (Pasal 123 Permendagri 13 tahun 2005)

Sementara itu Pasal 30 ayat 2 Permendagri No. 13 tahun 2006 mengatakan bahwa retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau

pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang di bawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Sehubungan dengan adanya pembagian wewenang dalam memungut pendapatan daerah tersebut, untuk mencatat dengan tepat transaksi penerimaan pendapatan, **pertama kali yang harus diketahui adalah SKPD yang berwewenang untuk menerima jenis pendapatan tersebut.** Dengan mengetahui SKPD yang menganggarkan penerimaan pendapatan tersebut, kita akan dapat mencatat transaksi tersebut dengan benar.

Berikut ini diberikan ilustransi untuk mencatat pendapatan di SKPD. Misalkan pada bulan Januari 2008 SKPD X menerima retribusi sebesar Rp.15.000.000,00. Kondisi dari penerimaan dan penyetorannya bisa terjadi dengan beberapa asumsi berikut.

**Asumsi (1):**

Pendapatan yang dianggarkan SKPD, diterima oleh bendahara Penerimaan SKPD secara tunai atau di rekening Bendahara Penerimaan di Bank dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

a) Jurnal yang dibuat untuk mencatat penerimaan pendapatan:

	Akun	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerimaan	15.000.000	
	Pendapatan Retribusi		15.000.000

b) Jurnal yang dibuat untuk mencatat penyetoran uang oleh Bendahara **Penerimaan** SKPD ke Kasda

	Akun	Debit	Kredit
	RK-PPKD	15.000.000	
	Kas di Bendahara Penerimaan		15.000.000

Akuntansi atas penerimaan pendapatan ini perlu mendapat perhatian, mengingat menurut standar akuntansi pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu maka pada waktu bendahara penerimaan menerima uang, jika uang tersebut belum disetorkan ke Kasda, maka sebenarnya belum dapat dicatat sebagai pendapatan. Ada beberapa pilihan akuntansi yang dapat dilakukan :

- a). Dibuat jurnal seperti di atas, nanti jika pada akhir tahun ada kas bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kasda, pada ada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian dengan mendebit akun Pendapatan dan mengkredit akun pendapatan yang ditangguhkan.
- b). Transaksi penerima kas oleh bendahara penerimaan, dibuat jurnal oleh petugas akuntansi dengan mendebit Kas di Bendahara Penerimaan dan mengkredit Pendapatan ditangguhkan. Penyetoran uang ke Kasda, oleh petugas akuntansi dibuat dua jurnal. Jurnal pertama mendebit RK-PPKD dan mengkredit Kas di Bendahara Penerimaan. Jurnal kedua mendebit akun Pendapatan ditangguhkan dan mengkredit Pendapatan Retribusi.
- b). Transaksi penerimaan kas oleh bendahara penerimaan tidak dijurnal. Pencatatan pendapatan dilakukan pada waktu bendahara penerimaan telah menyetor uang ke kasda dengan mendebit akun RK-PPKD dan mengkredit akun Pendapatan Retribusi.

**Asumsi (2)**

Pendapatan yang dianggarkan SKPD, disetorkan oleh pihak ketiga langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Jurnal yang dibuat oleh petugas akuntansi adalah:

	Akun	Debit	Kredit
	RK-PPKD	15.000.000	
	Pendapatan Retribusi		15.000.000

Jurnal ini dibuat oleh petugas akuntansi SKPD setelah mendapatkan bukti setor (*copy*) dari penyetor atau dari BUD.

Sedangkan jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk ketiga asumsi di atas adalah sama, yaitu dengan satu jurnal berikut:

	Akun	Debit	Kredit
	Kas di Kasda	15.000.000	
	RK-SKPD X		15.000.000

### E. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran sebagaimana dimaksud adalah akuntansi untuk mencatat anggaran baik anggaran belanja maupun pendapatan. Akan tetapi, apabila pendekatan akuntansi pusat dan cabang yang digunakan, maka SKPD hanya menjurnal realisasi anggarannya, sedangkan jumlah anggarannya itu sendiri sebagaimana tercantum di dalam DPA/DPPA/DPAL, tidak harus dijurnal. Sebagai alternatifnya, jumlah anggaran dapat dicantumkan pada judul akun buku besarnya, seperti contoh berikut ini.

**Nama Rekening** : Gaji Pokok PNS  
**No. Rekening** : 5.1.1.1.01  
**Anggaran** : Rp 1.345.000.000

Tgl.	Uraian	Ref	Mutasi		Saldo	
			Debit	Kredit	Debit	Kredit

### F. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pada bab sebelumnya, telah dibicarakan siklus akuntansi yang antara lain meliputi pencatatan transaksi (realisasi anggaran) ke dalam jurnal, kemudian dari jurnal diposting ke buku besar. Selanjutnya pada akhir tahun SKPD membuat jurnal penyesuaian dan memposting jurnal tersebut ke Buku Besar. Setelah itu disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian tersebut SKPD dapat menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Untuk membahas cara menyusun laporan keuangan di SKPD, berikut ini disajikan neraca saldo setelah penyesuaian akhir tahun 2008 dari SKPD Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten ABC.

**Pemerintah Kabupaten ABC  
Dinas Pendidikan  
Neraca Saldo setelah Penyesuaian  
Per 31 Desember 2009**

Nomor dan nama akun	Saldo	
	Debit	Kredit
1.1.1.3.1-Kas di Bendahara Pengeluaran	5.800.000	0
1.1.4.1.2-Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	15.000.000	0
1.1.4.2.1-Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	5.000.000	0
1.1.5.3.5-Persediaan Obat-obatan	15.000.000	0
1.3.2.2.10-Alat-alat angkutan darat ambulans	275.000.000	0
1.3.1.1.1-Tanah Kantor	5.000.000.000	0
1.3.3.1.3-Gedung Sarana Kesehatan	5.000.000.000	0
1.3.4.05.1-Instalasi Listrik	3.000.000.000	0
1.3.7.1.1-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	1.327.500.000
1.5.1.2.1-Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	135.000.000	0
1.5.1.2.2-Tagihan Ganti Rugi Kekayaan Daerah	45.000.000	0
3.1.1.1.1-SILPA	0	0
3.1.2.1.1-Cadangan Piutang	0	20.000.000
3.1.3.1.1-Cadangan Persediaan	0	15.000.000
3.2.2.1.1-Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0	11.947.500.000
3.2.3.1.1-Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0	180.000.000
3.2.4.1.1-RK-PPKD	0	342.315.642
4.1.4.2.1-Pendapatan Sewa Gedung	0	27.700.000
5.1.1.1.1-Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	40.553.000	0
5.1.1.1.2-Tunjangan Keluarga	8.446.000	0
5.1.1.1.3-Tunjangan Jabatan	5.761.132	0
5.1.1.1.4-Tunjangan Fungsional	4.974.000	0
5.1.1.1.5-Tunjangan Beras	3.350.000	0
5.1.1.1.6-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	731.510	0
5.2.2.1.1-Belanja alat tulis kantor	2.000.000	0
5.2.2.2.4-Belanja bahan obat-obatan	13.000.000	0
5.2.2.5.1-Belanja Jasa Service	1.200.000	0
5.2.2.2.5-Belanja bahan kimia	15.000.000	0
5.2.3.3.10-Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	275.000.000	0
	13.860.015.642	13.860.015.642

Berdasarkan neraca saldo di atas dapat disusun laporan realisasi anggaran dan neraca. Berikut ini diberikan contoh ilustrasi laporan keuangan yang disusun untuk Dinas Pendidikan Pemkab ABC untuk tahun anggaran 2009.

a) Laporan Realisasi Anggaran

LRA SKPD akan berisi informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja. Terkait dengan penyusunan LRA tersebut, satu

hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa terdapat sedikit perbedaan antara struktur belanja di dalam APBD berdasarkan Permendagri 13/2006 dengan SAP. Berdasarkan Permendagri tersebut, belanja dikelompokkan ke dalam kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung, sementara di SAP tidak dikenal pengelompokan seperti itu. Sementara itu, penyusunan LRA harus mengacu kepada format SAP. Sebagai solusinya adalah bahwa setelah dibuat LRA dengan format anggaran berdasarkan Permendagri tersebut, kemudian dilakukan konversi ke format LRA berdasarkan SAP. Proses konversi tersebut secara teknis diberikan di dalam Buletin Teknis SAP No. 3.

**Pemerintah Kabupaten ABC  
Dinas Pendidikan  
Laporan Realisasi Anggaran  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2009**

No. Urut	Uraian	Anggaran stlh Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		27.700.000	
	<b>Jumlah</b>			
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai		63.815.642	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		31.200.000	
2.2.3	Belanja Modal		275.000.000	
	<b>Jumlah</b>		370.015.642	
	<b>Surplus / (Defisit)</b>		(342.315.642)	

Setelah kolom jumlah anggaran setelah perubahan diisi (kolom 3), maka jumlah lebih (kurang) pada kolom 5 dapat diisi dengan mengurangi jumlah realisasi (kolom 4) dengan jumlah anggarannya masing-masing (kolom 3).

b) Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat yang dalam hal ini pada tanggal 31 Desember 2009.

**Pemerintah Kabupaten ABC  
Dinas Pendidikan  
Neraca  
Per 31 Desember 2009**

Uraian	Jumlah		Perubahan
	2009	2008	
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
<b>Piutang</b>			
Piutang lain-lain	20.000.000		
<b>Persediaan</b>			
Persediaan Material/Bahan	15.000.000		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>35.000.000</b>		
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	5.000.000.000		
<b>Peralatan dan mesin</b>			
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	275.000.000		
<b>Gedung dan bangunan</b>			
Gedung Kantor	5.000.000.000		
Instalasi Listrik dan Telepon	3.000.000.000		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.327.500.000)		
<b>Jumlah Aset Tetap (nilai buku)</b>	<b>11.947.500.000</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	135.000.000		
Tagihan TGR Daerah	45.000.000		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>180.000.000</b>		
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12.162.500.000</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>			
Defisit	-342315642		
Cadangan Piutang	20.000.000		
Cadangan Persediaan	15.000.000		
<b>Jumlah EDL</b>	<b>-307.315.642</b>		
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>			

Uraian	Jumlah		Perubahan
	2009	2008	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	11.947.500.000		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	180.000.000		
<b>Jumlah EDI</b>	<b>12.127.500.000</b>		
<b>R/K-PPKD</b>	<b>342.315.642</b>		
<b>Jumlah ED</b>	<b>12.162.500.000</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN E. D.</b>	<b>12.162.500.000</b>		

Jika data neraca tahun 2009 masuk kolom yang sesuai maka kolom perubahan (kenaikan/penurunan) dapat dihitung.

c). Catatan atas laporan keuangan

Format Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) diberikan di dalam Lampiran E.XIII Permendagri 13 tahun 2006. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi mengenai tujuan dan landasan hukum penyajian laporan keuangan, kondisi ekonomi makro dan kebijakan keuangan, pencapaian kinerja SKPD, kebijakan akuntansi serta penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan dan informasi non keuangan. Berikut ini disajikan contoh format dari CaLK.

**Pemerintah Kabupaten ABC**  
**Dinas Pendidikan**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2009**

---

Bab I	Pendahuluan
1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
2.1	Ekonomi Makro
2.2	Kebijakan keuangan
2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV	Kebijakan akuntansi
4.1	Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
5.1.1	Pendapatan
5.1.2	Belanja
5.1.3	Aset
5.1.4	Kewajiban
5.1.5	Ekuitas Dana
5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab VII	Penutup

## G. SOAL LATIHAN

Berikut ini disajikan data saldo awal aset, kewajiban, serta ekuitas dana pada awal tahun 2008. Disamping itu juga disajikan transaksi selama tahun anggaran 2008 yang terjadi di Kabupaten X sebagai terlihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya ditetapkan bahwa pada akhir tahun informasi sebagai berikut :

- a) Besarnya penyusutan aktiva tetap ditentukan sebesar Rp.1.500.000.000,00
- b) Pada akhir tahun terdapat persediaan obat-obata sebesar Rp.2.000.000,00
- c) Sepuluh persen piutang TGR dan Piutang Penjualan angsuran (aset lain-lain) akan jatuh tempo dalam tahun 2009

Berdasarkan keterangan di atas dan anda diminta untuk menyusun jurnal untuk seluruh SKPD dan BUD yang meliputi :

- a. Jurnal saldo (neraca awal)
- b. Jurnal transaksi tahun 2008 dan jurnal penyesuaian pada akhir tahun

No	Transaksi	Total	SKPKD		SKPD Dinas Kesehatan	SKPD Dinas Pendidikan	SKPD lainnya
			SKPD	PPKD			
1	Uang daerah semua telah disetorkan ke rekening Kas Daerah di Bank Pembangunan daerah sebesar Rp.50.500.000.000,00.	50.500.000.000		50.500.000.000			
2	Dari uang di Kasda tersebut terdapat potongan askes yang harus disetorkan ke PT. Askes sebesar Rp.5.000.000,00	5.000.000		5.000.000			
3	Pemda mempunyai tagihan atas penjualan angsuran Rp.300.000.000,00 dan tagihan tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,00. Masing-masing 10 % jatuh tempo tahun ini	300.000.000	100.000.000		150.000.000	50.000.000	
		200.000.000			50.000.000	150.000.000	
4	Terdapat persediaan obat-obatan sebesar Rp.15.000.000,00	15.000.000			15.000.000		
5	Tanah milik pemda yang digunakan untuk operasional pemda telah ditetapkan nilainya sebesar Rp.34.000.000.000,00	34.000.000.000	10.000.000.000		5.000.000.000	12.000.000.000	7.000.000.000
6	Bangunan yang menjadi milik daerah X telah ditetapkan sebesar Rp.32.000.000,00	32.000.000.000	7.000.000.000		5.000.000.000	8.000.000.000	12.000.000.000
7	Aset berupa jaringan ditetapkan harganya sebesar Rp.10.000.000.000,00	10.000.000.000	1.000.000.000		3.000.000.000	3.500.000.000	2.500.000.000
8	Aset berupa jembatan ditetapkan harganya sebesar Rp.20.000.000.000,00	20.000.000.000					20.000.000.000
	<b>Transaksi dalam tahun berjalan</b>						
1	SKPKD Kabupaten X menerima setoran Pajak hotel sebesar Rp.50.000.000,00	50.000.000	50.000.000				
2	BUD menerbitkan SP2D untuk pemberian UP ke SKPD		10.000.000		7.000.000	9.000.000	6.000.000
3	SKPKD Kabupaten X menerima setoran pajak reklame sebesar Rp.150.000.000,00	150.000.000	150.000.000				
4	BUD Kabupaten X menerima dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp.1.000.000.000,00	1.000.000.000		1.000.000.000			

No	Transaksi	Total	SKPKD		SKPD Dinas Kesehatan	SKPD Dinas Pendidikan	SKPD lainnya
			SKPD	PPKD			
5	BUD Kabupaten X menerima dana bagi hasil sumber daya alam migas dari pemerintah pusat Rp.3.000.000.000,00	3.000.000.000		3.000.000.000			
6	Pemda Kabupaten X menerima bagi hasil sumber daya alam dari propinsi Rp.500.000.000,00	500.000.000		500.000.000			
7	BUD Kabupaten X menerima bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari propinsi Rp.200.000.000,00	200.000.000		200.000.000			
8	BUD Kabupaten X menerima dana alokasi umum dari pemerintah pusat Rp.4.000.000.000,00	4.000.000.000		4.000.000.000			
9	BUD menerbitkan SP2D untuk membayar gaji PNS Daerah						
	ü 5.1.1.01.01 Gaji Pokok	102.765.000	10.276.500		20553000	30829500	41106000
	5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga	21.230.000	2.123.000		4246000	6369000	8492000
	5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan	14.805.660	1.480.566		2961132	4441698	5922264
	5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum	12.870.000	1.287.000		2574000	3861000	5148000
	5.1.1.01.06 Tunjangan Beras	8.750.000	875.000		1750000	2625000	3500000
	5.1.1.01.07 Tunjangan PPh.	1.857.550	185.755		371510	557265	743020
	2.1.1.01.01 Utang PFK-Utang Taspen	10.255.000	1.025.500		2051000	3076500	4102000
	2.1.1.03.01 Utang PFK-Potong PPh.	1.957.550	195.755		391510	587265	783020
	2.1.1.05.01 Utang PFK-Potong Taperum	440.000	44.000		88000	132000	176000
			1.265.255		2530510	3795765	5061020
10	SKPD membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp8.200.000,00 dan dibayar langsung dari Kasda dengan menggunakan UP	8.200.000	3.000.000		2.000.000	1.500.000	1.700.000
11	BUD menerbitkan SP2D LS untuk membeli obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp13.000.000,00 untuk Dinas kesehatan	13.000.000			13.000.000		

No	Transaksi	Total	SKPKD		SKPD Dinas Kesehatan	SKPD Dinas Pendidikan	SKPD lainnya
			SKPD	PPKD			
12	SKPD membayar biaya jasa servis mobil (5.2.2.05.01) dengan uang persediaan sebesar Rp5.500.000,00	5.500.000	1.000.000		1.200.000	1.300.000	2.000.000
13	BUD menerbitkan SP2D LS untuk membeli bahan kimia untuk keperluan melaksanakan kegiatan fogging sebesar Rp15.000.000	15.000.000			15.000.000		
14	BUD menerbitkan SP2D LS untuk membeli mobil ambulan (5.2.3.03.10) yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp275.000.000 sebelum PPN. Pemda memungut sebesar 10% dari nilai mobil tersebut.	275.000.000			275.000.000		
15	BUD menerima pinjaman dana dari pemerintah pusat sebesar Rp.2.000.000.000,00. Dana langsung masuk rekening Kas daerah di Bank Pembangunan Daerah.	2.000.000.000		2.000.000.000			
16	BUD menerima pinjaman dana dari BUMD sebesar Rp.500.000.000,00. Dana langsung masuk rekening Kas daerah di Bank Pembangunan Daerah.	500.000.000		500.000.000			
17	BUD menstransfer uang potongan askes ke PT Askes langsung dar Rekening Kasda sebesar Rp.4.000.000,00	4.000.000		4.000.000			
18	SKPD menerima pendapatan PNBPD:						
	a. Biaya pendaftaran/ujian masuk (4.1.4.12.1 )	45.000.000			20.000.000	25.000.000	
	b. Sewa gedung pertemuan (4.1.4.2.1 )		2.000.000		3.000.000	2.000.000	4.000.000
19	Bendahara Penerimaan menyetor ke Kasda		2.000.000		23.000.000	27.000.000	4.000.000
20	BUD menerbitkan SP2D untuk membayar gaji PNS Daerah						

No	Transaksi	Total	SKPKD		SKPD Dinas Kesehatan	SKPD Dinas Pendidikan	SKPD lainnya
			SKPD	PPKD			
	5.1.1.01.01 Gaji Pokok	100.000.000	10.000.000		20000000	30000000	40000000
	5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga	21.000.000	2.100.000		4200000	6300000	8400000
	5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan	14.000.000	1.400.000		2800000	4200000	5600000
	5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum	12.000.000	1.200.000		2400000	3600000	4800000
	5.1.1.01.06 Tunjangan Beras	8.000.000	800.000		1600000	2400000	3200000
	5.1.1.01.07 Tunjangan PPh.	1.800.000	180.000		360000	540000	720000
		156.800.000	15.680.000		31360000	47040000	62720000
	2.1.1.01.01 Utang PFK-Utang Taspen	9.000.000	900.000		1800000	2700000	3600000
	2.1.1.03.01 Utang PFK-Potong PPh.	1.900.000	190.000		380000	570000	760000
	2.1.1.05.01 Utang PFK-Potong Taperum	400.000	40.000		80000	120000	160000
	4.1.4.1.6 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	2.200.000	1.000.000		700.000	500.000	0
	4.1.4.5.2 TGR Kerugian Barang Daerah	14.000.000	0		4.000.000	10.000.000	0
		27.500.000	2.130.000		6.960.000	13.890.000	4.520.000

## H. Rangkuman

Setiap SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut lazimnya dihasilkan dari suatu proses akuntansi baik secara manual maupun terkomputerisasi. Pelaksanaan akuntansi dapat dilakukan secara sentralisasi ataupun desentralisasi. Apabila akuntansi dilaksanakan secara desentralisasi, maka struktur dari sistem akuntansi terdiri dari sistem akuntansi SKPD, sistem akuntansi BUD, dan sistem akuntansi entitas pelaporan (dilaksanakan oleh PPKD untuk menyusun laporan keuangan gabungan).

SKPD dan BUD harus menyusun laporan keuangan. Untuk SKPD (termasuk SKPKD selaku SKPD laporan yang disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, neraca serta catatan atas laporan keuangan). Sementara itu, BUD harus menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya laporan keuangan dari SKPD-SKPD dan dari BUD akan digabungkan oleh entitas pelaporan (PPKD) menjadi laporan keuangan gabungan di tingkat pemerintah daerah.

Penyelenggaran akuntansi pemerintahan tentunya akan menyesuaikan dengan sifat dari pengelolaan anggaran itu sendiri. SKPD selaku pengguna anggaran tidak dapat secara independen melakukan pembayaran-pembayaran atas belanja kegiatan yang menjadi beban anggarannya. SKPD harus mengajukan permintaan untuk membentuk uang persediaan (uang muka kerja) kepada BUD selaku pengelola Kas Daerah (Kasda) guna membayar belanja-belanja yang sifatnya rutin dan jumlahnya relatif kecil. Sedangkan untuk membayar belanja-belanja tertentu yang jumlahnya relatif besar atau yang tidak boleh dibayar dengan uang persediaan (UP/GU/TU), SKPD harus mengajukan permintaan pembayaran secara langsung kepada BUD (mekanisme LS). Di samping itu, SKPD yang memiliki kewenangan untuk menarik pendapatan daerah harus segera menyetorkan penerimaan pendapatannya ke Kasda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa posisi kas di bendahara pengeluaran dan di bendahara penerimaan SKPD per akhir tahun anggaran (31 Desember) seharusnya nihil, karena sisa uang persediaan harus disetor ke Kasda demikian juga uang kas dari setiap penerimaan pendapatan daerah harus disetor ke

Kasda dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan transaksi timbal-balik antara SKPD dan BUD di atas, salah satu perlakuan akuntansi yang dapat digunakan adalah pendekatan akuntansi pusat dan cabang (*Home Office and Branch Accounting*). Pendekatan ini tercermin dengan munculnya akun RK-SKPD di pembukuan BUD dan akun RK-PPKD di pembukuan SKPD. Dua akun tersebut disebut akun timbal-balik (*reciprocal accounts*) yang akan saling mengelimasi pada saat disusunnya laporan keuangan gabungan di tingkat pemda.

### I. Test Formatif

1. Dalam suatu daerah umumnya terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan satu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sehubungan dengan itu pernyataan berikut ini yang paling tepat adalah :
  - a. Setiap SKPD yang menerima anggaran wajib melakukan akuntansi walaupun tidak perlu menyusun laporan pertanggungjawaban.
  - b. Kegiatan Penerimaan Pajak daerah biasanya dianggarkan oleh Dinas Teknis seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan dan yang sejenis
  - c. Di SKPKD terdapat DPA SKPKD selaku SKPD dan DPA SKPKD selaku BUD
  - d. Penerimaan dana Perimbangan dan Dana Bagi hasil merupakan kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD seperti Dinas Pendidikan, Perhubungan dst.
2. Sehubungan dengan Laporan Keuangan dan penyusunnya pernyataan berikut ini yang tidak tepat adalah :

	Jenis Laporan	SKPD	PPKD (Level Pemda)
a.	Laporan Realisasi Anggaran	Ya	Ya
b.	Neraca	Ya	Ya
c.	Laporan Arus Kas	Ya	Ya
d.	Catatan atas Laporan Keuangan	Ya	Ya

3. Sebagai konsolidator, BUD menerima dan mengeluarkan uang kas yang dianggarkan oleh berbagai SKPD di daerah yang bersangkutan. Kebijakan ini akan memunculkan hubungan antara SKPD dengan BUD. Hubungan ini tertuang dengan adanya akun RK PPKD dan RK SKPD. Sehubungan hal tersebut pernyataan berikut ini yang salah adalah :
  - a. Di Dinas Kesehatan (SKPD Dinas Kesehatan) terdapat akun RK-SKPD Dinas Kesehatan.
  - b. Di SKPKD selaku SKPD terdapat akun RK-SKPD Dinas Kesehatan
  - c. Di SKPKD selaku BUD/PPKD terdapat akun RK-PPKD Dinas Kesehatan
  - d. Baik di Dinas Kesehatan maupun di BUD terdapat akun RK-SKPD Dinas Kesehatan

4. Misalkan SKPD Dinas Pendidikan menerima transfer uang untuk membentuk UP (uang persediaan/uang muka kerja) dari Kasda sebesar Rp.150.000.000,00 bulan awal Januari 2008. Jurnal yang dibuat oleh BUD adalah:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	150.000.000	-
RK-PPKD	-	150.000.000
c. RK-PPKD	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000
d. RK-SKPD Dinas Pendidikan	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000

5. Misalkan SKPD Dinas Kesehatan menerima transfer untuk membentuk UP (uang persediaan/uang muka kerja) dari Kasda sebesar Rp.150.000.000,00 bulan awal Januari 2008. Jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Kesehatan adalah:

a. RK	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	150.000.000	-
RK-PPKD	-	150.000.000
c. Kas di Bendahara Penerimaan	150.000.000	-
RK-PPKD	-	150.000.000
d. Belanja Barang Dan Jasa-ATK	150.000.000	-
RK-PPKD	-	150.000.000

6. SKPD Dinas Pendidikan membayar pembelian ATK sebesar Rp 11.000.000 maka jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Pendidikan adalah

a. Belanja Barang Dan Jasa-ATK	150.000.000	-
RK-PPKD	-	150.000.000
b. Belanja Barang Dan Jasa-ATK	150.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	150.000.000
c. Belanja Barang Dan Jasa-ATK	150.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	150.000.000

d.	Belanja Barang Dan Jasa-ATK	150.000.000	-
	Kas di Kasda	-	150.000.000
7. SKPD membayar pembelian ATK sebesar Rp 11.000.000 dan bendahara memungut PPN sebesar Rp 1.000.000 dan memotong PPh sebesar Rp 150.000 jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Pendidikan untuk mencatat PPN dan PPh tersebut adalah :			
a.	Kas di Bendahara Penerimaan	1.150.000	-
	Hutang PPN Pusat	-	1.000.000
	Hutang PPh	-	150.000
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.150.000	-
	Hutang PPN Pusat	-	1.000.000
	Hutang PPh	-	150.000
c.	RK-PPKD	1.150.000	-
	Hutang PPN Pusat	-	1.000.000
	Hutang PPh	-	150.000
d.	RK-SKPD Dinas Kesehatan	1.150.000	-
	Hutang PPN Pusat	1.000.000	
	Hutang PPh	-	150.000
8. Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kesehatan menyetorkan potongan/pungutan pajak pusat tersebut ke Kas Negara, maka jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Kesehatan adalah :			
a.	Hutang PPN Pusat	150.000	-
	Hutang PPh	1.000.000	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	1.000.000
b.	Hutang PPN Pusat	1.000.000	-
	Hutang PPh	150.000	-
	RK-PPKD	-	1.000.000
c.	Hutang PPN Pusat	1.000.000	-
	Hutang PPh	150.000	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	1.000.000
d.	Hutang ke Pemerintah Pusat	1.150.000	-
	RK-PPKD	-	1.150.000

9. Misalkan Dinas Kesehatan menerima SP2D GU (dari kuasa BUD) sebesar Rp 190.000.000, maka jurnal yang dibuat adalah

a. Kas di Bendahara Pengeluaran	190.000.000	-
Kas di Kasda	-	190.000.000
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	190.000.000	-
Kas di BUD	-	190.000.000
c. Kas di Bendahara Penerimaan	190.000.000	-
RK-PPKD	-	190.000.000
d. Kas di Bendahara Pengeluaran	190.000.000	-
RK-PPKD	-	190.000.000

10. Pada tanggal 30 Desember 2008, bendahara pengeluaran SKPD menyetorkan setoran sisa UP sebesar Rp.5.000.000, maka berdasarkan STS (surat tanda setor) penyetoran sisa UP tersebut akan dijurnal oleh SKPD sebagai berikut:

a. RK PPKD	5.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	5.000.000
b. RK PPKD	5.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	5.000.000
c. Kas di Kasda	5.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	5.000.000
d. RK PPKD	5.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	5.000.000

11. Pada tanggal 30 Desember 2008, bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan menyetorkan setoran sisa UP sebesar Rp.5.000.000, maka berdasarkan STS (surat tanda setor) setoran sisa UP tersebut akan dijurnal oleh BUD sebagai berikut :

a. Kas di Kasda	5.000.000	-
RK-PPKD Dinas Pendidikan	-	5.000.000
b. Kas di Kasda	5.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	5.000.000
c. Kas di Kasda	5.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	5.000.000

d.	Kas di Kasda	5.000.000	-
	RK-SKPD Dinas Pendidikan	-	5.000.000
12. Dinas Kesehatan menerima SP2D LS untuk belanja modal komputer sebesar Rp 44.000.000. BUD memotong PPN Rp.4.000.000,00. Jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Kesehatan untuk realisasi belanja adalah :			
a.	Belanja Modal Komputer	44.000.000	-
	RK-PPKD	-	44.000.000
b.	Belanja Modal Komputer	44.000.000	-
	Kas di Pendahara Pengeluaran	-	44.000.000
c.	Belanja Modal	44.000.000	-
	Hutang PPN	-	4.000.000
	RK-PPKD	-	40.000.000
d.	Belanja Modal	4.000.000	-
	Kas di Pendahara Pengeluaran	-	4.000.000
	Hutang PPN	-	40.000.000
13. BUD menerbitkan SP2D LS untuk belanja modal komputer sebesar Rp.33.000.000 yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan. BUD memotong PPN Rp.4.000.000,00. Jurnal yang dibuat oleh BUD adalah :			
a.	RK-SKPD Dinas Kesehatan	44.000.000	-
	Kas di Kasda	-	44.000.000
	Kas di Kasda	4.000.000	-
	Hutang ke Pemerintah Pusat	-	4.000.000
b.	RK-SKPD Dinas Kesehatan	44.000.000	-
	Kas di Kasda	-	44.000.000
	Kas di Kasda	4.000.000	-
	Hutang PPN Pusat	-	4.000.000
c.	RK-SKPD Dinas Kesehatan	44.000.000	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	44.000.000
	Kas di Kasda	4.000.000	-
	Hutang PPN Pusat	-	4.000.000
d.	RK-SKPD Dinas Kesehatan	44.000.000	-
	Kas di Kasda	-	44.000.000
	Hutang PPN Pusat	-	4.000.000

14. Januari 2008 SKPD X menerima retribusi daerah yaitu uang pendaftaran ujian masuk sebesar Rp.151.000.000,00.

a.	Kas di Bendahara Pengeluaran	115.000.000	-
	Pendapatan Uang Masuk/Pendaftaran	-	115.000.000
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	151.000.000	-
	RK-PPKD	-	151.000.000
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	151.000.000	-
	Pendapatan Uang Masuk/Pendaftaran	-	151.000.000
d.	Kas di Kasda	151.000.000	-
	Pendapatan Uang Masuk/Pendaftaran	-	151.000.000

15. Januari 2008 Bendahara SKPD X menyetorkan uang retribusi daerah yaitu uang pendaftaran ujian masuk sebesar Rp.151.000.000,00.

a.	RK PPKD	151.000.000	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	151.000.000
b.	RK PPKD	151.000.000	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	151.000.000
c.	RK-SKPD	151.000.000	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	151.000.000
d.	RK PPKD	115.000.000	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	115.000.000

## J. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang sesuai kunci}}{\text{Jumlah semua soal}} \times 100\%$$

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

- 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

## **BAB VII**

### **Kegiatan Belajar 6**

#### **AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bagian ini peserta diharapkan mampu :

- a. menjelaskan entitas akuntansi yang ada di pemerintahan daerah
- b. melakukan akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan serta konsolidator
- c. menyusun laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

#### **A. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada SKPKD**

Pada kegiatan belajar kelima telah dijelaskan bahwa struktur dari sistem akuntansi di Pemda yang terdiri dari:

- 1) Akuntansi SKPD (termasuk SKPKD selaku SKPD) yaitu unit entitas akuntansi di seluruh pengguna anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan (Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, dan SKPD lainnya)
- 2) Akuntansi PPKD yaitu unit entitas akuntansi di SKPKD selaku PPKD atas pelaksanaan anggaran sebagaimana tertuang di dalam DPA PPKD.
- 3) Akuntansi Konsolidator yaitu unit entitas pelaporan di SKPKD selaku PPKD untuk melakukan pengkonsolidasian laporan keuangan dari seluruh unit entitas akuntansi.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di pasal 98, dinyatakan bahwa:

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
  - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
  - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak

terduga; dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

SKPKD memiliki dua DPA yaitu, DPA SKPD (DPA SKPKD sebagai SKPD) dan DPA PPKD. Pada kegiatan belajar keenam telah dijelaskan akuntansi SKPD baik yang diselenggarakan oleh SKPD maupun SKPKD selaku SKPD. Pada kegiatan belajar ketujuh ini akan dijelaskan akuntansi di SKPKD selaku PPKD. Akuntansi PPKD ini meliputi akuntansi untuk realisasi DPA-PPKD dan transaksi penerimaan uang ke dan pengeluaran uang dari kas daerah yang dianggarkan oleh seluruh SKPD sebagai penerapan dari azas bruto.

## B. Akuntansi Pendapatan PPKD

Akuntansi pendapatan PPKD meliputi pencatatan atas pendapatan dana perimbangan dan hibah, sebagaimana yang dianggarkan di DPA PPKD. Pendapatan tersebut akan diakui (dijurnal) pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Bukti transaksi yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dapat berupa nota kredit dan/atau rekening koran Kasda. Secara umum jurnal yang dibuat ketika pendapatan tersebut telah diterima adalah:

Nama Rekening/Uraian	Debit	Kredit
Kas di Kasda Pendapatan ....(catat sesuai dengan nama rekeningnya)	xxx	xxx

Dengan diterimanya pendapatan, berarti aset berupa kas bertambah dan ekuitas dana otomatis bertambah pula. Akan tetapi, bertambahnya ekuitas dana akan dicatat melalui rekening perantara yaitu rekening pendapatan. Di dalam kaidah penjurnalan, sebagaimana telah dijelaskan di kegiatan belajar sebelumnya, bila aset bertambah rekening aset akan di debit, dalam hal ini yang di debit adalah rekening Kas di Kasda. Sementara itu, bila pendapatan bertambah akan dikredit, dalam hal ini di sisi kredit pada rekening pendapatan yang bersangkutan, misalnya Pendapatan DAU, Pendapatan DAK, dan seterusnya.

### Contoh 1-Pendapatan DAU

Misalkan pada tanggal 28 Februari 2009, Kabupaten ABC menerima transfer Dana Alokasi Umum sebesar Rp.250.000.000,00 maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Transaksi	Akun	Debit (Rp.000)	Kredit (Rp.000)
28 Februari	Menerima transfer DAU sebesar Rp.250.000.000,00	1.1.1.01.01 Kas di Kasda 4.2.2.01.01 Pendapatan Daper-DAU	250.000	250.000
15 April	Menerima transfer DAK sebesar Rp.100.000.000,00	1.1.1.01.01 Kas di Kasda 4.2.3.01.01 Pendapatan Daper-DAK	100.000	100.000
17 April	menerima transfer dana Bagi Hasil PBB Rp.500.000.000,00 dan BPHTB sebesar Rp. 100.000.000,00	1.1.1.01.01 Kas di Kasda 4.2.1.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil BPHTB	600.000	500.000 100.000
12 Mei	Membalikan Pendapatan Bagi Hasil PBB tahun yang lalu sebesar Rp.26.000.000,00.	4.2.1.01.01 Pendapatan BH PBB 1.1.1.01.01 Kas di Kasda	26.000	26.000

Jadwal transfer dan persyaratannya diatur oleh kementerian keuangan. DAU bulan Januari umumnya ditransfer pada hari kerja pertama tahun itu, untuk bulan berikutnya dalam suatu tahun akan ditransfer satu hari kerja sebelum bulan yang bersangkutan. Dana alokasi khusus ditransfer oleh DJPK ke Rekening Kas Umum Daerah dengan beberapa persyaratan. Transfer dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebesar 30 % dari pagu anggaran setelah DJPK menerima perda APBD tahun yang berjalan, Laporan Penyerapan DAK tahun lalu, Pernyataan tersedia dana pendamping. Jika penyerapan tahap pertama telah mencapai 90 % atau lebih, daerah dapat mengajukan pencairan DAK tahap berikutnya. Aturan tersebut dapat berubah sesuai perkembangan.

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa jurnal BUD pada waktu menerima transfer adalah mendebit Kas di Kasda. Sementara itu rekening yang dikredit adalah nama jenis pendapatan yang bersangkutan. Pengembalian pendapatan ini akan mengakibatkan uang kas daerah

berkurang sehingga akun “Kas di Kasda” harus dikredit. Sementara itu pengembalian ini bersifat biasa dan dapat berulang sehingga berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengembalian ini akan diperlakukan sebagai pengurang dari pendapatan yang bersangkutan.

### C. Akuntansi Belanja PPKD

Belanja yang dibayar oleh PPKD umumnya dilakukan dengan LS. Jika terjadi pembayaran belanja, maka sudah terjadi belanja sehingga akun dari masing-masing jenis belanja didebit. Sementara itu yang dikredit adalah rekening/akun “Kas di Kasda” karena memang uang kas di Kasda berkurang. Secara umum jurnal yang dibuat ketika belanja tersebut telah dibayarkan adalah:

Nama Rekening/Uraian	Debit	Kredit
Belanja ...(catat sesuai dengan nama rekeningnya) Kas di Kasda	Xxx	Xxx

Untuk membuat jurnal dengan benar perlu dilakukan analisis atas setiap transaksi pembayaran belanja dan ditentukan pengaruhnya terhadap aset, kewajiban serta jenis belanja tertentu dan kemudian ditentukan nama akun / rekening yang didebit dan akan dikredit. Berikut ini diberikan tabel yang berisi transaksi dana analisisnya.

#### Contoh 1-Belanja Subsidi ke Perusahaan

Pada tanggal 5 Maret BUD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran subsidi ke Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.100.000.000,00.

Tanggal	Transaksi	Pengaruhnya terhadap aset, kewajiban dan belanja	Akun yang akan didebit atau dikredit
5 Maret	Pembayaran subsidi untuk tahun 2009 kepada PDAM sebesar Rp.100.000.000,00.	Belanja subsidi tahun 2009 bertambah sebesar Rp.100 juta	Akun no 5.1.3.01.01 Belanja Subsidi ke Perusahaan didebit sebesar Rp.100 juta
		Uang kas di Kasda berkurang Rp.100 juta	Akun no 1.1.1.01.01 Kas di Kasda dikredit Rp.100 jt

Berdasarkan analisis di atas maka dibuat jurnal yang mendebit Belanja Subsidi ke Perusahaan sebesar Rp.100.000.000,00 dan mengkredit akun "Kas di Kasda" sebesar Rp.100.000.000,00 sebagai berikut :

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2009 Maret 5	5.1.3.01.01 Belanja Subsidi ke Perusahaan	100.000.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		100.000.000

Selanjutnya jurnal di atas diposting ke akun 5.1.3.01.01 Belanja Subsidi ke Perusahaan sisi debit dan akun nomor 1.1.1.01.01 Kas di Kasda sisi kredit.

Berikut ini diberikan beberapa contoh transaksi pembayaran belanja lainnya disertai dengan jurnal yang harus dibuat .

#### Contoh 2-Belanja Transfer ke Desa

Pada tanggal 16 Maret 2009 diterbitkan SP2D LS untuk transfer dana sebesar Rp 250.000.000,00 kepada Pemerintah Desa sebagai bagian dari Dana Alokasi Desa (DAD).

Tanggal	Transaksi	Pengaruhnya terhadap aset, kewajiban dan belanja	Akun yang akan didebit atau dikredit
16 Maret	Diterbitkan SP2D LS untuk transfer dana sebesar Rp 250.000.000,00 kepada Pemerintah Desa sebagai bagian dari Dana Alokasi Desa (DAD).	Belanja subsidi ke pemerintah desa tahun 2009 bertambah sebesar Rp.250 juta	Akun no 5.1.4.03.01 Belanja Subsidi ke desa didebit sebesar Rp.250 juta
		Uang kas di Kasda berkurang Rp.250 juta	Akun no 1.1.1.01.01 Kas di Kasda dikredit Rp.250.000.000

Berdasarkan analisis di atas dibuat jurnal yang mendebit akun nomor 5.1.4.03.01 Belanja Subsidi ke desa sebesar Rp.250.000.000,00 dan mengkredit akun nomor 1.1.1.01.01 Kas di Kasda dikredit Rp.250.000.000 sebagai berikut :

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2008 Maret 16	5.1.4.03.01 Belanja Subsidi ke desa	250.000.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		250.000.000

### Contoh 3-Subsidi ke Partai Politik

Pada 16 April 2009 diterbitkan SP2D LS untuk transfer dana sebesar Rp.400.000.000,00 sebagai dana bantuan untuk Partai Politik.

Tanggal	Transaksi	Pengaruhnya terhadap aset, kewajiban dan belanja	Akun yang akan didebit atau dikredit
16 April	Diterbitkan SP2D LS untuk transfer dana sebesar Rp 400.000.000,00 kepada Partai politik.	Belanja subsidi Belanja Bantuan kepada Partai Politik tahun 2009 bertambah sebesar Rp.400 juta	Akun no 5.1.5.01.01Belanja Bantuan kepada Partai Politik” didebit sebesar Rp.400 juta
		Uang kas di Kasda berkurang Rp.400 juta	Akun no 1.1.1.01.01 Kas di Kasda dikredit Rp.400.000.000

Berdasarkan analisis di atas maka Jurnal yang dibuat oleh PPKD adalah :

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2009 April 16	5.1.5.01.01 Belanja Bantuan kepada Partai Politik	400.000.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		400.000.000

Berdasarkan jurnal tersebut PPKD memposting ke akun Belanja Bantuan ke Partai politik sisi debit dan ke akun Kas di kasda sisi kredit masing-masing sebesar Rp.400.000.000,00

### D. Akuntansi Pembiayaan

Transaksi pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Bukti transaksi atas penerimaan pembiayaan dapat berupa nota kredit dari Bank dan rekening Koran dari bank. Nota debit yang dikirim oleh bank ke PPKD adalah nota yang berisi informasi bahwa bank telah mengkredit rekening kas umum daerah dengan suatu jumlah tertentu.

Transaksi pengeluaran pembiayaan didukung oleh bukti berupa SP2D LS. Berdasarkan bukti-bukti transaksi di atas PPKD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan.

Secara umum jurnal yang dibuat ketika terjadi penerimaan pembiayaan adalah rekening Kas di Kasda di debit dan rekening penerimaan pembiayaan di kredit.

Nama Rekening/Uraian	Debit	Kredit
Kas di Kasda Penerimaan Pembiayaan...(catat sesuai dengan nama rekeningnya)	Xxx	Xxx

Sebaliknya, jurnal yang dibuat ketika terjadi pengeluaran pembiayaan adalah rekening pengeluaran pembiayaan didebit dan rekening Kas di Kasda dikredit.

Nama Rekening/Uraian	Debit	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan ....(catat sesuai dengan nama rekeningnya) Kas di Kasda	Xxx	Xxx

### **Penerimaan Pembiayaan**

Dengan terjadi transaksi penerimaan pembiayaan maka aset berupa kas bertambah dan bertambahnya aset ini bersumber dari kegiatan pembiayaan oleh karena itu pencatatannya adalah akun aset (kas di kasda) didebit dan akun Penerimaan Pembiayaan dikredit. Pencatatan seperti ini baru memfasilitasi penyusunan laporan realisasi anggaran. Untuk tujuan penyusunan neraca, maka perlu analisis berikutnya. Jika penerimaan pembiayaan seperti yang disebut di atas adalah dengan menerbitkan surat hutang, transaksi ini juga mengakibatkan bertambahnya kewajiban pemerintah kepada kreditur (pemegang surat hutang tersebut) oleh karena akun Hutang harus dikredit. Dengan menerima pinjaman, Pemda juga harus menyediakan dana untuk membayar hutang. Sehubungan dengan itu maka PPKD harus mendebit akun "Dana yhd untuk membayar hutang jangka pendek/jangka panjang".

Transaksi penerimaan pembiayaan antara lain, penarikan pinjaman (utang), penjualan investasi atau aset daerah yang dipisahkan (misanya divestasi BUMD), pencairan dana cadangan, penerimaan pembayaran piutang.

**Contoh 1- Penarikan Pinjaman (Penerimaan Pembiayaan)**

Misalkan Pemda ABC menerima dana pinjaman dari Lembaga Perbankan senilai Rp 800.000.000,00. Hutang ini jatuh tempo dalam waktu 5 tahun ke depan. Dari sudut pandang penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transaksi ini merupakan transaksi penerimaan pembiayaan sehingga jurnal yang dibuat adalah :

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2008 Maret	1.1.1.01.01 Kas di Kasda	800.000.000	
	6.1.4.03.01 Pinjaman Pemda ke Lembaga Perbankan		800.000.000

Rekening 6.1.4.03.01 Pinjaman Pemda ke Lembaga Perbankan akan dilaporkan di dalam LRA. Transaksi tersebut juga akan menimbulkan rekening utang yang akan dilaporkan di Neraca. Untuk itu perlu dibuat jurnal korolari berikut:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2008 Maret 27	3.2.4.01.01 Dana yhd untuk pembayaran Hutang JP	800.000.000	
	2.2.1.01.01 Hutang Dalam Negeri Sektor Perbankan		800.000.000

**Contoh 2 - Pelepasan/penjualan investasi jangka panjang (Penerimaan Pembiayaan)**

Misalkan pada tanggal 10 September 2008 Kabupaten ABC mencairkan Deposito (investasi jangka panjang) pada Bank XYZ yang ditempatkan tahun lalu sebesar Rp.500.000.000,00 dan diterima bunga untuk periode terakhir sebesar Rp.25.000.000,00. Transaksi pencairan deposito merupakan transaksi realisasi pembiayaan dan sekaligus transaksi aset. Sementara itu

transaksi penerimaan bunga merupakan transaksi pendapatan (bukan pembiayaan). Transaksi realisasi pembiayaan di jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2008 Sept 10	1.1.1.01.01 Kas di Kasda	500.000.000	
	6.1.2.01.03 Pencairan Deposito		500.000.000

Adapun jurnal korolari yang dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2008 Sept 10	3.2.1.01.01 Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang	500.000.000	
	1.2.1.04.01 Investasi dalam Deposito		500.000.000

Transaksi penerimaan bunga atas deposito tersebut merupakan transaksi pendapatan (bukan pembiayaan), sehingga jurnal yang dibuat untuk mencatat bunga deposito tersebut adalah dengan mendebit rekening Kas di Kasda dan mengkredit rekening Pendapatan Bunga.

Selanjutnya jurnal-jurnal tersebut diposting ke buku besar seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

### **Pengeluaran Pembiayaan**

Jika terjadi transaksi pengeluaran pembiayaan, berarti aset berupa kas di kasda berkurang. Berkurangnya aset ini ada kegunaannya yaitu untuk membiayai suatu kegiatan. Kegiatan yang dibiayai adalah kegiatan pembiayaan. Untuk tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran, maka kegiatan yang didanai ini disediakan satu akun yaitu akun "Pengeluaran Pembiayaan" Akun ini bersaldo normal debit. Contoh transaksi pengeluaran pembiayaan antara lain, pembayaran pokok pinjaman (utang), pembelian investasi atau aset daerah yang dipisahkan (misanya investasi pada BUMD), pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman.

Akuntansi yang dijelaskan di alinia atas baru berguna untuk menyusun laporan realisasi anggaran, sementara itu transaksi ini juga berpengaruh pada

akun neraca, oleh karena itu harus dibuat jurnal korolari (jurnal ikutan) yaitu untuk mencatat pengaruh dari transaksi pembiayaan terhadap akun neraca, seperti aset, utang, dan ekuitas dana.

### Contoh 1-Pembentukan Dana Cadangan (Pengeluaran Pembiayaan)

Misalkan SKPKD selaku PPKD membentuk Dana Cadangan, Rp.600.000.000,00 maka transaksi ini dipandang mengakibatkan kas daerah berkurang oleh karena itu akun Kas di Kasda dikredit Rp. 600.000.000,00. Pengaruh kedua dari transaksi ini adalah timbul pengeluaran pembiayaan Rp.600.000.000,00. Sehubungan dengan itu akun yang didebit adalah "Pembentukan Dana Cadangan". Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi ini adalah :

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2008 Sept. 7	6.2.1.01.01 Pembentukan Dana Cadangan	600.000.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		600.000.000

Jika jurnal tersebut diposting ke buku besar, maka akun Pembentukan Dana Cadangan bersaldo debit dan akun ini akan dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran. Sementara itu walaupun kas di kasda dikredit sebesar Rp.600.000.000,00, normalnya akun Kas di Kasda bersaldo debit dan saldo ini disajikan di neraca.

Pengaruh dari transaksi di atas juga pada akun yang lain yaitu timbulnya Dana Cadangan dan ekuitas dana oleh karena itu agar dapat menyusun neraca PPKD perlu jurnal ikutan berikut ini :

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2009 Sept. 7	1.4.1.01.01 Dana Cadangan	600.000.000	
	3.3.1.01.01 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		600.000.000

### Contoh 2-Penyertaan Modal Pemda (Pengeluaran Pembiayaan)

Misalkan BUD telah menerbitkan SP2D LS untuk mentransfer dana ke Perusahaan Daerah sebesar Rp.700.000.000,00 sebagai tambahan penyertaan modal Pemda di PDAM. Untuk tujuan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transaksi ini dipandang mengakibatkan berkurangnya uang kas di kasda dan kegiatan yang dibiayai dengan berkurangnya kas tersebut adalah kegiatan pembiayaan. Sehubungan dengan itu, transaksi ini akan dicatat oleh bagian akuntansi dengan mengkredit akun Kas di Kasda dan mendebit akun "Pengeluaran Pembiayaan" masing-masing sebesar Rp.700.000.000,00. Jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2009 Maret 20	6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Pemda di BUMD	700.000.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		700.000.000

Akun 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Pemda di BUMD merupakan akun Pengeluaran Pembiayaan yang akan di LRA.

Transaksi ini juga mengakibatkan bertambahnya aset kabupaten/Kota tersebut yaitu berupa Penyertaan Modal Pemda. Untuk itu, di samping jurnal di atas harus dibuat jurnal korolari berikut:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
2009 Maret 20	1.2.2.01.01 Penyertaan Modal Pemda	500.000.000	
	3.2.1.01.01 Diinvestasikan dalam Investasi JP		500.000.000

### E. Akuntansi Konsolidator

Transaksi yang dijelaskan pada angka 2 sampai dengan angka 4 merupakan transaksi realisasi anggaran yang dianggarkan dalam DPA PPKD. Disamping transaksi di atas BUD juga melakukan transaksi penerimaan dan pembayaran kas yang dianggarkan oleh berbagai SKPD. Transaksi-transaksi di atas

adalah penyediaan UP dan penerimaan UP, Penerbitan SP2D LS untuk pembayaran gaji baerbagai SKPD, penerbitan SP2D LS ke rekanan, pengembalian pendapatan yang dianggarkan oleh SKPD. Penerimaan dan pengeluaran kas yang dianggarkan oleh berbagai SKPD tersebut akan dicatat oleh PPKD selaku konsolidator dengan menggunakan akun RK-SKPD. Berikut ini diberikan beberapa contoh transaksi antara PPKD sebagai BUD dengan SKPD.

a. Akuntansi pemberian Uang Persediaan ke dan Penerimaan Kembali dari SKPD

Diterbitkan SP2D UP kepada Dinas Perhubungan senilai Rp.10.000.000,00.

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2008 Jan 10	1.1.9.01.03 RK-SKPD Dinas Perhubungan	10.000.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		10.000.000

Pada tanggal 20 Januari 2008 BUD menerbitkan SP2D GU kepada Dinas Perhubungan senilai Rp 22.000.000,00

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2008 Jan 20	1.1.9.01.03 RK-SKPD Dinas Perhubungan	22.000.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		22.000.000

b. Akuntansi untuk pembayaran belanja yang dianggarkan oleh SKPD langsung dari Kasda

SKPKD selaku PPKD pada tanggal 5 Januari 2009 menerbitkan SP2D pembayaran gaji Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp 1.999.020.000
Tunjangan Keluarga	Rp 174.914.250
Tunjangan Fungsional	Rp 199.902.000
Tunjangan Fungsional Umum	Rp 124.938.750

Dengan Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp 104.480.000,00 dan Tabungan Perumahan Pegawai sebesar Rp 45.150.000,00

Transaksi tersebut dicatat oleh PPKD sebagai berikut :

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2009 Jan 5	1.1.9.01.03 RK-SKPD Dinas Kesehatan	2.498.775.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		2.498.775.000

Potongan yang diterima dicatat sebagai penerimaan sebagai berikut :

2009 Jan 5	1.1.1.01.01 Kas di Kasda	149.630.000	
	2.1.1.01.01 Utang PFK-IWP		104.480.000
	2.1.1.03.01 Utang PFK-Taperum		45.150.000

- c. Pembayaran langsung ke rekanan atas belanja yang dianggarkan oleh SKPD

Pada tanggal 27 Juli 2009 BUD menerbitkan SP2D LS kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp.150.000.000,00 untuk pembelian bahan kimia untuk kegiatan *Fogging*. Dari pembayaran ini, dipungut PPN dan PPH senilai Rp.17.024.000,00

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2009 Juli 5	1.1.9.01.03 RK-SKPD Dinas Kesehatan	150.000.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		150.000.000

Potongan PPN dan PPh dijurnal sebagai berikut :

2009 Juli 5	1.1.1.01.01 Kas di Kasda	17.024.000	
	2.1.3.03.01 Hutang PPN&PPH		17.024.000

- d. Penerimaan pendapatan yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan langsung dari wajib bayar

Pada tanggal 24 Februari 2009 BUD menerima setoran dari Dinas Kesehatan atas retribusi kesehatan senilai Rp 15.000.000,00.

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2009 Feb 24	1.1.1.01.01 Kas di Kasda	15.000.000	
	1.1.9.01.03 RK-SKPD Dinas Kesehatan		15.000.000

- e. Pengembalian pendapatan dianggarkan SKPD

Pada tanggal 29 Januari 2009 BUD melakukan pembayaran atas kelebihan uang pendaftaran mahasiswa/I Akademi Keperawatan untuk tahun 2009. Pembayaran tersebut senilai Rp.35.000.000,00

Tgl	Akun	Debit	Kredit
2009 Jan 29	1.1.9.01.03 RK-SKPD Dinas Kesehatan	35.000.000	
	1.1.1.01.01 Kas di Kasda		35.000.000

## F. Menyusun Laporan Keuangan

Sesuai dengan kegiatan belajar ke empat proses akuntansi di PPKD diawali dengan pencatatan transaksi dalam bukti transaksi seperti Nota kredit dan SP2D dan sebagainya. Bukti transaksi tersebut selanjutnya dicatat di dalam jurnal. Kemudian jurnal tersebut diposting ke buku besar. Jika sampai akhir tahun semua transaksi dan kejadian yang relevan dengan Pemda telah dijurnal dan diposting ke buku besar, maka disusun neraca saldo yang merupakan rekapan dari buku besar. Berdasarkan neraca saldo yang telah disusun laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan BUD sama dengan proses penyusunan laporan keuangan oleh SKPD. Untuk membahas penyusunan laporan keuangan BUD berikut ini disajikan neraca saldo setelah penyesuaian yang ada di BUD Kabupaten ABC:

	Debit	Kredit
1.1.1.1.1-Kas di Kas Daerah	61.037.374.340	0
1.1.9.01.01-RK-SKPD-Dinas Pengelaan Keu Daerah	0	158.092.179
1.1.9.01.02-RK-SKPD Dinas Kesehatan	348.115.642	0
1.1.9.01.03-RK-SKPD Dinas Pendidikan	68.723.463	0
1.1.9.01.04-RK-SKPD Dinas Lainnya	131.331.284	0
2.1.1.1.1-Utang Taspen	0	19.255.000
2.1.1.2.1-Utang Askes	0	1.000.000
2.1.1.3.1-Utang PPh Pusat	0	3.857.550
2.1.1.4.1-Utang PPN Pusat	0	27.500.000
2.1.1.5.1-Utang Taperum	0	840.000
2.2.1.1.1-Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0	500.000.000
2.2.1.3.1-Utang Pemerintah Pusat	0	2.000.000.000
3.1.1-Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0	50.495.000.000
3.2.4.1.1-Dana YHD Untuk Pembayaran Utang Jk Pj.	2.500.000.000	0
4.2.1.1.1-Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	0	1.000.000.000
4.2.1.2.8-Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0	3.000.000.000
4.2.1.2.2-Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	0	500.000.000
4.2.1.1.4-Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor	0	200.000.000
4.2.1.2.3-Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0	0
4.2.2.1.1-Dana Alokasi Umum	0	4.000.000.000
5.1.2.3.3- Belanja Bunga Ke LK Bank	20.000.000	
5.1.5.1.1- Belanja Bantuan kepada Partai Politik	300.000.000	
6.1.4.1.2-Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah	0	2.000.000.000
6.1.4.3.3 Penerimaan Pinjaman dari LK Bank		500.000.000
6.1.4.5.1-Penerimaan Pinjaman dari BUMD	0	0
6.2.1.1.1-Pembayaran utang ke pemerintah pusat	0	0
	64.405.544.729	64.405.544.729

## Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan neraca saldo di atas dapat disusun Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN ABC**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009**

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>			
	Dana Bagi Hasil			
	Dana Bagi Hasil Pajak		1.000.000.000	
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA		3.500.000.000	
	Dana Alokasi Umum		4.000.000.000	
	Dana Alokasi Khusus		0	
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		200.000.000	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>8.700.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai		0	
2.1.2	Belanja Bunga		20.000.000	
2.1.3	Belanja subsidi		300.000.000	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>		0	
	<b>Jumlah Belanja</b>		<b>320.000.000</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>8.380.000.000</b>	
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		2.500.000.000	
	<b>Jumlah Penerimaan pembiayaan</b>		<b>2.500.000.000</b>	
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>		0	
	<b>Jumlah Pengeluaran pembiayaan</b>		<b>0</b>	
	<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>2.500.000.000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		<b>10.880.000.000</b>	

Jika data anggaran dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, maka kolom selisih lebih atau kurang dapat diisikan. Dari LRA di atas terlihat ada SILPA, tapi perlu dicatat bahwa SILPA ini belum termasuk surplus atau defisit dari masing-masing SKPD karena pendapatan dan belanja yang dilaporkan di LRA PPKD ini adalah hanya pendapatan dan belanja yang dianggarkan di DPA PPKD.

**a. Neraca**

Neraca saldo tersebut juga dapat disusun neraca sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN ABC**

**NERACA PPKD**

**Per 31 Desember 2009**

<b>ASET</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>ASET LANCAR</b>		
<b>Kas</b>		
Kas di Kas Daerah	61.037.374.340	5.500.000.000
<b>RK-SKPD-Dinas PKD</b>	-158.092.179	0
<b>RK-SKPD-Dinas Kesehatan</b>	348.115.642	0
<b>RK-SKPD-Dinas Pendidikan</b>	68.723.463	0
<b>RK-SKPD-Dinas Lainnya</b>	131.331.284	0
<b>JUMLAH ASET</b>	61.427.452.550	5.500.000.000
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	52.452.550	5.000.000
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
Utang Dalam Negeri	2.500.000.000	0
<b>Jumlah</b>	2.552.452.550	0
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
SILPA	61.375.000.000	5.495.000.000
Dana yang Harus Disediakan untuk	0	0
<b>Jumlah</b>	61.375.000.000	5.000.000
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jk Panjang	-2.500.000.000	0
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>	0	0
<b>Jumlah</b>	58.875.000.000	5.495.000.000
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EK. DANA</b>	61.427.452.550	5.500.000.000

### b. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) yang harus disusun adalah bukan dalam rangka pelaksanaan DPA SKPD maupun DPA PPKD, melainkan untuk menggambarkan arus kas masuk dan keluar secara keseluruhan di tingkat Pemda dalam rangka pelaksanaan APBD, termasuk arus kas non anggaran. Laporan arus kas akan menjelaskan perubahan saldo kas yang dilaporkan di Neraca. Oleh karena itu, saldo akhir kas di Neraca harus sama dengan saldo akhir kas berdasarkan LAK.

### c. Catatan atas Laporan Keuangan

Cara menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan di PPKD sama dengan penyusunan di SKPD sehingga pada bagian ini tidak dijelaskan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

## G. Soal Latihan

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama tahun 2009 di BUD

No.Tgl	Transaksi	Nilai Transaksi
1	Uang daerah semua telah disetorkan ke rekening Kas Daerah di Bank Pembangunan daerah sebesar Rp.50.500.000.000,00.	
2	Dari uang di Kasda tersebut terdapat potongan askes yang harus disetorkan ke PT. Askes sebesar Rp.5.000.000,00	
	<b>Transaksi dalam tahun berjalan</b>	
1	BUD menerbitkan SP2D untuk pemberian UP ke SKPD-Dinas Pendidikan	10.000.000
2	BUD Kabupaten X menerima dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp.1.000.000.000,00	1.000.000.000
3	BUD Kabupaten X menerima dana bagi hasil sumber daya alam migas dari pemerintah pusat Rp.3.000.000.000,00	3.000.000.000
4	Pemda Kabupaten X menerima bagi hasil sumber daya alam dari propinsi Rp.500.000.000,00	500.000.000
5	BUD Kabupaten X menerima bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari propinsi Rp.200.000.000,00	200.000.000
6	BUD Kabupaten X menerima dana alokasi umum dari pemerintah pusat Rp.4.000.000.000,00	4.000.000.000
7	BUD menerbitkan SP2D untuk membayar gaji PNS Daerah yang dianggarkan oleh SKPD Dinas Pendidikan	
	ü 5.1.1.01.01 Gaji Pokok	102.765.000
	5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga	21.230.000
	5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan	14.805.660
	5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum	12.870.000
	5.1.1.01.06 Tunjangan Beras	8.750.000
	5.1.1.01.07 Tunjangan PPh.	1.857.550
	Potongan :	

No.Tgl	Transaksi	Nilai Transaksi
	2.1.1.01.01 Utang PFK-Utang Taspen	10.255.000
	2.1.1.03.01 Utang PFK-Potongan PPh.	1.957.550
	2.1.1.05.01 Utang PFK-Potongan Taperum	440.000
8	BUD menerbitkan SP2D LS untuk membeli obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp13.000.000,00 untuk Dinas kesehatan	13.000.000
9	BUD menerbitkan SP2D LS untuk membeli bahan kimia untuk keperluan melaksanakan kegiatan fogging sebesar Rp15.000.000 yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan	15.000.000
10	BUD menerbitkan SP2D LS untuk membeli mobil ambulance (5.2.3.03.10) yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp275.000.000 sebelum PPN. Pemda memungut sebesar 10% dari nilai mobil tersebut. Kegiatan ini dianggarkan Dinas Kesehatan	275.000.000
11	BUD menerima pinjaman dana dari pemerintah pusat sebesar Rp.2.000.000.000,00. Dana langsung masuk rekening Kas daerah di Bank Pembangunan Daerah.	2.000.000.000
12	BUD menerima pinjaman dana dari BUMD sebesar Rp.500.000.000,00. Dana langsung masuk rekening Kas daerah di Bank Pembangunan Daerah.	500.000.000
13	BUD menstransfer uang potongan askes ke PT Askes langsung dari Rekening Kasda sebesar Rp.4.000.000,00	4.000.000
14	BUD menerima setoran uang dari Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan ( langsung ke Kasda )	1.500.000
15	BUD menerbitkan SP2D untuk membayar gaji PNS Daerah Dinas Pendidikan	
	ü 5.1.1.01.01 Gaji Pokok	100.000.000
	5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga	21.000.000
	5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan	14.000.000
	5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum	12.000.000
	5.1.1.01.06 Tunjangan Beras	8.000.000
	5.1.1.01.07 Tunjangan PPh.	1.800.000
	Jumlah bruto	156.800.000
	2.1.1.01.01 Utang PFK-Utang Taspen	9.000.000
	2.1.1.03.01 Utang PFK-Potongan PPh.	1.900.000
	2.1.1.05.01 Utang PFK-Potongan Taperum	400.000
	4.1.4.1.6 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	2.200.000
	4.1.4.5.2 TGR Kerugian Barang Daerah	14.000.000
	Jumlah potongan	27.500.000
16	BUD menerbitkan SP2D LS untuk bunga	15.000.000
17	BUD menerbitkan SP2D LS belanja subsidi	20.000.000
18	Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kesehatan menyetero sisa UP sebesar	5.800.000

Berdasarkan data di atas Anda diminta untuk membuat

- Buat Jurnal
- Posting Jurnal tersebut ke Buku Besar
- Susun neraca saldo
- Susun Laporan Keuangan untuk BUD yang terdiri dari LRA dan Neraca

## H. Rangkuman

SKPKD memiliki dua DPA yaitu, DPA SKPD (DPA SKPKD sebagai SKPD) dan DPA PPKD. Akuntansi untuk SKPKD sebagai SKPD tidak ada perbedaan dengan akuntansi di SKPD lainnya, sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Akuntansi PPKD adalah akuntansi dalam rangka pelaksanaan anggaran PPKD sebagaimana tertuang di dalam DPA PPKD.

DPA-PPKD digunakan untuk menampung:

- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Di samping melaksanakan akuntansi atas pelaksanaan DPA PPKD, terdapat juga akuntansi untuk transaksi *reciprocal* (timbang-balik) antara BUD dan SKPD atau yang disebut juga sebagai akuntansi konsolidator. transaksi antara BUD dengan SKPD yang meliputi pembayaran uang persediaan (UP/GU/TU) kepada SKPD dan pembayaran langsung atas beban anggaran SKPD serta penerimaan setoran pendapatan dari SKPD.

Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri dari laporan keuangan SKPKD selaku SKPD dan laporan keuangan PPKD selaku BUD. Di samping itu, SKPKD juga bertugas sebagai entitas pelaporan yang harus menyusun laporan keuangan di tingkat Pemda yang merupakan gabungan (konsolidasian) dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD selaku BUD.

## I. Test Formatif

1. Pada tanggal 31 Maret 2008, Kabupaten ABC menerima transfer Dana Alokasi Umum sebesar Rp.200.000.000,00 maka jurnal yang dibuat adalah:

a.	Kas di Kasda	200.000.000	-
	Pendapatan Dana	-	200.000.000
	Perimbangan-DAU		
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	200.000.000	-
	Pendapatan Dana Perimbangan-DAU	-	200.000.000

c.	Kas di Kasda	200.000.000	-
	Pendapatan Dana Perimbangan-DAK	-	200.000.000
d.	Kas di Kasda	200.000.000	-
	Utang ke Pemerintah Pusat	-	200.000.000

2. Pada tanggal 20 April 2008, Kabupaten ABC menerima transfer Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.150.000.000,00

a.	Kas di Kasda	150.000.000	-
	Pendapatan Dana Perimbangan-DAK	-	150.000.000
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	150.000.000	-
	Pendapatan Dana Perimbangan-DAU	-	150.000.000
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	150.000.000	-
	Pendapatan Dana Perimbangan-DAK	-	150.000.000
d.	Kas di Kasda	150.000.000	-
	Utang ke Pemerintah Pusat	-	150.000.000

3. Pada tanggal 17 April 2008 BPKD menerima transfer dana Bagi Hasil PBB Rp.600.000.000,00 dan BPHTB sebesar Rp. 120.000.000,00.

a.	Kas di Kasda	120.000.000	-
	Pendapatan DBH Pajak	600.000.000	
	Pendapatan DBHI BPHTB		720.000.000
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	720.000.000	-
	Pendapatan Perimbangan-DAU	-	720.000.000
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	720.000.000	-
	Pendapatan DBH Pajak		120.000.000
	Pendapatan DBH BPHTB	-	600.000.000
d.	Kas di Kasda	720.000.000	-
	Pendapatan Bagi Hasil	-	600.000.000
	Pendapatan Bagi Hasil BPHTB		120.000.000

4. Pada tanggal 12 Mei 2009 dilakukan pengembalian Pendapatan Bagi Hasil PBB tahun yang lalu sebesar Rp.25.000.000,00.

a.	Pendapatan DBH PBB	25.000.000	
	Kas di Kasda		25.000.000
b.	Retur Pendapatan DBH PBB	25.000.000	
	Kas di Kasda		25.000.000
c.	Pendapatan asli daerah lainnya	25.000.000	
	Kas di Kasda		25.000.000
d.	Pendapatan tak terduga	25.000.000	
	Kas di Kasda		25.000.000

5. Pada tanggal 5 Maret 2009 BPKD/SKPKD melakukan pembayaran subsidi untuk tahun 2008 kepada PDAM sebesar Rp.100.000.000,00

a.	Investasi ke BUMB	100.000.000	
	Kas di Kasda		100.000.000
b.	Belanja Subsidi ke perusahaan	100.000.000	
	Kas di Kasda		100.000.000
c.	Pengeluaran pembiayaan	100.000.000	
	Kas di Kasda		100.000.000
d.	Belanja Subsidi ke perusahaan	100.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		100.000.000

6. Pada tanggal 6 Maret 2009 dilakukan transfer dana sebesar Rp. 250.000.000,00 kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan jalan desa. Jurnal yang dibuat oleh PPKD adalah :

a.	Investasi ke Desa	250.000.000	
	Kas di Kasda		250.000.000
b.	Belanja Subsidi ke Desa	250.000.000	
	Kas di Kasda		250.000.000
c.	Pengeluaran pembiayaan	250.000.000	
	Kas di Kasda		250.000.000
d.	Belanja Subsidi keDesa	250.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		250.000.000

7. Pada 10 Mei 2009 dilakukan transfer dana sebesar Rp 300.000.000,00 sebagai dana bantuan untuk Partai Politik. Jurnal yang dibuat oleh PPKD adalah :

a.	Investasi ke Partai Politik	300.000.000	
	Kas di Kasda		300.000.000
b.	Belanja Bantuan ke Partai Politik	300.000.000	
	Kas di Kasda		300.000.000
c.	Pengeluaran pembiayaan	300.000.000	
	Kas di Kasda		300.000.000
d.	Belanja Bantuan ke Partai Politik	300.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		300.000.000

8. SKPKD selaku PPKD membentuk Dana Cadangan, Rp.500.000.000,00 dengan cara menyisihkan dana dari kas daerah ke rekening khusus (dana cadangan). Jurnal yang dibuat oleh PPKD **untuk mencatat realisasi anggaran** adalah :

a.	Investas pada dana cadangan	500.000.000	
	Kas di Kasda		500.000.000
b.	Dana Cadangan	500.000.000	
	Kas di Kasda		500.000.000
c.	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000	
	Kas di Kasda		500.000.000
d.	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	500.000.000	
	Kas di Kasda		500.000.000

9. SKPKD selaku PPKD membentuk Dana Cadangan, Rp.500.000.000,00 dengan cara menyisihkan dana dari kas daerah ke rekening khusus (dana cadangan). Jurnal yang dibuat oleh PPKD **untuk mencatat bertambahnya dana cadangan dan ekuitas dana** ( Jurnal korolari/ikutan) adalah :

a.	Dana Cadangan	500.000.000	
	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan		500.000.000

b.	Dana Cadangan	500.000.000	
	Kas di Kasda		500.000.000
c.	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000	
	Diinvestasikan Dalam Dana		500.000.000
	Cadangan		
d.	Diinvestasikan Dalam Dana	500.000.000	
	Cadangan		
	Kas di Kasda		500.000.000

10. SKPKD selaku PPKD telah mentransfer dana ke Perusahaan Daerah sebesar Rp.900.000.000,00 sebagai tambahan penyertaan modal Pemda di PDAM. Jurnal yang dibuat untuk mencatat realisasi anggaran adalah :

a.	Dana Cadangan	900.000.000	
	Diinvestasikan Dalam Dana		900.000.000
	Cadangan		
b.	Penyertaan Modal Pemda di	900.000.000	
	BUMD		
	Kas di Kasda		900.000.000
c.	Penyertaan Modal Pemda di	900.000.000	
	BUMD		
	Diinvestasikan Dalam Dana		900.000.000
	Cadangan		
d.	Diinvestasikan Dalam Dana	900.000.000	
	Cadangan		
	Kas di Kasda		900.000.000

11. SKPKD selaku PPKD telah mentransfer dana ke Perusahaan Daerah sebesar Rp.900.000.000,00 sebagai tambahan penyertaan modal Pemda di PDAM. Jurnal korolari yang dibuat untuk mencatat penambahan aset dan ekuitas dana adalah :

a.	Dana Cadangan	900.000.000	
	Diinvestasikan Dalam Dana		900.000.000
	Cadangan		

b.	Penyertaan Modal Pemda di BUMD	900.000.000	
	Kas di Kasda		900.000.000
c.	Penyertaan Modal Pemda di BUMD	900.000.000	
	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan		900.000.000
d.	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	900.000.000	
	Kas di Kasda		900.000.000

12. Pemda ABC menerima dana pinjaman dari Lembaga Perbankan senilai Rp 800.000.000,00. Jurnal yang dibuat untuk mencatat realisasi anggaran adalah :

a.	Kas di Kasda	800.000.000	
	Pinjaman Pemda ke Lembaga Perbankan (6.1.4.03.01)		800.000.000
b.	Kas di Kasda	800.000.000	
	Hutang Sektor Perbankan		800.000.000
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	800.000.000	
	Pinjaman Pemda ke Lembaga Perbankan (6.1.4.03.01)		800.000.000
d.	Kas di Bendahara Penerimaan	800.000.000	
	Pinjaman Pemda ke Lembaga Perbankan (6.1.4.03.01)		800.000.000

13. Pemda ABC menerima dana pinjaman dari Lembaga Perbankan senilai Rp 800.000.000,00. Jurnal korolari yang dibuat adalah :

a.	Dana yhd untuk pembayaran Hutang JP	800.000.000	
	Pinjaman Pemda ke Lembaga Perbankan (6.1.4.03.01)		800.000.000

b.	Dana yhd untuk pembayaran Hutang JP	800.000.000	
	Kas di Kasda		800.000.000
c.	Kas di Kasda	800.000.000	
	Pinjaman Pemda ke Lembaga Perbankan (6.1.4.03.01)		800.000.000
d.	Dana yhd untuk pembayaran Hutang JP	800.000.000	
	Hutang Dalam Negeri Sektor Perbankan (2.2.1.01.01)		800.000.000

14. Pada tanggal 10 September 2008 Kabupaten ABC mencairkan Deposito (investasi jangka panjang) pada Bank Pembangunan Daerah yang ditempatkan tahun lalu sebesar Rp.500.000.000,00 dan diterima bunga untuk periode terakhir sebesar Rp.25.000.000,00. Jurnal untuk mencatat realisasi anggaran adalah :

a.	Kas di Kasda	525.000.000	
	Pencairan Deposito		500.000.000
	Pendapatan bunga		25.000.000
b.	Kas di Kasda	525.000.000	
	Pendapatan Deposito		525.000.000
c.	Kas di Kasda	525.000.000	
	Diinvestasikan dlm Investasi J. Panjang		500.000.000
	Pendapatan bunga		25.000.000
d.	Kas di Kasda	525.000.000	
	Investasi dalam Deposito		500.000.000
	Pendapatan bunga		25.000.000

15. Pada tanggal 10 September 2008 Kabupaten ABC mencairkan Deposito (investasi jangka panjang) pada Bank Pembangunan Daerah yang ditempatkan tahun lalu sebesar Rp.500.000.000,00 dan diterima bunga untuk periode terakhir sebesar Rp.25.000.000,00. Jurnal korolari untuk mencatat **berkurangnya aset dan ekuitas dana** adalah :

a.	Diinvestasikan dlm Investasi J. Panjang	525.000.000	
	Investasi dalam Deposito		500.000.000
	Pendapatan bunga		25.000.000
b.	Diinvestasikan dlm Investasi J. Panjang	525.000.000	
	Investasi dalam Deposito		525.000.000
c.	Diinvestasikan dlm Investasi J. Panjang	500.000.000	
	Investasi dalam Deposito		500.000.000
d..	Diinvestasikan dlm Investasi J. Panjang	525.000.000	
	Pencairan Deposito		500.000.000
	Pendapatan bunga		25.000.000

## J. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang sesuai kunci}}{\text{Jumlah semua soal}} \times 100\%$$

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

- 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

**BAB VIII**  
**Kegiatan Belajar 7**  
**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN**

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bagian ini peserta harus dapat :

- a. menjelaskan data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah
- b. menggabungkan laporan keuangan dari berbagai SKPD dan BUD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah

**A. Karakteristik Penyusunan Laporan Keuangan Pemda**

PPKD menyusun laporan keuangan tingkat Pemda dengan cara menggabungkan laporan keuangan dari berbagai SKPD dan laporan keuangan hasil pencatatan yang dilakukan PPKD itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 pasal 240 ayat 1. Berikut ini akan dibahas cara PPKD menggabungkan laporan keuangan dari berbagai entitas akuntansi di suatu pemerintah. Untuk membahasnya pertama akan dibahas data yang digunakan oleh PPKD. Kemudian dibahas praktek penggabungan laporan keuangan yang dimulai dari penggabungan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya diilustrasikan penggabungan neraca. Sementara itu Laporan arus kas disusun dari data yang telah dihimpun oleh PPKD karena PPKD tidak mendapatkan laporan arus kas dari berbagai SKPD

**B. Data yang digunakan untuk Menyusun Laporan Keuangan Pemda**

PPKD menerima laporan keuangan dari berbagai SKPD berupa LRA, Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang menjadi bahan dasar penyusunan laporan keuangan level Pemda oleh PPKD. Laporan keuangan dari SKPD telah diverifikasi dan direkonsiliasi dengan BUD. Untuk membahas cara menyusun laporan keuangan gabungan tersebut, berikut ini diberikan contoh dengan asumsi hanya ada dua SKPD yaitu Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sebagai SKPKD dan SKPD X (asumsikan SKPD X adalah gabungan SKPD-SKPD di luar DPKAD). Dengan demikian terdapat tiga buah LRA dan Neraca masing-masing berasal dari laporan keuangan PPKD, DPAKD, dan SKPD X.

Selanjutnya, untuk menyederhanakan ilustrasi, besaran anggaran di LRA belum dimasukkan tetapi hanya realisasinya saja.

**a. Laporan Keuangan SKPD X**

Laporan keuangan yang akan digabungkan/dikonsolidasikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CaLK. Namun di dalam ilustrasi berikut belum mengikutsertakan CaLK. Berikut ini disajikan Laporan Realisasi Anggaran terlebih dahulu, dan selanjutnya disajikan Neraca.

**1). Laporan Realisasi Anggaran**

**KABUPATEN ABC  
SKPD X  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009**

(DALAM RUPIAH )

Nomor Urut	Uraian	Realisasi
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.700.000
	<b>Jumlah</b>	27.700.000
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
2.1.1	Belanja Pegawai	63.815.642
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	
2.2.1	Belanja Pegawai	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000
2.2.3	Belanja Modal	275.000.000
	<b>Jumlah</b>	370.015.642
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	(342.315.642 )

2). Neraca SKPD X

PEMERINTAH KABUPATEN ABC  
SKPD X  
NERACA  
Per 31 Desember Tahun 2009 dan Tahun 2008

( DALAM RUPIAH )

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)
	2009	2008	Jumlah
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
<b>Piutang</b>			
Piutang lain-lain	20.000.000		
<b>Persediaan</b>			
Persediaan Material/Bahan	15.000.000		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>35.000.000</b>		
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	5.000.000.000		
<b>Peralatan dan mesin</b>			
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	275.000.000		
<b>Gedung dan bangunan</b>			
Gedung Kantor	5.000.000.000		
Instalasi Listrik dan Telepon	3.000.000.000		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.327.500.000		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>11.947.500.000</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	135.000.000		
Tagihan TGR Daerah	45.000.000		
<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>	<b>180.000.000</b>		
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12.162.500.000</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>			
SILPA (Defisit)	-342.315.642		
Cadangan Piutang	20.000.000		
Cadangan Persediaan	15.000.000		
<b>Jumlah EDL</b>	<b>-307.315.642</b>		
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	11.947.500.000		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	180.000.000		
<b>Jumlah EDI</b>	<b>12.127.500.000</b>		
<b>REKENING KORAN-PPKD</b>	<b>342.315.642</b>		
<b>Jumlah ED</b>	<b>12.162.500.000</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN E D</b>	<b>12.162.500.000</b>		

**b. Laporan Keuangan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)**

Laporan SKPKD sebagai SKPD adalah Laporan Keuangan DPKAD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CaLK. Berikut ini akan disajikan LRA dan Neraca DPAKD .

**1). Laporan Realisasi Anggaran**

**KABUPATEN ABC  
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009**

( DALAM RUPIAH )

Nomor Urut	Uraian	Realisasi
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	150.000.000
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	50.000.000
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.000.000
	<b>Jumlah</b>	203.000.000
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
2.1.1	Belanja Pegawai	31.907.821
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	
2.2.1	Belanja Pegawai	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000
2.2.3	Belanja Modal	0
	<b>Jumlah</b>	35.907.821
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	167.092.179

## 2). Neraca

**PEMERINTAH KABUPATEN ABC**  
**NERACA**  
**Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Per 31 Desember Tahun 2009 dan Tahun 2008**

Uraian	Jumlah (Rp)		Kenaikan (Penurunan)
	2009	2008	Jumlah
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
<b>Piutang</b>			
Piutang lain-lain	10.000.000		
<b>Persediaan</b>	0		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	10.000.000		
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	10.000.000.000		
<b>Peralatan dan mesin</b>			
<b>Gedung dan bangunan</b>			
Gedung Kantor	7.000.000.000		
Instalasi Listrik dan Telepon	1.000.000.000		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-800.000.000		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	17.200.000.000		
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	90.000.000		
Tagihan TGR Daerah	0		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	90.000.000		
<b>JUMLAH ASET</b>	17.300.000.000		
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	0		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>			
SiLPA (Surplus)	167.092.179		
Cadangan Piutang	10.000.000		
<b>Jumlah EDL</b>	177.092.179		
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	17.200.000.000		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	90.000.000		
<b>Jumlah EDI</b>	17.290.000.000		
<b>REKENING KORAN-PPKD</b>	-167.092.179		
<b>Jumlah ED</b>	17.300.000.000		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN E D</b>	17.300.000.000		

c. Laporan Keuangan PPKD (Laporan Keuangan atas pelaksanaan anggaran/DPA-PPKD)

1). Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN ABC  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009

No Ururt	Uraian	Ang Stlh Prbhan	Realisasi	Lebih (Kurang)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		0	
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>			
1.2.1	Dana Bagi Hasil		1.500.000.000	
1.2.2	Dana Alokasi Umum		6.000.000.000	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus		1.000.000.000	
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		200.000.000	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>8.700.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai		0	
2.1.2	Belanja Bunga		20.000.000	
2.1.3	Belanja subsidi		300.000.000	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>		0	
	<b>Jumlah Belanja</b>		<b>320.000.000</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>8.380.000.000</b>	
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			
3.1.1.	SilPA Awal Tahun		15.560.556.000	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		2.500.000.000	
	<b>Jumlah Penerimaan pembiayaan</b>		<b>18.060.556.000</b>	
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>			
	<b>Jumlah Pengeluaran pembiayaan</b>		-	
	<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>18.060.556.000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		<b>26.440.556.000</b>	

## 2). Neraca PPKD sebagai BUD

**PEMERINTAH KABUPATEN ABC**  
**NERACA PPKD**  
**Per 31 Desember 2009**

ASET	2008
<b>ASET LANCAR</b>	
<b>Kas</b>	
Kas di Kas Daerah	26.317.785.087
<b>RK-DPAKD</b>	-167.092.179
<b>RK-SKPD X</b>	342.315.642
<b>Jumlah Aset</b>	<b>26.493.008.550</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	52.452.550
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	
Utang Dalam Negeri	2.500.000.000
<b>Jumlah Kewajiban</b>	2.552.452.550
<b>EKUITAS DANA</b>	
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	
SILPA	26.440.556.000
Dana yhd Untuk Pembayaran Utang jk Pendek	-
<b>Jumlah EDL</b>	26.440.556.000
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	
Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jk Panjang	-2.500.000.000
<b>Jumlah EDI</b>	-2.500.000.000
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>	-
<b>Jumlah ED</b>	<b>23.940.556.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN ED</b>	<b>26.493.008.550</b>

### C. Menggabungkan Laporan Keuangan

PPKD selanjutnya bertugas menggabungkan Laporan keuangan semua entitas akuntansi menjadi laporan keuangan Pemda dengan menggunakan kertas kerja. Laporan Realisasi Anggaran dari berbagai entitas akuntansi digabung menjadi LRA tingkat Pemda. Neraca dari seluruh entitas akuntansi digabungkan menjadi neraca Pemda. Pembahasan berikut ini diawali dengan penggabungan LRA dan selanjutnya diikuti dengan penggabungan neraca.

### a. Menggabung Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran di tingkat Pemda (Laporan Realisasi APBD) merupakan gabungan dari LRA seluruh entitas akuntansi yaitu LRA seluruh SKPD dan LRA PPKD. LRA SKPD merupakan laporan pelaksanaan DPA SKPD masing-masing sedangkan LRA PPKD merupakan laporan pelaksanaan dari DPA PPKD.

Untuk menggabungkan LRA-LRA tersebut, PPKD selaku entitas akuntansi dan sekaligus entitas pelaporan dapat menggunakan kertas kerja yang terdiri dari beberapa kolom sesuai kebutuhan. Di dalam LRA setiap entitas akuntansi tidak terdapat rekening timbal balik (*reciprocal account*), tidak seperti halnya di Neraca dimana terdapat rekening RK-SKPD di Neraca PPKD dan RK PPKD di neraca SKPD, sehingga proses penggabungan LRA praktis merupakan penggabungan LRA seluruh entitas akuntansi menjadi Laporan Realisasi APBD, tanpa ada rekening yang dieliminasi. Teknik penggabungannya adalah dengan menambahkan saldo pada rekening yang sama diantara LRA-LRA yang ada dan memasukkan angkanya ke kolom saldo gabungan. Sedangkan untuk rekening yang hanya ada pada satu LRA Entitas akuntansi tertentu tentu saja saldonya langsung dimasukkan ke kolom saldo gabungan, sebagai contoh rekening belanja tidak langsung selain belanja pegawai dan rekening-rekening pembiayaan hanya ada di LRA PPKD. Berikut ini diberikan ilustrasi untuk penggabungan LRA PPKD, LRA DPAKD dan LRA SKPD X.

**PEMERINTAH KABUPATEN ABC**  
**KERTAS KERJA PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD**  
**UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009**

No Ururt	Uraian	PPKD	DPAKD	SKPD X	Saldo Gabungan
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah		150.000.000		150.000.000
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah		50.000.000		50.000.000
1.1.3	Pend.hasil peng. kekayaan daerah yang Dipisahkan		-		

No Ururt	Uraian	PPKD	DPAKD	SKPD X	Saldo Gabungan
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		3.000.000	27.700.000	30.700.000
	Jumlah PAD		203.000.000	27.700.000	230.700.000
1.2	Pendapatan Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana Bagi Hasil	1.500.000.000			1.500.000.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	6.000.000.000			6.000.000.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.000.000.000			1.000.000.000
	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	8.500.000.000			8.500.000.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1.3.1	Pendapatan Hibah				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	200.000.000			200.000.000
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	200.000.000			200.000.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	8.700.000.000			8.930.700.000
2	Belanja				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	-	31.907.821	63.815.642	95.723.463
2.1.2	Belanja Bunga	20.000.000			20.000.000
2.1.3	Belanja subsidi	300.000.000			300.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	320.000.000	31.907.821	63.815.642	415.723.463
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	-			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	4.000.000	31.200.000	35.200.000
2.2.3	Belanja Modal	-		275.000.000	275.000.000
	Jumlah Belanja Langsung	-	4.000.000	306.200.000	310.200.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	320.000.000	35.907.821	370.015.642	725.923.463
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	8.380.000.000	167.092.179	(342.315.642 )	8.204.776.537
3.	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1.	SILPA awal tahun	15.560.556.000			15.560.556.000
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.500.000.000			2.500.000.000
	Jumlah Penerimaan pembiayaan	18.060.556.000			18.060.556.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
	Pembiayaan Neto	18.060.556.000			18.060.556.000
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	26.440.556.000	167.092.179	(342.315.642 )	26.265.332.537

Dari kertas kerja di atas selanjutnya dapat disusun Laporan Realisasi APBD (LRA di tingkat Pemda) sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN ABC**  
**LAPORAN REALISASI APBD**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009**

No Ururt	Uraian	Jumlah
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	150.000.000
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	50.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.700.000
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>230.700.000</b>
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Dana Perimbangan</b>	
1.2.1	Dana Bagi Hasil	1.500.000.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	6.000.000.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.000.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan</b>	<b>8.500.000.000</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	200.000.000
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>200.000.000</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8.930.700.000</b>
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
2.1.1	Belanja Pegawai	95.723.463
2.1.2	Belanja Bunga	20.000.000
2.1.3	Belanja subsidi	300.000.000
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>415.723.463</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000
2.2.3	Belanja Modal	275.000.000
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>310.200.000</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>725.923.463</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>8.204.776.537</b>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	0
3.1.1.	SiLPA Awal Tahun	15.560.556.000
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.500.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan pembiayaan</b>	<b>18.060.556.000</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	0
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>18.060.556.000</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>26.265.332.537</b>

Dalam contoh di atas penekanannya terletak pada proses penyusunan laporan realisasi anggaran. Sementara itu kolom anggaran dapat dilengkapi dari data anggaran.

#### b. Menggabungkan Neraca

Neraca Pemda merupakan gabungan neraca dari seluruh entitas akuntansi yaitu neraca seluruh SKPD dan neraca PPKD. Untuk menggabungkan neraca-neraca tersebut, PPKD sebagai entitas akuntansi dan sekaligus entitas pelaporan, dapat menggunakan kertas kerja. Teknik penggabungannya secara umum seperti pada penggabungan LRA di atas kecuali perlu diperhatikan untuk beberapa hal berikut:

1. Untuk rekening timbal balik harus dieliminasi satu dengan lainnya dengan jurnal eliminasi, yaitu rekening RK PPKD di Neraca DPKAD dan SKPD X dieliminasi dengan rekening RK SKPD DPAKD dan RK SKPD X yang keduanya ada di Neraca PPKD. Cara membuat jurnal eliminasi adalah seperti membuat jurnal pembalik, yaitu rekening yang saldonya di debit kemudian di kreditkan dan yang saldonya di kredit kemudian didebetkan, sehingga dengan demikian rekening-rekening timbal balik menjadi tidak ada lagi di neraca gabungan.
2. Saldo SiLPA di neraca PPKD, DPKAD, dan SKPD X belum menunjukkan saldo SiLPA yang sesungguhnya. Adapun saldo SiLPA yang sesungguhnya dapat dilihat di Neraca gabungan dan LRA gabungan. Sehingga, saldo SiLPA di Neraca Gabungan harus sama dengan saldo SiLPA di LRA gabungan. Oleh karena itu, untuk menentukan saldo SiLPA di neraca gabungan caranya adalah dengan menjumlah seluruh kas yang ada di Neraca Pemda baik Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran (yang belum disetor ke Kasda) dan Kas di Bendahara Penerimaan (yang belum disetor ke Kasda) dikurangi dengan uang milik pihak ketiga yang berasal dari utang perhitungan pihak ketiga/utang PFK (contoh utang PFK adalah utang PPN/PPh, utang potongan iuran taspen, askes yang belum disetor oleh Pemda ke pihak ketiga).

Kertas kerja yang digunakan dapat terdiri dari beberapa kolom sesuai kebutuhan. Berikut ini diberikan ilustrasi penyusunan neraca gabungan dengan menggunakan kerja kerja.

**PEMERINTAH KABUPATEN ABC**  
**KERTA KERJA PENYUSUNAN NERACA GABUNGAN (NERACA PEMDA)**  
**PER 31 DESEMBER 2009**

Keterangan	PPKD	DPAKD	SKPD X	Eliminasi		Neraca Gabungan
				Debit	Kredit	
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas di Kasda	26.317.785.087	-	-			26.317.785.087
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-			
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-			
<b>Piutang</b>						
Piutang lain-lain	-	10.000.000	20.000.000			30.000.000
<b>Persediaan</b>						
Persediaan Material/Bahan	-	-	15.000.000			15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>26.317.785.087</b>	<b>10.000.000</b>	<b>35.000.000</b>			<b>26.362.785.087</b>
<b>ASET TETAP</b>						
Tanah	-	10.000.000.000	5.000.000.000			15.000.000.000
<b>Peralatan dan mesin</b>						
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-		275.000.000			275.000.000
<b>Gedung dan bangunan</b>						
Gedung Kantor	-	7.000.000.000	5.000.000.000			12.000.000.000
Instalasi Listrik dan Telepon	-	1.000.000.000	3.000.000.000			4.000.000.000
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-800.000.000	-1.327.500.000			- 2.127.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>17.200.000.000</b>	<b>11.947.500.000</b>			<b>29.147.500.000</b>

Tabel dilanjutkan pada halaman 137

<b>ASET LAINNYA</b>						
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	90.000.000	135.000.000			225.000.000.
Tagihan TGR Daerah	-	-	45.000.000			45.000.000
<b>Jumlah</b>	-	<b>90.000.000</b>	<b>180.000.000</b>			<b>270.000.000</b>
<b>RK-DPAKD</b>	-167.092.179	-	-	-167.092.179		-
<b>RK-SKPD X</b>	342.315.642	-	-		342.315.642	-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>26.493.008.550</b>	<b>17.300.000.000</b>	<b>12.162.500.000</b>			<b>55.780.285.087</b>
<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	52.452.550	-				52.452.550
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
Utang Dalam Negeri	2.500.000.000	-				2.500.000.000
<b>Jumlah utang</b>	<b>2.552.452.550</b>	-				<b>2.552.452.550</b>
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>						
SILPA	26.440.556.000	167.092.179	-342.315.642			26.265.332.537
Cadangan Piutang	-	10.000.000	20.000.000			30.000.000
Cadangan Persediaan	-	-	15.000.000			15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>26.440.556.000</b>	<b>177.092.179</b>	<b>-307.315.642</b>			<b>26.310.332.537</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>						
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		17.200.000.000	11.947.500.000			29.147.500.000
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		90.000.000	180.000.000			270.000.000
Dana YHD untuk Pemb Utang Jk. Panjang	-2.500.000.000	-				-2.500.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>-2.500.000.000</b>	<b>17.290.000.000</b>	<b>12.127.500.000</b>			<b>26.917.500.000</b>
<b>REKENING KORAN-PPKD</b>	-	-167.092.179			167.092.179	
<b>REKENING KORAN-PPKD</b>	-		342.315.642	342.315.642		
<b>Jumlah ED</b>	<b>23.940.556.000</b>	<b>17.300.000.000</b>	<b>12.162.500.000</b>			<b>53.227.832.537</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN E D</b>	<b>26.493.008.550</b>	<b>17.300.000.000</b>	<b>12.162.500.000</b>			<b>55.780.285.087</b>

Berdasarkan kerta kerja di atas, kemudian dapat dapat disusun neraca Pemda seperti berikut ini.

**PEMERINTAH KABUPATEN ABC**  
**NERACA PER 31 DESEMBER 2009**

ASET	JUMLAH
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di Kasda	26.317.785.087
Kas di Bendahara Penerimaan	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-
<b>Piutang</b>	
Piutang lain-lain	30.000.000
<b>Persediaan</b>	
Persediaan Material/Bahan	15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>26.362.785.087</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Tanah	15.000.000.000
<b>Peralatan dan mesin</b>	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	275.000.000
<b>Gedung dan bangunan</b>	
Gedung Kantor	12.000.000.000
Instalasi Listrik dan Telepon	4.000.000.000
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 2.127.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>29.147.500.000</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	225.000.000.
Tagihan TGR Daerah	45.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>270.000.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>55.780.285.087</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	52.452.550
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
Utang Dalam Negeri	2.500.000.000
<b>Jumlah utang</b>	<b>2.552.452.550</b>
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	
SiLPA (Total Kas – Utang Perhitungan Pihak Ketiga)	26.265.332.537
Cadangan Piutang	30.000.000
Cadangan Persediaan	15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>26.310.332.537</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	29.147.500.000
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	270.000.000
Dana YHD untuk Pemb Utang Jk. Panjang	-2.500.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>26.917.500.000</b>
<b>Jumlah ED</b>	<b>53.227.832.537</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN E D</b>	<b>55.780.285.087</b>

Penyusunan Neraca gabungan yang diuraikan pada kegiatan belajar ini lebih menekankan pada proses penyusunannya sehingga contoh yang disajikan hanya untuk satu tahun yaitu tahun 2009 saja. Jika akan dilengkapi, maka neraca di atas dilengkapi dengan kolom tahun 2008 disisi kanannya dan diisi dengan data neraca akhir tahun 2008.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemda!
2. Jelaskan cara menggabungkan LRA dan Neraca dari berbagai SKPD dan BUD untuk menghasilkan laporan keuangan Pemda!
3. Jelaskan cara menyusun laporan arus kas untuk tingkat Pemda!
4. Jelaskan hubungan antara neraca dan laporan arus kas!
5. Jelaskan hubungan antara neraca dengan laporan realisasi anggaran!

#### **E. Rangkuman**

PPKPD menerima laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan keuangan dari entitas akuntansi tersebut, PPKD menyusun laporan keuangan gabungan/konsolidasian di tingkat pemerintah daerah. Penyusunannya dilakukan dengan cara menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi di Pemda tersebut.

Sedangkan untuk menyusun Laporan Arus Kas hanya disusun oleh PPKD selaku BUD yang dapat menggunakan data dari Laporan Realisasi APBD yang meliputi realisasi pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, ditambah dengan data transaksi non anggaran, antara lain seperti penerimaan dan penyetoran PPN/PPh, iuran askes, iuran taspen.

#### **F. Test Formatif**

##### **PILIH LAH JAWABAN YANG PALING TEPAT**

1. Berikut ini yang merupakan entitas pelaporan adalah :
  - a. Dinas Kesehatan
  - b. Dinas Perhubungan

- c. PPKD
  - d. Sekretarian DPRD
2. Entitas berikut ini yang menyusun laporan arus kas adalah :
- a. Dinas Kesehatan
  - b. SKPKD selaku SKPD
  - c. PPKD
  - d. Sekretarian DPRD
3. Entitas yang menyusun laporan keuangan level Pemda adalah :
- a. SKPD
  - b. SKPKD selaku SKPD
  - c. PPKD
  - d. Wakil Kepala Daerah
4. Menurut Permendagri 13 tahun 2006 pasal 240 ayat (2), Laporan Keuangan level Pemda disusun dengan cara :
- a. Penggabungan atas seluruh laporan keuangan yang diterbitkan oleh seluruh SKPD tanpa laporan keuangan BUD.
  - b. Penggabungan atas seluruh laporan keuangan yang diterbitkan oleh seluruh SKPD ditambah laporan keuangan atas DPA SKPKD selaku BUD.
  - c. Berdasarkan transaksi keuangan seluruh SKPD disusun laporan keuangan oleh PPKD.
  - d. Berdasarkan transaksi Keuangan seluruh SKPD disusun laporan keuangan oleh konsultan
5. Untuk menyusun laporan Keuangan Pemda, PPKD menggunakan data sebagai berikut :
- a. Laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi (SKPD) yang telah diverifikasi/direviu dan/atau direkonsiliasi untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemda
  - b. Data transaksi asli dari seluruh SKPD
  - c. Fotocopy dari data asli

- d. Laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi (SKPD) tidak termasuk Sekretarian DPRD yang telah diverifikasi/direviu dan/atau direkonsiliasi untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemda
6. Pernyataan berikut ini yang benar adalah :
- a. Neraca memuat informasi mengenai Reasasi dan anggarannya
  - b. Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi mengenai Reasasi dan anggarannya
  - c. Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai Reasasi dan anggarannya
  - d. Laporan Arus Kas memuat informasi mengenai Reasasi dan anggarannya
7. Dalam menyusun neraca gabungan harus diperhatikan rekening yang harus dieliminasi. Secara sederhana cara menyusun eliminasi adalah :
- a. RK-PPKD yang ada di SKPD pasti memiliki saldo kredit dan RK-SKPD bersaldo debit, oleh karena itu RK-PPKD didebit dan RK-SKPD dikredit
  - b. RK-PPKD yang ada di SKPD pasti memiliki saldo debit dan RK-SKPD bersaldo kredit, oleh karena itu RK-PPKD dikredit dan RK-SKPD didebit
  - c. RK-PPKD di SKPD dan RK-SKPD di BUD letak saldonya pasti berbeda, eliminasinya adalah account yang saldonya di sisi debit harus dikredit dan account yang saldonya di sisi kredit harus didebit.
  - d. RK-PPKD yang ada di SKPD pasti memiliki saldo debit dan RK-SKPD bersaldo kredit, oleh karena itu RK-PPKD dikredit dan RK-SKPD dikredit
8. Dalam menggabung Laporan Keuangan, PPKD akan mengeliminasi akun reciprocal. Akun reciprocal tersebut adalah :
- a. RK PPKD yang ada di SKPD dengan akun Investasi yang ada di BUD
  - b. RK-PPKD yang ada di SKPD dengan RK SKPD di BUD
  - c. RK-PPKD yang ada di SKPD dengan RK Piutang di BUD
  - d. RK PPKD yang ada di SKPD dengan Ekuitas Dana Investasi di BUD
9. Dalam menggabungkan seluruh laporan keuangan Pemda, penyusun harus memahami beberapa pendapatan dan belanja yang dianggarkan oleh masing-masing SKPD dan BUD. Pernyataan berikut ini yang benar adalah :

- a. Pendapatan perimbangan - DAU terdapat di Laporan Realisasi Anggaran SKPD Dinas Kesehatan
- b. Pendapatan perimbangan - DAK terdapat di Laporan Realisasi Anggaran SKPD Dinas Pendidikan
- c. Pendapatan Retribusi Kesehatan terdapat di Laporan realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
- d. Penerimaan Pembiayaan terlaporkan di Neraca BUD

10. Ada hubungan antara neraca dengan laporan arus kas serta laporan Realisasi Anggaran yaitu :

- a. Saldo Kas di neraca harus sama dengan saldo kas akhir tahun menurut laporan arus kas
- b. Saldo Kas di neraca harus sama dengan saldo kas akhir tahun menurut Laporan Realisasi Anggaran
- c. Saldo Kas di neraca harus sama dengan penerimaan kas menurut Laporan Arus Kas
- d. Saldo SILPA di neraca harus sama dengan saldo Kas akhir tahun di Laporan Arus Kas

11. Ada hubungan antara neraca dengan laporan Realisasi Anggaran yaitu :

- a. Saldo Kas di neraca harus sama dengan Jumlah Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- b. Saldo Kas di neraca harus sama dengan Pembiayaan Neto
- c. Saldo Kas di neraca harus sama dengan Surplus
- d. Saldo SiLPA di Neraca Gabungan harus sama dengan saldo SiLPA (akhir tahun) di LRA gabungan.

12. Dalam menyusun neraca gabungan harus diperhatikan hubungan antara sisi aset dengan kewajiban dan ekuitas dana. Item-item tertentu berhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut pernyataan berikut **yang paling tepat** adalah :

- a. Saldo SILPA di neraca harus sama dengan saldo Kas di Kasda
- b. Saldo SILPA di neraca harus sama dengan saldo Kas di Kasda dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan

- c. Saldo SILPA di neraca harus sama dengan saldo Kas di Kasda dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
  - d. Saldo SILPA di neraca harus sama dengan saldo Kas di Kasda dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dikurangi dengan hutang PFK
13. Dalam menyusun neraca gabungan harus diperhatikan hubungan antara sisi aset dengan kewajiban dan ekuitas dana.. Sehubungan dengan hal tersebut pernyataan berikut **yang paling tepat** adalah :
- a. Jumlah Piutang (jangka pendek dan jangka panjang) di sisi aset harus sama dengan saldo Cadangan piutang
  - b. Saldo Kas di Kasda sama dengan saldo SILPA
  - c. Saldo Dana yhd untuk membayar hutang jangka pendek harus sama dengan saldo hutang jangka pendek termasuk hutang PFK
  - d. Saldo Dana yhd untuk membayar hutang jangka pendek harus sama dengan saldo hutang jangka pendek tidak termasuk hutang PFK
14. Dalam menyusun laporan Arus Kas di tingkat Pemda, karena basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LRA adalah basis kas maka :
- a. PPKD cukup menyalin LRA menjadi Laporan Arus Kas, Pendapatan dan penerimaan pembiayaan merupakan arus kas masuk sementara itu Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dilaporkan sebagai Arus kas Keluar serta tak perlu ada informasi lain
  - b. PPKD menyalin LRA menjadi Laporan Arus Kas, Pendapatan dan penerimaan pembiayaan merupakan arus kas masuk sementara itu Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dilaporkan sebagai Arus kas Keluar. Disamping itu penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang terjadi di BUD dilaporkan dalam Laporan Arus Kas
  - c. PPKD menyalin LRA menjadi Laporan Arus Kas, Pendapatan dan penerimaan pembiayaan merupakan arus kas masuk sementara itu Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dilaporkan sebagai Arus kas Keluar. Disamping itu penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang terjadi di BUD dan SKPD dilaporkan pula dalam Laporan Arus Kas sebagai penerimaan dan pengeluaran non anggaran

- d. PPKD cukup menyalin LRA menjadi Laporan Arus Kas, Pendapatan dan penerimaan pembiayaan merupakan arus kas masuk sementara itu Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dilaporkan sebagai Arus kas Keluar. Selanjutnya data penerimaan/pengeluaran non anggaran yang mungkin terjadi di seluruh SKPD dilaporkan pula dalam laporan arus kas.
15. Pernyataan berikut terkait dengan penyusunan laporan keuangan level Pemda. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
- Tanpa data tambahan Pemda sudah dapat menyusun laporan keuangan level Pemda berdasarkan laporan keuangan dari seluruh SKPD dan BUD
  - Jurnal eliminasi yang dibuat dalam rangka menyusun laporan keuangan gabungan diposting ke buku besar.
  - SILPA adalah selisih dari Pendapatan dan belanja
  - Di pembukuan SKPD Dinas Kesehatan tidak mungkin ada saldo SILPA

#### G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang sesuai kunci}}{\text{Jumlah semua soal}} \times 100\%$$

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

- 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

## TES SUMATIF

### I. PILIHAN BERGANDA

Pilih salah satu jawaban yang paling benar!

1. Berikut ini bukan merupakan tujuan akuntansi pemerintah adalah :
  - a. Menjaga aset Pemerintah Pusat/Daerah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
  - b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat mengenai aset seluruh perusahaan di suatu negara.
  - c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat/Daerah secara keseluruhan.
  - d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
  
2. Undang-undang perbendaharaan yang berlaku saat ini yang merupakan produk bangsa Indonesia adalah :
  - a. ICW
  - b. IBW
  - c. Undang Undang No 17 tahun 2004
  - d. Undang Undang No 1 tahun 2004
  
3. Neraca pemerintah daerah pada hakikatnya berisi informasi berikut ini :
  - a. Aset
  - b. Pendapatan
  - c. Belanja
  - d. Penerimaan Pembiayaan
  
4. Berikut ini bukan merupakan informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, kecuali :

- a. Aset
  - b. Hutang
  - c. Ekuitas Dana
  - d. Penerimaan Pembiayaan
5. Berikut ini adalah urutan pekerjaan akuntansi :
- a. Dibuat jurnal, membuat bukti transaksi dan selanjutnya menyusun laporan keuangan
  - b. Bukti transaksi dianalisis, dijurnal, posting ke buku besar
  - c. Bukti transaksi dianalisis, dibuat laporan keuangan, dibuat jurnal
  - d. Membuat jurnal, posting ke buku besar serta menganalisis bukti transaksi
6. Berikut ini adalah pemahaman yang benar dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) :
- a. Standar akuntansi merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan oleh entitas pelaporan
  - b. SAP merupakan serangkaian prosedur
  - c. SAP pedoman pelaksanaan anggaran
  - d. SAP disusun oleh Menteri keuangan atau Kepala Daerah
7. Pembayaran hutang PFK mengakibatkan timbulnya arus kas keluar dari kegiatan :
- a. Operasional
  - b. Pembiayaan
  - c. Non Anggaran
  - d. Investasi Non Anggaran
8. Berikut ini yang bukan merupakan informasi yang tersaji dalam Neraca :
- a. Aset (harta)
  - b. Hutang (kewajiban)
  - c. Pendapatan
  - d. Ekuitas Dana
9. Berikut ini yang bukan merupakan informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, adalah :

- a. Aset (harta)
- b. Belanja
- c. Pendapatan
- d. Penerimaan pembiayaan

**Data Untuk soal no 10 s.d no 14**

Di neraca per 31 Desember 2009 terdapat informasi disisi aset sebagai berikut:

Aset Lancar	
Kas di Kas Daerah	25.000.000
Piutang Retribusi	10.000.000
Bagian lancar piutang angsuran	20.000.000
Bagian lancar piutang ganti rugi	12.000.000
Persediaan	5.000.000
Jumlah aset lancar	72.000.000
Aset tetap	
Tanah	?
Peralatan dan Mesin	3.200.000.000
Gedung dan Bangunan	4.000.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	900.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan (bangunan kantor)	300.000.000
Jumlah aset tetap	17.400.000.000
Aset Lainnya	
Tagihan Penjualan angsuran	90.000.000
Tuntutan ganti rugi	48.000.000
Jumlah aset lainnya	138.000.000
Total aset	17.610.000.000

10. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya

Cadangan Piutang adalah :

- a. Rp.10.000.000
- b. Rp.20.000.000
- c. Rp.12.000.000
- d. Rp.42.000.000

11. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya Cadangan Persediaan adalah :
- a. Rp.10.000.000
  - b. Rp.20.000.000
  - c. Rp.12.000.000
  - d. Rp.5.000.000
12. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya nilai "Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap adalah :
- a. Rp.25.000.000.000
  - b. Rp.20.000.000.000
  - c. Rp.17.400.000.000
  - d. Rp.17.610.000.000
13. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya nilai tanah adalah :
- a. Rp.9.000.000.000
  - b. Rp.10.000.000.000
  - c. Rp.17.400.000.000
  - d. Rp.17.610.000.000
14. Berdasarkan pada data neraca yang belum lengkap tersebut, besarnya ekuitas dana diinvestasikan dalam aset lainya adalah :
- a. Rp.9.000.000
  - b. Rp.138.000.000
  - c. Rp.67.000.000
  - d. Rp.17.000.000
15. Pemda X pada tanggal 1 Januari 2009 memiliki aset Rp.200.000.000.000,00, dan kewajiban Rp.1.000.000.000,00. Jika tidak ada data lain maka besarnya ekuitas dana adalah :
- a. Rp.200.000.000.000,00
  - b. 1.000.000.000,00
  - c. Rp.201.000.000.000,00
  - d.199.000.000.000,00

16. Akun buku besar berikut ini yang bersaldo normal debit adalah :
- Belanja Pegawai
  - Pendapatan pajak hotel
  - Pendapatan Pajak reklame
  - Pendapatan Asli Daerah Lainnya
17. Pernyataan berikut ini yang salah adalah :
- Akun "Kas di Kasda akan" bersaldo debit, jika uang kas di Kasda bertambah penambahan tersebut dicatat di sisi debit akun tersebut, jika ada pengurangan uang di kasda pengurangan tersebut dicatat di sisi kredit akun Kas di Kasda.
  - Akun "Kas Bendahara Penerimaan " bersaldo debit, jika uang kas di Bendahara Penerimaan bertambah penambahan tersebut dicatat di sisi debit akun tersebut, jika ada pengurangan uang di Bendahara Penerimaan pengurangan tersebut dicatat di sisi kredit akun Kas Bendahara Penerimaan.
  - Akun Tanah bersaldo normal debit, jika ada penambahan tanah yang dimiliki Pemda bertambah maka penambahan tersebut dicatat di sisi debit akun "Tanah" sebaliknya jika terjadi pengurangan atas tanah yang dimiliki oleh Pemda, pengurangan tersebut dicatat disisi kredit akun "Tanah".
  - Jika Satu SKPD membayar belanja Pegawai, maka pengeluaran tersebut akan dicatat di akun Belanja Pegawai di sisi kredit.
18. Pemda (Kasda) memotong iuran Askes sebesar Rp1.500.755.000 dan uangnya dimasukkan ke Kasda yang nantinya akan disetorkan ke PT Askes
- Kas di Kasda bertambah Rp.1.500.755.000 dan timbul hutang ke PT Askes sebesar Rp.1.500.755.000.
  - Kas di Kasda berkurang Rp.1.500.755.000 dan timbul hutang ke PT Askes sebesar Rp.1.500.755.000.
  - Kas di Kasda bertambah Rp.1.500.755.000 dan timbul hutang ke Kas Negara sebesar Rp.1.500.755.000

d. Kas di Kasda berkurang Rp.1.500.755.000 dan hutang ke PT Askes berkurang sebesar Rp.1.500.755.000.

19. Pemda Kabupaten X menerima dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari propinsi Rp.200.000.000,00

a. Kas di Kasda	200.000.000	-
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat	-	200.000.000
b. Kas di Kasda	200.000.000	-
Belanja Migas	-	200.000.000
c. Kas di Kasda	200.000.000	-
Pendapatan DBH Pajak Kendaraan Bermotor	-	200.000.000
d. Pendapatan DBH Pajak Kendaraan Bermotor	200.000.000	-
Kas di Kasda	-	200.000.000

20. Pemda Kabupaten X menerima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar Rp.3.000.000.000,00.

a. Kas di Kasda	3.000.000.000	-
Pendapatan DBH Sumber Daya Alam Migas	-	3.000.000.000
b. Kas di Kasda	3.000.000.000	-
Dana Perimbangan- DAU	-	3.000.000.000
c. Kas di Kasda	3.000.000.000	-
Dana Perimbangan-DAK	-	3.000.000.000
d. Pendapatan Dana Perimbangan-DAU	3.000.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.000.000.000

21. Pemda membayar biaya jasa servis mobil ambulans (5.2.2.05.01) dengan mengeluarkan uang dari UP sebesar Rp3.105.000

a. Pengeluaran Pembiayaan-Jasa service	3.150.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	3.150.000.000
b. Belanja Modal- Ambulance	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
c. Persediaan Service	3.150.000.000	-
Kas di Kasda	-	3.150.000.000
d. Belanja Barang Dan Jasa- Jasa Service	3.105.000.000	-

Kas di Kasda	-	3.105.000.000
22. SKPD membeli bahan kimia untuk keperluan melaksanakan kegiatan fogging sebesar Rp150.000.000 dari UP		
a. Pengeluaran Pembiayaan-ATK	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000
b. Belanja Modal-Bahan Kimia	150.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	150.000.000
c. Persediaan Bahan kimia	150.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	150.000.000
d. Belanja Barang Dan Jasa-Bahan kimia	150.000.000	-
Kas di Kasda	-	150.000.000
23. Pemda menerima pinjaman dana dari pemerintah pusat sebesar Rp.2.000.000.000,00. Dana tsb langsung masuk rekening Kas daerah di Bank Pembangunan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	2.000.000.000	-
Kas di Kasda	-	2.000.000.000
b. Kas di Kasda	2.000.000.000	-
Penerimaan Pembiayaan	-	2.000.000.000
c. Kas di Kasda	2.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	2.000.000.000
d. Kas di Kasda	2.000.000.000	-
Hutang ke Pemerintah Pusat	-	2.000.000.000
24. Pemda membayar pinjaman ke pemerintah pusat sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan mentransfer dana dari Rekening Kasda di Bank Pembangunan Daerah		
a. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	-
Kas di Kasda	-	1.000.000.000
b. Kas di Kasda	1.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	1.000.000.000
c. Hutang Ke Pemerintah Pusat	1.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	1.000.000.000
d. Kas di Kasda	1.000.000.000	-

25. BUD menerbitkan SP2D LS untuk belanja modal komputer sebesar Rp 30.000.000 (setelah dipotong PPN Rp.3.000.000,00) yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan. Jurnal yang dibuat oleh BUD adalah :

a. RK-SKPD Dinas Kesehatan	33.000.000	-
Kas di Kasda	-	33.000.000
Kas di Kasda	3.000.000	-
Hutang ke Pemerintah Pusat	-	3.000.000
b. RK-SKPD Dinas Kesehatan	33.000.000	-
Kas di Kasda	-	33.000.000
Kas di Kasda	3.000.000	-
Hutang PPN Pusat	-	3.000.000
c. RK-SKPD Dinas Kesehatan	33.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	33.000.000
Kas di Kasda	3.000.000	-
Hutang PPN Pusat	-	3.000.000
d. RK-SKPD Dinas Kesehatan	33.000.000	-
Kas di Kasda	-	33.000.000
Hutang PPN Pusat	-	3.000.000

26. Januari 2008 Bendahara SKPD X menyetorkan uang retribusi daerah yaitu uang pendaftaran ujian masuk sebesar Rp.251.000.000,00.

a. RK PPKD	251.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	251.000.000
b. RK PPKD	251.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	251.000.000
c. RK-SKPD	152.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	252.000.000
d. RK PPKD	521.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	251.000.000

27. Pada tanggal 17 April 2008 BPKD menerima transfer dana Bagi Hasil PBB Rp.500.000.000,00 dan BPHTB sebesar Rp. 120.000.000,00.

a. Kas di Kasda	120.000.000	-
Pendapatan DBH Pajak	500.000.000	

	Pendapatan DBH BPHTB		620.000.000
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	620.000.000	-
	Pendapatan Perimbangan-DAU	-	620.000.000
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	620.000.000	-
	Pendapatan DBH Pajak		120.000.000
	Pendapatan DBH BPHTB	-	500.000.000
d.	Kas di Kasda	620.000.000	-
	Pendapatan Bagi Hasil	-	500.000.000
	↳ Pendapatan Bagi Hasil BPHTB		120.000.000

28. Pada tanggal 12 Mei 2009 dilakukan pengembalian Pendapatan Bagi Hasil PBB tahun yang lalu sebesar Rp.250.000.000,00.

a.	Pendapatan DBH PBB	250.000.000	
	Kas di Kasda		250.000.000
b.	Retur Pendapatan DBH PBB	250.000.000	
	Kas di Kasda		250.000.000
c.	Pendapatan asli daerah lainnya	250.000.000	
	Kas di Kasda		250.000.000
d.	Pendapatan tak terduga	250.000.000	
	Kas di Kasda		250.000.000

29. Pada tanggal 5 Maret 2009 BPKD/SKPKD melakukan pembayaran subsidi untuk tahun 2008 kepada PDAM sebesar Rp.200.000.000,00

a.	Investasi ke BUMB	200.000.000	
	Kas di Kasda		200.000.000
b.	Belanja Subsidi ke perusahaan	200.000.000	
	Kas di Kasda		200.000.000
c.	Pengeluaran pembiayaan	200.000.000	
	Kas di Kasda		200.000.000
d.	Belanja Subsidi ke perusahaan	200.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		200.000.000

30. Dalam menyusun neraca gabungan harus diperhatikan hubungan antara sisi aset dengan kewajiban dan ekuitas dana. Item-item tertentu berhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut pernyataan berikut **yang paling tepat** adalah :
- a. Saldo SILPA di neraca harus sama dengan saldo Kas di Kasda
  - b. Saldo SILPA di neraca harus sama dengan saldo Kas di Kasda dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan
  - c. Saldo SILPA di neraca harus sama dengan saldo Kas di Kasda dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
  - d. Saldo SILPA di neraca harus sama dengan saldo Kas di Kasda dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dikurangi dengan hutang PFK

## II. Benar-Salah

Pilih **B** untuk pernyataan yang menurut Saudara benar dan pilih **S** untuk pernyataan yang menurut Saudara Salah.

- 1. B - S Penerimaan non anggaran disajikan di LRA maupun Laporan Arus Kas
- 2. B - S Tak ada bedanya antara standar akuntansi pemerintahan dengan sistem akuntansi pemerintah
- 3. B - S Akun Ekuitas Dana bersaldo normal kredit, jika ekuitas dana bertambah maka penambahan tersebut dicatat di sisi kredit, sebaliknya jika terjadi pengurangan ekuitas dana, pengurangan tersebut dicatat di sisi debit.
- 4. B - S Akun Ekuitas Dana bersaldo normal kredit, jika ekuitas dana bertambah maka penambahan tersebut dicatat di sisi debit, sebaliknya jika terjadi pengurangan ekuitas dana, pengurangan tersebut dicatat di sisi kredit

5. B - S Penerimaan dana Perimbangan dan Dana Bagi hasil merupakan kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD seperti Dinas Pendidikan, Perhubungan dst
6. B - S Di SKPKD terdapat DPA SKPKD selaku SKPD dan DPA SKPKD selaku BUD
7. B - S Setiap SKPD yang menerima anggaran wajib melakukan akuntansi walaupun tidak perlu menyusun laporan pertanggungjawaban
8. B - S Saldo Dana yhd untuk membayar hutang jangka pendek harus sama dengan saldo hutang jangka pendek tidak termasuk hutang PFK
9. B - S Setiap pengguna anggaran wajib menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan
10. B - S Penyusunan laporan keuangan gabungan merupakan tanggungjawab seluruh SKPD

## KUNCI JAWABAN

### A. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 1

- |      |       |       |
|------|-------|-------|
| 1. D | 6. D  | 11. D |
| 2. B | 7. D  | 12. B |
| 3. A | 8. D  | 13. B |
| 4. B | 9. 8  | 14. B |
| 5. C | 10. A | 15. A |

### B. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 2

- |      |       |       |
|------|-------|-------|
| 1. A | 6. D  | 11. A |
| 2. C | 7. B  | 12. A |
| 3. A | 8. C  | 13. B |
| 4. D | 9. A  | 14. A |
| 5. A | 10. A | 15. A |

### C. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 3

- |      |       |       |
|------|-------|-------|
| 1. D | 6. B  | 11. B |
| 2. A | 7. C  | 12. B |
| 3. C | 8. A  | 13. D |
| 4. D | 9. A  | 14. B |
| 5. A | 10. B | 15. A |

### D. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 4

- |      |       |       |
|------|-------|-------|
| 1. B | 6. D  | 11. A |
| 2. B | 7. B  | 12. B |
| 3. B | 8. D  | 13. A |
| 4. D | 9. B  | 14. A |
| 5. A | 10. A | 15. A |

### E. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 5

- |      |      |       |
|------|------|-------|
| 1. C | 6. B | 11. D |
| 2. C | 7. B | 12. A |

- |      |       |       |
|------|-------|-------|
| 3. C | 8. C  | 13. B |
| 4. D | 9. D  | 14. C |
| 5. B | 10. B | 15. A |

**F. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 6**

- |      |       |       |
|------|-------|-------|
| 1. A | 6. B  | 11. B |
| 2. A | 7. B  | 12. A |
| 3. D | 8. C  | 13. D |
| 4. A | 9. A  | 14. A |
| 5. B | 10. B | 15. C |

**G. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 7**

- |      |       |       |
|------|-------|-------|
| 1. C | 6. B  | 11. D |
| 2. C | 7. C  | 12. D |
| 3. C | 8. B  | 13. D |
| 4. B | 9. C  | 14. C |
| 5. A | 10. A | 15. D |

**H. TES SUMATIF**

**I. PILIHAN GANDA**

- |      |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 6. A  | 11. D | 16. A | 21. A | 26. A |
| 2. D | 7. C  | 12. C | 17. D | 22. B | 27. D |
| 3. A | 8. C  | 13. A | 18. A | 23. B | 28. A |
| 4. D | 9. A  | 14. B | 19. C | 24. A | 29. B |
| 5. B | 10. A | 15. D | 20. B | 25. B | 30. D |

**II. BENAR SALAH**

- |      |       |
|------|-------|
| 1. S | 6. B  |
| 2. B | 7. B  |
| 3. S | 8. S  |
| 4. B | 9. B  |
| 5. B | 10. S |

## DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principles Board (APB), Basic Concepts And Accounting Principles Underlying Financial Statements Of Business Enterprises, dalam Stice, Stice and Skousen, Intermediate Accounting, Edisi 15, 2001, South-Western College Publishing.
- Stice, Stice and Skousen, Intermediate Accounting, Edisi 15, 2004, South-Western College Publishing.
- Fess, Reeve and Warren, Accounting, Edisi 21, 2005, Thomson South Western.
- Margono, Pengantar Akuntansi-Buku Satu, Edisi Pertama tahun 2009, Stanpress.
- Margono, Marmah, Andi, Penggunaan Program Excel Untuk Akuntansi Pemerintah Daerah, Edisi pertama tahun 2010, Stanpress.
- Margono, Mulyana Budi, Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi pertama tahun 2010, Stanpress.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.